



MUSHAB ABDU ASY SYAHID & M. ALFIAN NUGRAHA FAUZI

TIGA DEKADE SEJARAH DAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG

Riwayat kota peri-urban yang terbentang di antara Banten dan Jakarta selama tiga puluh tahun lamanya (1993-2023)

Kata Pengantar:

H. Arief Rachadiono Wismansyah, B.Sc., M.Kes.

Walikota Tangerang Tahun 2013-2023



TIGA DEKADE **SEJARAH** DAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG

Riwayat kota peri-urban yang terbentang di antara Banten dan Jakarta
selama tiga puluh tahun lamanya (1993-2023)

Mushab Abdu Asy Syahid
M. Alfian Nugraha Fauzi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Tangerang
2023

Tiga Dekade Sejarah dan Pembangunan Kota Tangerang

ISBN: 978-623-09-7386-4

15 X 21, 226 Hlm.

Pengarah

Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Tangerang
R. Rizal Ridolloh

Tim Penulis

Mushab Abdu Asy Syahid
M. Alfian Nugraha Fauzi

Penanggung Jawab

Kepala Bidang Kebudayaan
Sumangku

Editor

Mushab Abdu Asy Syahid
M. Alfian Nugraha Fauzi

Koordinator

Yaniek Purwaningsih
Nurkholis

Ilustrasi

Hidayatus Shibyan
Dais Dharmawan Paluseri

Sampul dan Tata Letak

Reni Septiani
Firsa Sofhie A.R.
Dedi Sutrisno
Jegen Zaenudin
Alan Rezky Ramadhan

Penerbit

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang

Cetakan Pertama, Desember 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wa rahmatullabi wa barakatuh
Kepada Para Pembaca yang Terbormat,

Saat kita memandang ke belakang, kita menyadari bahwa sebuah kota bukanlah hanya sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah warisan berharga yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Kota Tangerang, dengan segala pesona sejarahnya, telah menjadi saksi bisu dari perjalanan yang panjang, dari masa lalu hingga masa kini.

Dalam lembaran sejarahnya, Kota Tangerang tak henti menorehkan cerita keberagaman budaya, kegigihan dalam berkembang, dan semangat dalam mengatasi tantangan modern. Buku yang Anda pegang ini adalah sebuah jendela ke dalam perjalanan menakjubkan kota ini; dari titik awalnya sebagai pusat perdagangan yang ramai hingga menjadi sebuah pusat kota yang modern dan berdaya saing.

Dengan bangga, kami mempersembahkan buku ini kepada Anda. Buku ini bukan hanya sekadar kumpulan fakta dan data sejarah, melainkan upaya untuk mengabadikan perjalanan gemilang Kota Tangerang serta memberikan penghormatan kepada para pelopor dan pahlawan yang telah membangun fondasi kokoh kota ini.

Sejalan dengan semangat penghargaan terhadap sejarah Kota Tangerang, mari kita bersama-sama menggali lebih dalam, menelusuri setiap lorong perjalanan yang membentuk karakternya. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan nuansa kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Tangerang serta keunikan tradisi dan warisan budaya yang kita miliki bersama.

Buku ini merupakan undangan bagi Anda untuk merenung, meresapi, dan menyatu dengan setiap lembarannya. Melalui cerita-cerita ini, kita dapat lebih memahami esensi dan dinamika kehidupan masyarakat Kota Tangerang dan memetik hikmah dari perjuangan mereka. Mari bersama-sama menyemai semangat kebersamaan, karena

warisan sejarah bukan hanya cerita masa lalu, melainkan fondasi yang mengukir masa kini dan memberi arah pada masa depan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan sepenuh hati berkontribusi terlibat dalam proses penyusunan buku ini, dari para peneliti yang tekun hingga mereka yang memberikan cerita-cerita berharga. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, mendorong kita untuk terus menghargai warisan sejarah modern kota dalam tiga dasawarsa dan melangkah maju dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi.

*Wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh
Salam hormat,*

Arief R Wismansyah
Walikota Kota Tangerang

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah ﷻ, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan buku *Tiga Dekade Sejarah dan Pembangunan Kota Tangerang* dapat kami selesaikan pembuatannya pada tahun ini. Dalam waktu pengerjaan dan penulisan yang relatif singkat, buku sederhana ini telah rampung dan siap untuk dibaca dan dinikmati oleh khalayak luas khususnya masyarakat Kota Tangerang. Buku ini merupakan sebuah karya yang mencoba untuk merefleksikan riwayat dan transformasi pembangunan di Kota Tangerang selama 3 dekade sejak awal berdirinya kota ini secara resmi pada tahun 1993, hingga tepat menginjak usianya yang ke-30 tahun pada tahun ini.

Ini adalah sebuah perjalanan kota melintasi rentang waktu, sebuah kisah yang merangkum tiga dekade penuh sejarah dan pembangunan kota Tangerang. Buku ini menuliskan saksi-saksi bisu perubahan yang mengubah wajah kota peri-urban di antara Banten dan Jakarta selama tahun 1993 hingga 2023. Di dalamnya, pembaca akan diajak mengarungi aliran waktu yang membentang sepanjang tiga puluh tahun, menyusuri jejak perkembangan yang menandai setiap fase kota ini. Mulai dari awal periode ini, kita akan menyelami akar sejarah kota peri-urban, memetakan transformasi yang membentuk identitas dan lokalitasnya. Penulis juga merinci peristiwa-peristiwa signifikan, menciptakan narasi yang mudah-mudahan memungkinkan pembaca ikut membayangkan sejarah kota ini.

Selama tiga dekade, Kota Tangerang bukan sekadar menyaksikan perubahan fisik, tetapi juga menggali dan memelihara akar budayanya. Pembangunan tak hanya terlihat dalam beton dan aspal, tetapi juga dalam semangat solidaritas, keberagaman, dan rasa hormat terhadap warisan budaya leluhur, harmoni dalam keberagaman dan keberagamaan. Buku ini menyoroti momen-momen krusial seperti kelahiran kota otonom baru,

peran infrastruktur transportasi, faktor kepemimpinan lokal, dampak industrialisasi, tragedi dan memori kolektif, hingga upaya pelestarian warisan budaya di tengah derasnya arus modernisasi dan neoliberalisme akhir di kota ini. Buku ini menghadirkan Tangerang dalam panggung nasional dan internasional, menjadi bukti bagaimana kota otonom dapat tumbuh dan berkembang di tengah pesatnya pertautan global dan lokal.

Dalam proses pembuatan buku ini, terdapat banyak pihak yang membantu kami khususnya dari Pemerintah Kota Tangerang yang telah memfasilitasi dan mendorong agar karya ini hadir. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang, Bapak R. Rizal Ridolloh, S.Sos., M.Si.; Kepala Bidang Kebudayaan, Bapak Sumangku, S.IP; Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya Ibu Yaniek Purwaningsih, S.STP.; dan Kepala Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman Bapak Nurkholis, S.Ag.. Tidak lupa juga kami sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim bidang Budaya: Dais Dharmawan, Shibyan, Fiersa, Reni, dan lain-lain; Perpustakaan Daerah Kota Tangerang dan Perpustakaan Nasional RI; para narasumber yang terlibat; serta berbagai pihak lainnya yang telah membantu dan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan buku ini.

Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi sumber informasi, rujukan awal, dan pemantik diskusi produktif masyarakat Kota Tangerang untuk mempelajari tiga dekade sejarah dan pembangunan kota ini.

Kota Tangerang, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	iv
Kata Pengantar	v
Pengantar Penulis	vii
Daftar Isi	ix
BAB	
Pendahuluan: Riwayat Kota Tiga Dasawarsa	1
BAB 2	
Selayang Pandang Terbentuknya Kota Tangerang	16
BAB 3	
Tangerang Lepas Landas: Bandara dan Lahirnya Kota Baru	36
BAB 4	
Walikota Tangerang dari Masa ke Masa	54
BAB 5	
Tangerang Kota Pascaindustri	88
BAB 6	
Riak Sejarah Tragedi 1998 dalam Kenangan Kolektif	102
BAB 7	
<i>Tatengger</i> , Tenggara, Tangerang	113
BAB 8	
Tangerang Akhlakul Karimah, Harmoni dalam Keberagaman	129
BAB 9	
Sejarah Pelestarian Warisan Budaya Kota	138
BAB 10	
Melintasi Pintu Waktu: Eksplorasi Museum Unik Kota	189
Epilog	204
Daftar Pustaka	205
Profil Penulis	215

BAB 1

PENDAHULUAN: RIWAYAT KOTA TIGA DASAWARSA

Mushab Abdu Asy Syahid

“Sudut pandang penduduk asli juga mencakup kaum intelektual... Dunia Ketiga tidak hanya menghasilkan ‘kebudayaan-kebudayaan’ untuk dipelajari oleh para antropolog dan sejarawan etnik [Barat], tetapi juga menghasilkan para intelektual yang menghasilkan teori dan merefleksikan budaya dan sejarah mereka sendiri.”¹

A. Kota Tiga Dasawarsa?

Kutipan di atas merupakan terjemahan dari pernyataan Walter D. Mignolo, seorang profesor Argentina dari Duke University, AS, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1993, persis saat Pemerintahan Kota Tangerang baru resmi berdiri sebagai kota otonom. Sebagai salah seorang pendiri aliran pemikiran *dekolonial*, ia menekankan pentingnya kehadiran intelektualitas masyarakat lokal di negara-negara Dunia Ketiga, karena merekalah yang seharusnya merefleksikan sejarah dan budaya mereka sendiri. Ia juga menolak gagasan pembangunan satu arah dari ‘pusat’ ke ‘pinggiran’ yang telah diperkenalkan sejak kolonialisme dan modernisasi dari bangsa Eropa (Barat) ke bangsa non-Barat. Mignolo mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dari wilayah perbatasan yang sering diabaikan dalam sejarah, memperjuangkan suara-suara lokal yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi pusat dan narasi yang lebih besar.

Menjelajahi sejarah dan cerita di ruang-ruang lokal dan setempat pinggiran menjadi topik menarik bagi negara yang baru merdeka atau kota yang baru berkembang. Kathleen Chakraborty (2014) dalam artikelnya

¹ Terjemahan dari Walter Mignolo (1993), *Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and the Border Thinking*, New Jersey: Princeton University Press, hlm. 129-131.

menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa non-Barat selama ini menjadi pelopor berbagai inovasi pembangunan. Daerah pinggiran, seperti negara jajahan atau perbatasan kota dan desa terpencil, seringkali dijadikan 'laboratorium' untuk eksperimen nilai-nilai dan pembangunan modern oleh penguasa. Ide-ide baru dalam pembangunan kota dan arsitektur lebih cepat meresap dan efektif di daerah pinggiran daripada di pusat yang sudah terlalu sibuk dengan banyaknya kepala dan pemikiran beragam. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi, budaya, dan sejarah di dunia non-Barat, atau dunia masyarakat wilayah pinggiran, sering dianggap statis hingga mengalami perubahan besar akibat industrialisasi dan modernisasi.²

Hal tersebut juga sangat relevan apabila kita membahas sejarah kota-kota kecil di Indonesia. Sejak masa pascakemerdekaan, khususnya era pascareformasi setelah tahun 1998, banyak kota/kabupaten baru yang bermekaran berkat kebijakan otonomi daerah, industrialisasi dan globalisasi akhir abad ke-20 di Indonesia. Generasi intelektual dan pekerja andal lahir di kota-kota berkembang dari pembangunan bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Suara dan inspirasi dari kota kecil yang selama ini tertutupi akibat dominasi kota besar dan penerapan sentralisasi Negara dalam waktu lama, perlahan semakin timbul berkat mereka yang memikirkan kemajuan kota tempat mereka tinggal.

Kemajuan kota-kota kecil itu, sementara membawa dampak positif, juga memunculkan sejumlah tantangan dan tuntutan baru, termasuk kebutuhan untuk membangun dan memperkuat identitas, kekhasan, dan keunikan kota sehingga mudah dikenali dan mudah dibedakan daripada kota dan kabupaten daerah pecahan sebelumnya. Banyak upaya dilakukan, misalnya penelusuran dan penulisan sejarah lokal yang mengukuhkan eksistensi dan peran penting daerah kota/kabupaten tersebut sejak masa lampau; melibatkan pengangkatan kisah-kisah kepahlawanan lokal dalam pembangunan kota, perekaman ulang peristiwa penting setempat, serta

² Kathleen James-Chakraborty (2014), "Beyond postcolonialism," hlm. 1-9.

perayaan dan pelestarian adat-istiadat dan budaya lokal. Pemerintah Daerah di wilayah Jabodetabek pun ikut memberikan perhatian khusus mengenai hal ini, dengan mengeluarkan sekian regulasi dan program yang mendukung pengembangan sejarah, budaya baru yang pada awalnya bergantung pada narasi kota Jakarta sebagai pusat yang lebih besar.

Model klasik hubungan pusat-pinggir dalam studi perkotaan telah lama diperkenalkan oleh John Friedmann pada pertengahan abad ke-20 (**Gambar 1.1**). Daerah pinggiran kerap dilabeli dengan “kota pinggiran”, “kota penyangga”, “kota satelit”, “suburban”, hingga istilah terkini “kota peri-urban”. Model perkotaan yang membagi secara jelas antara pusat dan pinggir telah banyak dipertanyakan oleh para ilmuwan perkotaan di masa kontemporer, misalnya Pullan (2011), Trubina (2015), dan Čepaitienė (2015) yang menyoroti dinamika hubungan pusat-pinggir dan melemahnya pengaruh pusat terhadap pinggiran sekaligus menguatnya kemandirian pinggiran terhadap pusat akibat mobilitas geografis dan sosial yang semakin meninggi, daya ekonomi, waktu dan mobilitas perjalanan (*travel*), serta konflik antarmasyarakat perkotaan di perbatasan.

Dalam tiga jilid buku *magnum opus* terbarunya yang berjudul *Kota-Kota Indonesia: Pengantar untuk Orang Banyak* (2023), seorang pakar perkotaan Indonesia Marco Kusumawijaya juga menyampaikan bahwa setiap kota memiliki perjalanan transformasi ruang yang unik. Pertumbuhan kota berkaitan dengan faktor ekonomi, posisi geografis, status dan kebijakan, dan teknologi seperti transportasi dan mobilitas. Setiap kota juga memiliki narasi khusus yang mencerminkan cara mengelola potensi sosial, budaya, tata ruang, dan lansekapnya. Terlalu berfokus pada masalah kota besar dapat mengaburkan potensi kota kecil untuk mengembangkan karakternya sendiri. Penataan perkotaan terlalu sering mengikuti contoh kota besar, membuat inspirasi dari kota kecil kehilangan peran memproyeksikan masa depan dengan mempertahankan nilai sejarah dan budayanya.

Buku ini adalah bagian dari upaya meneliti sejarah perkotaan atau *urban history* dari Kota Tangerang, sebuah kota kecil yang tengah membesar. Kumpulan tulisan dalam buku ini bertujuan mengungkapkan secara singkat fenomena lahirnya Kota Tangerang sebagai sebuah kota modern di Indonesia yang secara resmi, legal dan formal tepat melewati usianya yang ketiga puluh tahun. Jika ditarik lebih jauh lagi, terlepas daripada batas-batas administrasi kewilayahan dan birokrasi kota/kabupaten saat ini, tentu saja usia sejarah perkembangan daerah Tangerang jauh lebih tua dari 30 tahun.

Waktu yang terbentang antara masa lalu dan masa kini terus berlangsung dan tidak pernah ada keterputusan sejarah, sehingga sejarah awal peradaban masyarakat Tangerang telah berlangsung sejak empat sampai lima ratus tahun lalu. Interaksi nilai global dan lokal yang intensif di kota-kota baru, sebagaimana di Tangerang, mencairkan dualisme kota pusat dan kota pinggiran dalam kaitannya dengan Jakarta seiring otonomi daerah dan desentralisasi yang menguatkan peranan pemerintah daerah untuk menyusun suatu kota pusat baru yang terlepas dari pusat lamanya.

Di sisi lain, masa lalu dan sejarah kota bersifat problematis, karena pembangunan kota yang telah hadir saat ini tidak bisa berbicara atas dirinya sendiri. Baik dinarasikan dalam teks ataupun dituturkan lewat lisan, sejarah tetap bersifat maya, abstrak, dan mengandalkan penafsiran. Peninggalan sejarah sangat mungkin dimaknai atau diartikan berbeda pada saat masa lalu dan masa kini. Maka dari itu, pendekatan empiris dalam membahas sejarah pembangunan kota juga harus menampilkan struktur sosial, dan pendekatan teoretis juga harus menampilkan peristiwa sejarah.³

Meskipun berjudul “tiga dekade”, buku ini tidak disusun untuk menuangkan seluruh informasi sejarah Kota Tangerang yang sangat detail dari hari per hari dan tahun per tahunnya, atau mencatat semua peristiwa

³ Djoko Marihandono (2010), “Menjadi Sejarawan Profesional: Kajian tentang Sumber Sejarah dan Metodologinya”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 3 November 2010.

yang terjadi di tiap sudut wilayah kecamatan dan kelurahan se-kota Tangerang selama tiga puluh tahun. Hal tersebut secara logis tentu nyaris mustahil karena keterbatasan halaman buku, pendeknya waktu penelitian dan penulisan, serta terbatasnya pengetahuan dan pandangan penulis terhadap sisi kesejarahan seluruh aspek kehidupan di kota ini.

Secara ironis, buku ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan ruang pada pemikiran dan sejarah lokal, namun tidak semua peristiwa lokal dapat terekam dan tidak semua gagasan warga kota terdokumentasi. Diperlukan seleksi tema dan subjek yang dapat menjadi sumber informasi sejarah kota yang jangkauannya lebih luas. Fakta dan informasi yang sama dalam batas-batas tertentu dapat menghasilkan interpretasi sejarah yang berbeda, dan hal ini boleh saja diterima untuk pengembangan diskusi dan pengetahuan. Alih-alih merinci sejarah dan pembangunan Kota Tangerang dalam satu buku, penulis memilih untuk membuka kemungkinan narasi sejarah kota berbeda dan memberikan ruang interpretasi bagi pembaca untuk mengembangkan wacana dan diskusi yang lebih luas di masa depan.

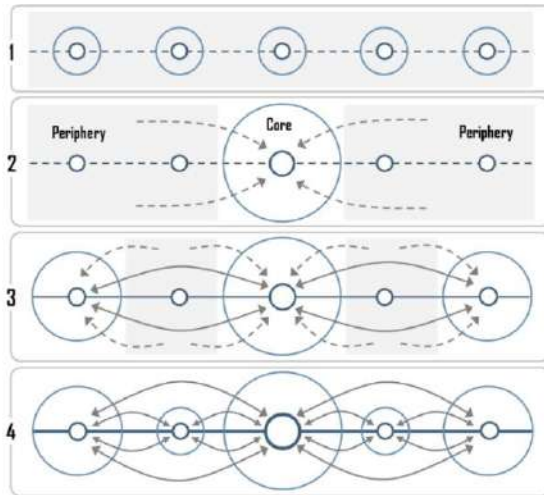
B. Dari *Ommelanden* sampai Jabodetabek

Peter J.M. Nas menjelaskan, wilayah penyangga atau *hinterland* di sekitar Jabotabek atau Jabodetabek disebut sebagai zona buffer (*buffer zone*) atau kota satelit (*satellite city*) yang mulanya mendukung ruang struktural pusat dalam pengertian geopolitik untuk mendukung kegiatan dan kepentingan ibukota Jakarta (Nas, 1986:101-115). Fungsi dan model pengaturan wilayah ini telah beroperasi dan sengaja diterapkan sejak era perusahaan dagang Belanda de *Vereenigde Oostindie Compagnie* (VOC), ketika benteng atau pelabuhan di seantero Batavia digunakan untuk pertahanan pangkalan militer dan penguasaan sumber-sumber daya dari kemungkinan serangan kekuasaan kaum bumiputera yang terjajah sejak abad ke-17, dan diteruskan dengan serangkaian kebijakan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Dengan kata lain, Tangerang sebagai wilayah pinggiran barat Jakarta sebenarnya sudah terkonsep dan dipraktikkan sejak lama.

Kumpeni VOC sejak abad 17-18 membuat istilah wilayah jajahan mereka di bekas keraton Jayakarta dan sekitarnya menjadi *Batavia Boven- en-Ommelanden*, yang artinya “Tanah di Atas dan Sekitar Batavia”, yang maksudnya merujuk ke daerah-daerah terluar kota tembok Batavia yang sekarang dikenal sebagai Kota Tua Jakarta. Kata ‘tanah di atas’ (*bovenlanden*) secara khusus mengarah ke seluruh wilayah di sisi selatan Batavia yang didominasi oleh area dataran tinggi, pedalaman dan pegunungan Priangan, mencakup Depok hingga Bogor dan sekitarnya (**Gambar 1.2**). Sedangkan kata ‘tanah di sekitar’ (*ommelanden*) digunakan merujuk ke daerah-daerah perbatasan terjauh kota Batavia. Bisa dibbilang, ini adalah salah satu konsep awal dari kesatuan geografis dan geopolitik Jabodetabek hari ini, yang mungkin juga awalnya sudah terbentuk sejak era kerajaan Taruma dan Pakuan-Pajajaran. Hal ini menunjukkan bahwa daerah pinggiran di tanah air tidak melulu dikotomi “pulau Jawa” dan “pulau luar”, karena nyatanya, ketimpangan pusat-pinggir pun dapat muncul bahkan dekat dengan pusat.

Kebijakan pembangunan masa kolonial hingga era Orde Baru abad 18-20 menunjukkan daerah Tangerang sengaja dibangun untuk membantu Jakarta, bukan semata untuk kepentingan lokalnya. Layanan penunjang di Tangerang didesain untuk mengatasi masalah dan beban-beban ibukota. Dalam perspektif Eurosentrisme, Tangerang di masa penjajahan dianggap ‘pinggirnya pinggir’ (*periphery of periphery*), di mana Batavia menjadi pusat di Hindia-Belanda sekaligus pinggir bagi Kerajaan Belanda dan bangsa Eropa. Di wilayah ini, masyarakat bumiputera dan Tionghoa mengalami eksploitasi lahan dan sumber daya (penggilingan tebu, eksploitasi lada dan komoditas lokal), serta pembangunan penjara-penjara untuk membuang tawanan perang dan kriminal. Kontrol atas wilayah tetap berada di tangan pejabat tinggi di Batavia demi kemajuan dan keuntungan mereka sendiri.⁴

⁴ M.A.A. Syahid (2021), “Membangun pinggir, menyangga ibukota: Arsitektur dan infrastruktur kolonial di Tangerang abad 18-20,” dalam *Masyarakat Indonesia Menulis Sejarah dalam Pantulan Sejarah Lokal dan Sosial*. Jakarta: Kemendikbudristek, hlm. 55-95.



Gambar 1.1. Ilustrasi model kota inti (*core*) dan kota pinggir (*periphery*) sesuai teori perkotaan dari John Friedmann. Sumber: Hofstra Edu (2017)



Gambar 1.2. Lahan partikelir daerah Tangerang dan Batavia (1926) yang menjadi acuan batas-batas teritori wilayah adminisratif setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Orde Baru juga mengulang distribusi peruntukan lahan pinggir ibukota sebagai pengembang sektor industri dan pemasok sumber daya bagi pusat. Sumber: Leiden University Colonial Maps

Jika dipandang secara kritis, nilai-nilai modernisme Barat yang ditularkan melalui kolonialisme bersifat progresif dan politis. Teknologi digunakan sebagai alat menanamkan nilai-nilai tertentu, yang membuatnya tidak selalu netral. Arsitektur dan tata perkotaan kolonial seringkali dipenuhi dengan nostalgia terhadap desain yang indah (*Mooi Indië*), yang cenderung menyembunyikan dampak buruk dari tindakan kolonialisme. Era ‘Zaman Normal’ dekade ketiga abad ke-20 di Hindia-Belanda terlihat tenang dan damai, namun sebenarnya tengah diwarnai oleh perjuangan kaum nasionalis muda yang ingin mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pola-pola serupa masih dapat terlihat dalam proyek infrastruktur nasional. Politik ruang kota-negara, pembangunan, dan stabilitas nasional menjadi beberapa kata kunci yang digunakan untuk merasionalkan arus globalisasi ke kota-kota kecil.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang gaung kebijakannya dimulai sejak akhir periode kekuasaan Orde Lama ke awal Orde Baru, masuknya sistem ekonomi neoliberal ke Indonesia memicu berlipatgandanya investasi dan industrialisasi yang terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.⁵ Daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi membentuk cincin keliling Jakarta yang biasa disingkat dengan akronim Jabotabek, atau *Jakarta Metropolitan Area* di kalangan asing. Jabotabek kemudian berkembang menjadi Jabodetabek-punjur sejak Kota Depok mekar dari Bogor tahun 1999, dengan turut memasukkan daerah Puncak dan Cianjur. Belakangan, akronim ini dipersingkat dan lebih dikenal umum dengan Jabodetabek.⁶

Pembangunan yang cenderung terpusat di Jakarta dan kota-kota besar serupa lainnya di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru perlahan-lahan berdampak pada pembentukan area baru di antara wilayah

⁵ Farabi Fakh (2020), *Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950-1965)*, Leiden: Brill.

⁶ Tri Wahyuning M. Irsyam (2017), *Berkembang dalam Bayang-bayang Jakarta: Sejarah Depok 1950-1990-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

perkotaan (*urban*) dan wilayah kedaerahan (*rural*) akibat perubahan fungsi lahan secara masif. Beragam istilah digunakan para ahli untuk menyebut dan menamakan area ini, misalnya ‘sabuk perkotaan’ (*urban-belt*) yang mengelilingi kota inti; kota penyangga atau *urban fringes*; hingga kawasan sub-urban, namun istilah peri-urbanisme (*periphery urbanism*) lebih populer dalam studi perkotaan untuk menyebut fenomena meluasnya dampak perkembangan pusat kota-kota besar. Abidin Kusno baru-baru ini juga merumuskan suatu model kota dengan istilah ‘kota tengah’ (*middling urbanism*), yang menggarisbawahi peran penting permukiman kampung kota dalam pembangunan ruang dan kawasan perkotaan kiwari.⁷

Wilayah dan kawasan peri-urban di Indonesia (seperti Kota Tangerang) terhubung dengan kota-kota besar yang menjadi pusatnya, misalnya Jakarta; Bandung; Palembang; Semarang; Medan; Yogyakarta; Makassar; dan Surabaya. Pembangunan kawasan dan kota peri-urban dicirikan dengan bertumbuhnya percampuran jenis aktivitas ekonomi di wilayah rural, yaitu antara pertanian dan industri. Hal ini yang kemudian menciptakan area abu-abu yang blur antara mana yang merupakan area *rural* dan mana yang merupakan area *urban*, menggambarkan bertumbuhnya secara intensif jaringan antarkota, pinggiran kota (*fringes*) dan kampung/desa. Gejala transisi perubahan terlihat dari aspek sosial-ekonomi, sosial-budaya, geografis, gaya hidup, dan psikologis masyarakat.

Pembangunan ibukota Jakarta sebagai kota mega dan metropolitan telah menjadikannya salah satu percontohan bagi kota-kota besar di wilayah *Global South* yang mayoritas tersusun atas negara-negara non-Barat untuk menjadi kota global. Pembangunan infrastruktur yang menunjang industrialisasi sejak pascakemerdekaan di kota-kota pusat dan pinggiran, seperti transportasi jalan raya beraspal dan jalan layang, serta perbaikan ruang bermukim dan lingkungan hidup, menandai adanya “pergerakan

⁷ Abidin Kusno (2020), “Middling urbanism: the megacity and the kampung,” *Urban Geography*, 41:7, hlm. 954-970. DOI: 10.1080/02723638.2019.1688535.

zaman” dan suatu revolusi di ibukota akibat mobilitas dan lalu lintas yang tinggi menjadikan masyarakat lokal sebagai pengamat (*spectator*) yang mengalami sensasi pergerakan dan pembangunan serba cepat tersebut.⁸

Seiring berjalannya waktu, hubungan dan pandangan mengenai posisi Kota Tangerang dalam konteks Jakarta dan Banten telah mengalami perubahan dinamis sepanjang sejarah. Setelah pemekaran wilayah administratif dan tren desentralisasi, Tangerang menjadi salah satu pusat baru yang mandiri terhadap ibukota, terutama dengan berkembangnya kehidupan kota di sekitar infrastruktur penting, misalnya Bandara Soekarno-Hatta, serta kawasan industri Batu Ceper dan sekitarnya.

C. Menulis Sejarah Kota

Sesuai dengan judul buku ini, setiap bab yang penulis susun memuat tiga elemen utama: sejarah, pembangunan, dan Kota Tangerang. Dari bahasan tersebut, penulis akan lebih berfokus pada hubungan antara kuasa (*power*), kota (*city*), dan identitas (*identity*), yaitu bagaimana hubungan kekuasaan berbagai pihak publik dan swasta terhadap pembangunan ruang-ruang kota, yang berkontribusi terhadap pembentukan karakter kota, unik, khas, dan mencerminkan lokalitas dan identitas kota peri-urban. Singkatnya, buku ini mengamati sejarah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang selama tiga puluh tahun terakhir.

Batas periode yang ditelaah hanya pada rentang waktu tiga dekade sejak berdirinya Kota Tangerang, hingga tahun buku ini ditulis (1993-2023). Kilas balik sejarah sejak masa kolonialisme Belanda terkadang disinggung sebagai pembanding dan penjelas konteks apabila berkaitan. Selain itu, objek dan subjek kota menarik akan diulas sebagai contoh kasus.

⁸ Rudolf Mrázek (2004), “Bypasses and flyovers: Approaching the metropolitan history of Indonesia,” *Journal of Social History*, 29:4, hlm. 425-443.

Dalam mengumpulkan data sejarah, langkah pertama adalah melakukan penjelajahan sumber secara heuristik guna memilah sumber dan data yang informatif serta absah. Data yang terkumpul lalu diatur dalam periodisasi dan pembabakan sejarah. Pendekatan ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap peristiwa sejarah secara bertahap, sekaligus mengenali pola sejarah atau ‘semangat zaman’ (*zeitgeist*) yang mungkin muncul dari serangkaian peristiwa yang berulang dalam jangka waktu tertentu. Periodisasi menjadi langkah awal dalam penyusunan urutan waktu, menjadikan penelitian ini tidak hanya menyajikan kronologi peristiwa secara kering, tetapi juga menyoroti makna penting di setiap periodenya.

Suatu ketika, sejarawan Amerika Serikat bernama Louis R. Gottschalk pernah mengeluarkan sebuah adagium dalam karyanya, *Understanding History* (1950), yaitu *no document, no history*, yang artinya “tidak ada sejarah jika tidak ada dokumennya”. Di sisi lainnya, kelompok pemikir sejarah dari madzhab *Annales* di Perancis pernah mengkritik pendekatan seperti itu, dengan berpendapat penulisan sejarah semacam itu seolah-olah hanya berkuat pada narasi sejarah orang-orang besar (*histoire de grands hommes*) yang bisa menulis, dan terdokumentasi rapi dalam arsip-arsip administrasi pemerintahan yang penting. Hal ini mengabaikan keberadaan orang-orang biasa yang tidak pernah dicatat dalam sumber sejarah, atau dengan kata lain “orang-orang tanpa sejarah” (*les peuples sans histoire*). Karena hal tersebut, maka penulis juga mempertimbangkan kisah-kisah yang lain dengan bobot sama pentingnya dengan informasi sejarah resmi.

Dalam menulis buku ini, penulis menggunakan metode penulisan naratif yang menceritakan proses analitis dan interpretatif terhadap temuan informasi sejarah untuk membongkar fenomena. Mungkin hal ini kontra-intuitif bagi orang awam, namun menulis sejarah atau historiografi memang tidak bisa terlepas dari adanya interpretasi. Kepenulisan sejarah dalam penelitian ini tidak terbentuk alami begitu saja, tetapi justru secara

sadar ia dituliskan, bukan hanya mendeskripsikan suatu peristiwa atau obyek yang masih ada tapi juga yang sudah tiada, dan lagipula mereka tidak bisa menulis sejarah mereka sendiri.

Studi mengenai sejarah Kota Tangerang masih sangat terbatas dan tersebar. Sebagian besar penelitian cenderung memfokuskan pada gerakan pejuang kemerdekaan dan Revolusi Sosial pasca tahun 1945-1949. Isu-isu yang berhubungan dengan etnis, terutama masyarakat Tionghoa Peranakan Cina Benteng, lebih sering menjadi perhatian peneliti. Hal ini meninggalkan jurang celah dalam memahami sejarah Kota Tangerang selama tiga dekade terakhir, sehingga buku ini mengisi ruang dalam historiografi perkotaan Tangerang pascareformasi. Perkembangan industri dan modernisasi di wilayah pinggiran ibukota, khususnya pada era Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) belum banyak dibahas. Dinamika hubungan antara pemerintah, teknokrat, swasta, dan masyarakat dalam membentuk identitas perkotaan melalui teknologi, warisan budaya, dan perencanaan kota juga belum mendapatkan sorotan memadai.

Penulisan sejarah dan pembangunan Kota Tangerang ini juga melibatkan penyelidikan yang mendalam terhadap persepsi dan memori kolektif masyarakat, unsur-unsur yang sering kali tidak terdokumentasikan dalam sumber resmi. Sebagai penduduk lokal Tangerang sejak kecil, penulis berusaha memberikan pandangan lokal yang mencerminkan pertumbuhan kota tempat bertumbuh, menambah dimensi pada narasi sejarah yang sebelumnya didominasi oleh sudut pandang eksternal yang melihat Tangerang sebagai daerah pinggiran Jakarta atau Banten.

D. Sinopsis dan Tema

Sebagai sebuah sinopsis yang mengantarkan kepada bab-bab berikutnya, maka akhir dari bagian ini akan merajut seluruh bab yang ada. Jika diperhatikan, bab ini diurutkan dengan sengaja untuk menunjukkan keterhubungan kisah satu sama lain, meskipun ditulis oleh dua orang

penulis yang berbeda secara berselingan. Terdapat kata kunci yang mengaitkan antara tulisan sebelum dan sesudah bab tersebut.

Bagian “**Pendahuluan**” adalah sebuah pembuka tirai sejarah yang memberikan gambaran singkat tentang latar belakang dan aspek historis dan teoretis Kota Tangerang sebagai kota peri-urban yang berkembang pesat secara otonom dan dinamis di perbatasan antara Jakarta dan Banten. Menyambung ke bab berikutnya, “**Selayang Pandang Terbentuknya Kota Tangerang**”, mendeskripsikan proses terbentuknya pemerintahan Kota Tangerang sebagai buah hasil pemekaran wilayah administratif Kabupaten Tangerang, yang berevolusi dari sistem Kota Administratif (Kotif) hingga Kotamadya dan sejak masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat hingga tergabung ke dalam Provinsi Banten. Lika-liku pembentukan birokrasi kota secara legal-formal, peran tokoh-tokoh penting dalam penyusunan struktur dan sistem pemerintahan mencakup aspek hukum, administratif, dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan di Kota Tangerang dibahas di sini.

Bab 3 yang berjudul “**Tangerang Lepas Landas: Bandara dan Lahirnya Kota Baru**” mengulas sejarah pembangunan bandar udara internasional Soekarno-Hatta (Soetta) di Tangerang yang memberi dampak besar terhadap perubahan sosial-ekonomi dan sosial-politik di kota. Infrastruktur transportasi bandara negara ini juga mempercepat pergeseran status kota pinggiran menjadi sebuah pusat baru yang memicu pemekaran wilayah. Sebagai gerbang utama aviasi internasional, Bandara Soetta lebih dicitrakan representasi tradisi dan budaya nasional, yang mengakibatkan Tangerang dianggap lokasi yang terpinggirkan secara sosial, budaya, dan ekonomi. Perkembangan ruang kota selama ratusan tahun, dari era Kesultanan Banten hingga era Orde Baru, menegaskan Tangerang merupakan perpanjangan kekuasaan ibukota, yang lambat laun bertumbuh mandiri dan mengaburkan Jakarta sebagai pusatnya. Keberadaan bandara di Tangerang menciptakan suatu pusat modernitas

baru yang global dan lokal secara bersamaan, mengubah dinamika territorialitas antara Jakarta dan Tangerang.

Berlanjut ke Bab 4, pembangunan yang berlangsung meluas tidak hanya dari negara tapi juga di tingkat kota. “**Walikota Tangerang dari Masa ke Masa**” berupaya merangkum arah kebijakan pembangunan dan program unggulan dari setiap pemimpin yang pernah menjabat sebagai Walikota Tangerang. Bab ini membahas kepemimpinan di Tangerang dari waktu ke waktu. Bagaimana para pemimpinnya memainkan peran dalam mengarahkan dan membentuk identitas kota? Ini adalah narasi tentang evolusi kepemimpinan dan dampaknya. Bab 5 yang berjudul “**Tangerang Kota Pascaindustri**” mengungkapkan peradaban modern masyarakat kota Tangerang yang hidup (*live*) dalam bingkai kota pascaindustri, yang merinci perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam pekerjaan, transportasi, hingga permukiman dan perumahan. Bagaimana industrialisasi memengaruhi kehidupan sehari-hari dan lanskap kota? menciptakan suatu kondisi dan memenuhi karakteristik kota pascaindustri sebagaimana Kota Tangerang hari ini yang akan dibahas lebih lanjut

Tulisan bertajuk “**Riak Sejarah Tragedi 1998 dalam Kenangan Kolektif**” dalam Bab 6 memperingati traruma sejarah dalam kenangan kolektif masyarakat kota seputar Tragedi 1998. Ini adalah sebuah penelusuran emosional yang menjadi ekse (*excess*) dalam sejarah ekonomi dan politik kota, dan menyoroti bagaimana peristiwa ini meninggalkan jejak dalam ingatan dan kisah kota. Beranjak ke Bab 7, “**Tatengger, Tengara, Tangerang**”, menggali keunikan dan keragaman kultur lokal dengan fokus pada pencarian identitas dalam penjelajahan berbagai tengara atau *landmark* yang dianggap mewakili elemen-elemen khas Kota Tangerang. Ini memberikan perspektif mendalam tentang adanya kebutuhan mencari lokalitas budaya kota setelah diterapkannya kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang juga dituturkan dalam Bab 8 yang berjudul “**Tangerang Akhlakul Karimah: Harmoni**

dalam Keberagaman” menerangkan hubungan antara visi kota modern dengan nilai-nilai keberagaman dan keagamaan. Bagaimana harmoni dan toleransi terwujud dalam struktur sosial dan budaya kota?

“Sejarah Pelestarian Warisan Budaya Kota” menyelidiki dinamika pelestarian warisan budaya di kota. Pembaca akan bagaimana kota modern memiliki kebutuhan untuk menjaga tradisi dan merayakan akar budayanya dalam menghadapi perubahan zaman yang serba cepat. Adapun dalam bab terakhir berjudul **"Melintasi Pintu Waktu: Eksplorasi Museum Unik Kota,"** mengajak pembaca melintasi pintu waktu melalui eksplorasi museum unik kota yang merangkum perjalanan kita melalui sejarah dan warisan kota Tangerang. Sebuah refleksi penutup dalam Epilog akan menyimpulkan keseluruhan dari isi buku.

Dengan disusunnya bab-bab ini, terlihat keterhubungan antara satu kisah dengan yang lainnya, menciptakan narasi yang komprehensif mengenai sejarah dan pembangunan Kota Tangerang.

BAB 2 SELAYANG PANDANG TERBENTUKNYA KOTA TANGERANG

M. Alfian Nugraha Fauzi

*Jadikan Tangerang kota industri dan pemukiman | Memiliki daya saing yang nyata,
penyangga Ibukota | Bersih, hijau, indah, aman sejahtera tetap terjaga | Bhakti
Karya Adhi Kerta Raharja —potongan lirik lagu Mars Kota Tangerang*

A. Terbentuknya Kota Administratif Tangerang

Perjalanan suatu wilayah dari masa ke masa hingga mengalami perkembangan yang cukup pesat tentunya tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya wilayah tersebut. Kota Tangerang sebagai sebuah wilayah telah mengalami perkembangan dari masa ke masa tepatnya dari masa Kota Administratif hingga Kota Tangerang seperti saat ini. Terbentuknya Kota Tangerang sebagai sebuah daerah otonom tentu tidak dapat dipisahkan dari wilayah induknya yang terdahulu yaitu Kabupaten Tangerang di mana perkembangan pesat yang dialami pada saat itu menjadi salah satu faktor dibentuknya Kota Administratif Tangerang. Perkembangan pesat tersebut terjadi karena sebelumnya Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Tangerang yang membuat daerah ini telah mengalami kemajuan dari masa sebelumnya hingga terbentuknya Kota Administratif Tangerang.⁹ Penetapan ini dilakukan tidak lama setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, atau setelah wilayah Republik Indonesia tidak lagi diduduki oleh Belanda melalui pemerintahan kolonial.

⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Penetapan Kota Tangerang sebagai Ibukota Kabupaten.

Dengan perkembangan wilayah yang cukup pesat yang terjadi pada masa itu sangat dipengaruhi pula oleh letak wilayah Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara. Dengan kondisi yang demikian maka secara tidak langsung Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak dari perkembangan wilayah pada masa itu. Hal ini didasarkan pula atas Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa wilayah Tangerang sebagai wilayah penyangga Ibukota Negara.¹⁰ Sebagai salah satu wilayah penyangga Ibukota Negara tentunya peningkatan status wilayah menjadi Kota Administratif menjadi satu hal yang harus dilakukan, mengingat dengan status tersebut akan lebih memudahkan bagi wilayah tersebut dalam menentukan segala urusan yang berkaitan dengan wilayahnya. Selain itu sebagai wilayah yang termasuk ke dalam pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) tentu berbagai macam hal dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya pertumbuhan penduduk yang pesat sebagai dampak peningkatan status tersebut sehingga dengan adanya pengembangan wilayah, daerah menjadi lebih siap untuk mempersiapkan segala sesuatu saat daerah baru tersebut terbentuk.

Dengan perkembangan dan kemajuan pesat di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, sebagian Wilayah Kecamatan Curug, dan sebagian Wilayah Kecamatan Ciledug pada khususnya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, sebagian Wilayah Kecamatan Curug, dan sebagian Wilayah Kecamatan Ciledug.¹¹

¹⁰ Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Tangerang (1995), *Sejarah terbentuknya Kotamadya Dati II Tangerang*, Tangerang, hlm. 28.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang.

Dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek seperti aspirasi dari masyarakat serta perkembangan yang pesat pada masa itu, maka wilayah Kabupaten Tangerang (dahulu Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang) mengalami pengembangan dengan dibentuknya Kota Administratif Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang pada tanggal 28 Februari 1981. Tujuan pembentukan Kota Administratif Tangerang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan perkembangan yang terjadi di wilayah Tangerang sehingga perlu untuk dilakukan pengembangan wilayah.

Kota administratif sendiri merupakan sebuah pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Wali Kota Administratif. Dalam sejarahnya Kota Administratif muncul pada dekade 1970 pada masa pemerintahan Presiden Suharto hingga berakhir pada tahun 1999. Pembentukan Kota Administratif umumnya berkaitan erat dengan perkembangan pesat yang berada di setiap wilayah sehingga perlu untuk dilakukan pengembangan terhadap wilayah tersebut. Wilayah pertama di Indonesia yang berstatus sebagai Kota Administratif adalah Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara yang dibentuk pada tahun 1975.¹² Selanjutnya dibentuk pula Kota Administratif lain di berbagai macam wilayah di Indonesia termasuk Kota Administratif Tangerang yang dibentuk pada tahun 1981.

Kota Administratif berbeda dengan Kotamadya atau Kota karena bukan merupakan sebuah daerah otonom dan tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) layaknya pemerintahan Kotamadya atau Kota. Wali Kota Administratif dalam menjalankan segala macam

¹² <https://www.bitungkota.go.id/sejarah>, diakses tanggal 26 November 2023, 06.43 WIB.

tugas pemerintahannya bertanggung jawab kepada Bupati yang berada di wilayah induknya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, di Indonesia tidak dikenal lagi istilah Kota Administratif karena pembagian provinsi hanya terdiri atas Kabupaten dan Kota hingga saat ini.

Ketika pertama kali berdiri sebagai Kota Administratif Tangerang, wilayah ini memiliki 5 wilayah kecamatan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang. Beberapa wilayah kecamatan tersebut di antaranya yaitu:

1. Kecamatan Tangerang
2. Kecamatan Cipondoh
3. Kecamatan Batuceper
4. Kecamatan Jatiuwung
5. Kecamatan Ciledug

Setiap wilayah kecamatan yang berada di bawah Kota Administratif Tangerang tersebut memiliki beberapa kelurahan dan desa. Adapun rincian setiap wilayahnya adalah Kecamatan Tangerang terdiri atas 12 Kelurahan, Kecamatan Cipondoh terdiri atas 8 Kelurahan, Kecamatan Batuceper terdiri atas 11 Desa, Kecamatan Jatiuwung terdiri atas 7 Desa dan Kecamatan Ciledug terdiri atas 8 Desa. Pada saat pembentukan wilayah Kota Administratif, wilayah Kecamatan Jatiuwung sebelumnya merupakan bagian Kecamatan Curug yang kemudian mengalami pemekaran dan masuk ke dalam bagian dari Kabupaten Tangerang, sedangkan sebagian wilayah Kecamatan Ciledug setelah pemekaran membentuk wilayah tersendiri menjadi Kecamatan Pondok Aren, yang saat ini menjadi bagian dari wilayah Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Tangerang yang mengalami pemekaran pada tahun 2008.



Gambar 2.1. Kantor Wali Kota Administratif Tangerang di Jalan Daan Mogot. Sumber: Facebook Sejarah Kota Tangerang



Gambar 2.2. Gapura Perbatasan Kota Administratif Tangerang yang berada di Kebon Nanas pada awal tahun 1990-an. Sumber: Facebook Sejarah Kota Tangerang

Pelaksanaan pemerintahan di Kota Administratif Tangerang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Barat Nomor: 650/SK-39-Pemda/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Kota Administratif Tangerang. Keputusan yang telah disusun sebelumnya tersebut kemudian dijabarkan melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No. 188.45/SK.40-HUK/1984 tertanggal 17 Maret 1984 tentang pelimpahan pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang kepada Wali Kota Administratif.¹³

Perkembangan yang terjadi di Kota Administratif Tangerang tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dalam wilayah Kota Administratif Tangerang yang memberi pengaruh penting bagi masyarakat dan Pemerintah Kota, mengingat peranan Bandar Udara Soekarno-Hatta tersebut cukup vital baik Nasional maupun Internasional. Hadirnya Bandar Udara Soekarno-Hatta merupakan bandara baru pengganti Bandar Udara Kemayoran yang berada di pusat Kota Jakarta.

Dalam perkembangannya, Kota Administratif Tangerang tumbuh menjadi Kota Industri, yang merupakan ciri kehidupan ekonomi masyarakat Kota Administratif Tangerang yang utama. Hal ini kemudian memunculkan berbagai macam kawasan industri yang berada di berbagai macam wilayah di Kota Tangerang. Di samping sektor industri, pemerintah daerah telah berhasil menggali dan mengolah potensi wilayah lainnya di bidang perdagangan, jasa, transportasi, dan peternakan.¹⁴ Pengaruh hadirnya Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan berbagai macam Industri di Kota Administratif Tangerang menjadi salah satu faktor berkembangnya wilayah ini pada masa itu hingga saat ini.

¹³ Mufti Ali dkk. (2018), *Sejarah Kota Tangerang: Dari Zaman Nirleka sampai Orde Baru*, Tangerang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, hlm. 216.

¹⁴ <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7063/UU0021993.html>, diakses pada tanggal 27 November 2023, 07.31 WIB.

B. Wali Kota Administratif Tangerang

Selama periode tahun 1982 hingga tahun 1993 tercatat ada tiga pejabat yang pernah memerintah sebagai Wali Kota Administratif Tangerang. Umumnya para pejabat yang pernah memerintah tersebut merupakan birokrat yang telah memiliki pengalaman bekerja di bidang pemerintahan. Berikut ini adalah Walikota Administratif Tangerang yang pernah bertugas memimpin Kota Administratif Tangerang.

1. Karso Permana



Gambar. 2.3. Karso Permana. Sumber: Pemerintah Kota Tangerang

Karso Permana merupakan Wali Kota Administratif Tangerang yang pertama dan menjabat pada periode tahun 1982-1986. Sebelum bertugas sebagai Wali Kota Administratif Tangerang, Karso Permana pernah bertugas di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, jabatan yang pernah dipegang sebagai Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Tegallega melalui Surat Keputusan Wali Kotamadya Bandung Nomor 4183/73 tentang Pembentukan Panitia Bandung Lautan Api.

2. Yitno



Gambar 2.4. Yitno. Sumber: Pemerintah Kota Tangerang

Yitno merupakan Wali Kota Administratif Tangerang yang menjabat pada periode tahun 1986 hingga tahun 1990. Sebelum bertugas sebagai Wali Kota Administratif Tangerang, Yitno merupakan seorang birokrat yang pernah bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, salah satunya pernah bertugas sebagai Camat Ciputat. Dalam perkembangan berikutnya setelah tidak lagi bertugas sebagai Wali Kota Administratif Tangerang dan digantikan dengan Djakaria Machmud sebagai Wali Kota Administratif yang baru, Yitno kemudian menjabat sebagai Bupati Pandeglang pada periode tahun 1995 hingga tahun 2000.

3. Djakaria Machmud

Djakaria Machmud merupakan Wali Kota Administratif Tangerang terakhir yang menjabat pada periode tahun 1990 hingga tahun 1993. Sebelum bertugas sebagai Wali Kota Administratif, Djakaria Machmud merupakan seorang birokrat yang bertugas sebagai salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Setelah tidak lagi bertugas sebagai Wali Kota Administratif Tangerang, Djakaria Machmud selanjutnya bertugas sebagai Wali Kotamadya Kepala

Daerah Tingkat II Tangerang yang pertama pada tahun 1993. Pada saat terbentuknya Kotamadya Tangerang, Djakaria Machmud pertama kali dilantik sebagai Pejabat Wali Kotamadya Tangerang.



Gambar 2.5. Djakaria Machmud. Sumber: Pemerintah Kota Tangerang

C. Terbentuknya Kotamadya Tangerang

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi peningkatan terhadap wilayah Kota Administratif Tangerang menjadi Kotamadya. Usulan terkait dengan peningkatan tersebut telah dilakukan jauh sebelum ditetapkan Kota Administratif Tangerang sebagai Kotamadya. Usulan terhadap peningkatan status tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang peningkatan status Kota Administratif Tangerang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang pada tanggal 20 Juli 1987.¹⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, peningkatan status tersebut dilakukan pada tanggal 28 Februari 1993 di mana Kota Administratif Tangerang secara resmi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

¹⁵ Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 135.04/154-Bapeda

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.¹⁶ Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ini menjadi daerah otonom yang ke-25 di Jawa Barat dan Ke-312 di Indonesia. Undang-Undang tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Suharto dan disetujui langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, pengangkatan Kepala Daerah belum dapat dilakukan melalui pemilihan sesuai tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu untuk pertama kali, Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat sampai dengan dilantiknya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, maka Kota Administratif Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981 dihapus. Dengan demikian, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang wilayahnya berkurang seluas wilayah Kotamadya Tingkat II Tangerang.¹⁷ Pada pertama kali berdiri, Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang memiliki 6 wilayah kecamatan antara lain:

1. Kecamatan Tangerang
2. Kecamatan Batuaceper
3. Kecamatan Ciledug
4. Kecamatan Cipondoh
5. Kecamatan Jatiuwung
6. Kecamatan Benda.

¹⁶ Harry Mulya Zein, dkk. (1998), *Kota Tangerang, Benteng yang Berhias*, Tangerang: Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Tangerang, hlm. 91.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.



Gambar 2.6. Pelantikan Djakaria Machmud sebagai Pejabat Wali Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Sumber: Khastara Perpunas

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, maka untuk daya dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelayanan masyarakat digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dan telah dipakai oleh Kota Administratif Tangerang sebagai bagian dari kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.¹⁸

Begitu juga dengan Badan-badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang tempat kedudukan dan

¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

kegiatannya berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, untuk daya guna dan hasil guna penyelenggaraannya, jika dianggap perlu diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.¹⁹ Salah satu pertimbangannya karena sebagai wilayah yang baru saja berdiri Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang perlu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi wilayah baru saja berdiri.

Dalam perkembangan selanjutnya penamaan Kotamadya Daerah Tingkat II berubah menjadi Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia sehingga sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang berubah menjadi Kota Tangerang hingga saat ini. Kota Tangerang saat ini memiliki 13 wilayah kecamatan di antaranya yaitu:

1. Kecamatan Tangerang
2. Kecamatan Batucapeper
3. Kecamatan Ciledug
4. Kecamatan Cipondoh
5. Kecamatan Jatiuwung
6. Kecamatan Benda
7. Kecamatan Pinang
8. Kecamatan Neglasari
9. Kecamatan Periuk
10. Kecamatan Larangan
11. Kecamatan Karang Tengah
12. Kecamatan Karawaci
13. Kecamatan Cibodas

¹⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

Pejabat yang pernah bertugas sebagai Wali Kotamadya dan Wali Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Djakaria Machmud, Periode 1993—1998
2. Mochammad Thamrin, Periode 1998—2003
3. Wahidin Halim, Periode 2003—2013
4. Arief Rachadiono Wismansyah, Periode 2013—2023

D. Lambang Kota Tangerang

Sebagai sebuah wilayah baru, tentunya Kota Tangerang memiliki ciri khas berupa lambang atau logo daerah. Lambang atau logo Kota Tangerang memiliki makna pada setiap bagiannya. Lambang Kota Tangerang memiliki keunikan tersendiri, salah satu keunikannya adalah terdapat landasan pacu pesawat di dalamnya. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan karena di wilayah Kota Tangerang terdapat Bandar Udara Soekarno-Hatta yang juga merupakan Bandar Udara Internasional. Berikut ini merupakan lambang atau logo daerah Kota Tangerang dan juga berbagai macam makna yang terkandung di dalamnya.



Gambar 2.7. Lambang Kota Tangerang.

Berikut ini adalah penjabaran makna setiap elemen dalam lambang di atas.

- a. Lambang daerah berbentuk perisai dengan warna hijau.
- b. Terdapat motto “Bhakti Karya Adhi Kerta Raharja” yang memiliki arti semangat pengabdian dalam bentuk karya pembangunan untuk kebesaran negeri dan kemakmuran serta kesejahteraan wilayah.
- c. Di dalam lambang tersebut terdapat lukisan atau gambar yang memiliki arti, di antaranya yaitu:
 1. Roda mesin, melambangkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang adalah merupakan roda industri.
 2. Bintang, melambangkan keagamaan melambangkan pula masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang agamis.
 3. Landasan Pacu (Runway), melambangkan adanya Bandara Internasional Soekarno Hatta yang sekaligus melambangkan semangat pacu untuk mencapai cita-cita pembangunan yang luhur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara.
 4. Riak Air, melambangkan adanya Sungai Cisadane yang memberikan manfaat dan kesuburan bagi masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
 5. Gerigi Roda Besi, Padi dan Kapas, melambangkan tanggal, bulan dan tahun Proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dengan penjelasan sebagai berikut.
 6. Tujuh belas gerigi roda besi melambangkan tanggal 17. Delapan bunga kapas melambangkan bulan delapan, 45 butir padi melambangkan tahun empat lima, dua lingkaran di dalam roda besi melambangkan tahun lahirnya Kotamadya Daerah tingkat II Tangerang pada bulan Februari.
 7. Jumlah Gelombang, melambangkan tanggal, bulan dan tahun Hari Jadi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yaitu pada tanggal 28 Februari 1993.

8. 28 gelombang Riak Air, melambangkan tanggal 28 yaitu tanggal lahirnya Kota Tangerang.
 9. Tanda Batas Landasan dan Lampu Landasan, melambangkan sembilan tanda batas di dalam runway segi tiga lampu landasan melambangkan tahun 93.
 10. Dua Buah Lingkaran dalam Roda Mesin, dua buah lingkaran dalam roda mesin melambangkan bulan dua.
- d. Sedangkan arti warna dalam lambang daerah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
1. Warna Hijau mempunyai arti kemakmuran dan kesuburan
 2. Warna Kuning mempunyai arti keadilan, kekuasaan, kewibawaan, dan keagungan.
 3. Warna Hitam mempunyai arti keteguhan dan ketabahan
 4. Warna Putih mempunyai arti kesucian dan kebersihan
 5. Warna Merah mempunyai arti keberanian²⁰

E. Windu Karya

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang pada saat pertama kali berdiri memiliki program kerja yang diberi nama “Windu Karya” yang dapat diartikan sebagai ‘delapan hasil kerja’. Di dalam menjabarkan Program Kerjanya tersebut salah satu tujuan diciptakannya Windu Karya oleh pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang adalah untuk meningkatkan koordinasi yang lebih mantap di segala bidang. Adapun beberapa hal penting dari Windu Karya adalah sebagai berikut:

²⁰<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/34197/warga-tangerang-tahu-ini-nggak-arti-dan-makna-lambang-kota-tangerang>, diakses tanggal 15 November 2023.

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya-upaya mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih meningkat.
2. Menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
3. Meningkatkan dan menata kondisi lingkungan yang lebih baik melalui program terpadu seperti perbaikan rumah kumuh, system drainase dan pengendalian banjir.
4. Membudayakan gerakan Ketertiban Kebersihan dan keindahan (K-3).
5. Penataan dan penyempurnaan sistem administrasi kependudukan.
6. Mendayagunakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
7. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat melalui Alim Ulama, Generasi Muda dan ibu-ibu segala bidang.
8. Pemasyarakatan aspek kesadaran hukum.

Sebagai salah satu bagian penting dari sejarah perjalanan Kota Tangerang, saat ini nama Windu Karya dijadikan sebagai nama sebuah gedung yang berada tidak jauh dari alun-alun Kota Tangerang dan dijadikan pula sebagai nama sebuah jalan di Kota Tangerang.

F. Slogan BERHIAS

Pada umumnya setiap wilayah memiliki slogan yang menjadi ciri khas daerah tersebut baik provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap slogan dari masing-masing wilayah tersebut umumnya mengandung banyak arti yang sifatnya membangun bagi daerah tersebut. Hal ini berlaku juga bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang juga memiliki slogan yang sifatnya membangun. Pada saat pertama kali berdiri sebagai sebuah daerah otonom, Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang juga memiliki slogan yang diberi nama BERHIAS. Slogan ini diperkenalkan pada masa pemerintahan Djakaria Machmud sebagai Wali Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang pertama.

Slogan Kota Tangerang yaitu BERHIAS merupakan sebuah akronim dari Bersih, Hijau, Indah, Aman dan Sejahtera di mana dengan slogan ini diharapkan dapat menjadikan Kota Tangerang sebagai wilayah yang Bersih, Hijau, Indah, Aman dan Sejahtera sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari slogan tersebut. Dalam rangka mendukung upaya tersebut maka pada masa pemerintahan Djakarta Machmud, salah satu yang dilakukan adalah dengan membangun berbagai macam Taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan dibangunnya berbagai macam Taman Serta Ruang terbuka Hijau tersebut diharapkan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang lebih bersih, hijau dan indah serta nyaman bagi masyarakat.

Dengan segala upaya yang dilakukan tersebut, maka pada akhirnya menjadikan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang berhasil meraih Piala Adipura pada tahun 1996 dan 1997. Salah satu tolak ukur pencapaian tersebut adalah berhasilnya Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Tangerang dalam menjaga lingkungannya sehingga tampak bersih, hijau dan indah. Keberhasilan terhadap pencapaian ini tentunya sesuai dengan slogan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yaitu BERHIAS dalam mewujudkan kota yang Bersih, Hijau, Indah, Aman dan Sejahtera.

G. Dua Ibukota dalam Satu Wilayah

Setelah terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang pada tahun 1993, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang menjadi berkurang luas wilayahnya. Selanjutnya meskipun telah terbentuk daerah otonom yang baru namun pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang masih tetap berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Hal ini dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang penetapan Kota Tangerang sebagai Ibukota Kabupaten Tangerang, di mana dengan kemajuan Kota Tangerang sebagai Ibukota dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang menjadi salah satu faktor terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Pasca

terbentuknya daerah otonom yang baru, proses pemindahan terhadap Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dilakukan secara bertahap karena menunggu kesiapan dan rampungnya Ibukota yang baru dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.²¹

Pada dekade tahun 1990-an bermunculan daerah otonom baru di berbagai macam daerah di Indonesia, di mana terdapat pula daerah induk yang mengalami hal serupa dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Salah satu daerah induk yang mengalami hal yang serupa di antaranya adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang harus memindahkan pusat pemerintahannya dari Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke daerah Cibinong. Dua Ibukota dalam satu wilayah yang dialami oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang ini berlangsung hingga awal tahun 2000-an, saat Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang telah dipersiapkan di Kecamatan Tigaraksa telah rampung dan siap untuk dipergunakan sebagai Ibukota baru Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.

Pada masa itu, sebagai wilayah yang baru saja terbentuk maka salah satu hal utama yang dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang adalah membangun Kantor Wali Kotamadya. Kantor Bupati Kepada Daerah Tingkat II Tangerang sebelumnya telah berdiri di Jalan Daan Mogot yang lokasinya berhadapan langsung dengan Kantor Kepolisian Resort Metro Tangerang. Pada masa pemerintahan Kota Administratif Tangerang di era sebelumnya, terdapat pula Kantor Wali Kota Administratif yang terletak di Jalan Daan Mogot tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Maka selanjutnya dibangunlah Kantor Wali Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang berlokasi pula di Jalan Daan Mogot pada masa pemerintahan Wali

²¹ Ibukota Kabupaten Tangerang selanjutnya dipindahkan pada awal tahun 2000 di Kecamatan Tigaraksa yang berada di sebelah selatan Kabupaten Tangerang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor.

Kotamadya Djakaria Machmud. Bangunan tersebut dipergunakan sebagai Kantor Wali Kotamadya sebelum akhirnya dipindahakan ke Kompleks Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, saat ini bangunan tersebut dipergunakan sebagai Kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang.



Gambar 2.8. Monumen Pesawat yang pernah menghiasi salah satu sudut Kota Tangerang; tampak bangunan Balai Kota Tangerang di belakang monumen. Sumber: Facebook Sejarah Kota Tangerang)



Gambar 2.9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang yang dahulu pernah berfungsi sebagai Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Sumber: Google Maps

Dengan rampungnya pembangunan terhadap Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, maka secara bertahap seluruh perangkat yang ada mulai melaksanakan perpindahan ke Ibukota yang baru. Pasca pindahnya pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang ke Tigaraksa, maka ada beberapa “peninggalan” bangunan yang ditinggalkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang di antaranya adalah bangunan pemerintahan yang sebagian hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh satuan perangkat di pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Beberapa bangunan yang dimanfaatkan dan tidak berubah bentuk di antaranya yaitu Kantor Satpol Pamong Praja Kota Tangerang yang menggunakan bangunan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang yang menggunakan bangunan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang.

BAB 3

TANGERANG LEPAS LANDAS (1977-1992)

BANDARA DAN LAHIRNYA PUSAT BARU KOTA

Mushab Abdu Asy Syahid

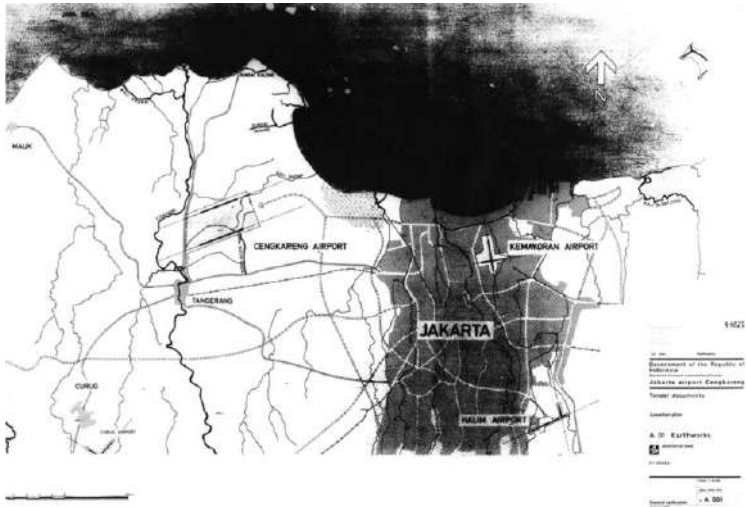
A. Salah Sebut Gerbang Negara

*“Selamat Datang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
di Cengkareng, Jakarta!”*

Setidaknya sampai satu dekade lalu, setiap penumpang maskapai penerbangan yang akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pasti akan mendengar sambutan ‘selamat datang di Cengkareng’ di atas. Pada umumnya, orang-orang meyakini fasilitas penerbangan internasional terbesar di Indonesia ini seharusnya memang berlokasi di Cengkareng atau wilayah antah-berantah yang masih menjadi bagian dari Jakarta sebagai ibukota negara. Akan tetapi, pada bulan Desember 2015, Budi Karya Sumadi yang kala itu masih menjabat sebagai Direktur Utama PT. Angkasa Pura II, pernah mengeluarkan surat edaran yang menyarankan seluruh maskapai yang beroperasi di bandara Soetta untuk mengganti penyebutan lokasi dalam pengumuman awak kabin pesawat dari yang awalnya “Cengkareng, DKI Jakarta” menjadi “Tangerang, Banten”.

Langkah ini pun mendapatkan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak wacana perubahan nama lokasi diusulkan. Himbauan Angkasa Pura II tersebut merupakan respon terhadap protes Walikota Tangerang, Arief Wismansyah, dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang menegaskan lokasi geografis bandara sejak awal berada di wilayah administrasi mereka. Secara geografis, wilayah

Cengkareng sebenarnya berjarak cukup jauh dari bandara, sekitar ± 4 kilometer bahkan dari luas area bandara yang sangat luas. Dari contoh kasus sederhana salah nama lokasi bandara ini, kita dapat berusaha memahami bagaimana persepsi masyarakat Tangerang dan Jakarta terhadap lokasi bandara Soetta.



Gambar 3.1. Peta lokasi proyek bandara “Cengkareng Airport”.
Sumber: Aga Khan Award for Architecture, Paul Andreu.

Kasus penggunaan lahan bandara di pinggiran kota seperti Soetta sebenarnya umum ditemukan pada bandara-bandara lainnya di daerah maupun luar negeri. Bandara Charles de Gaulle di Perancis yang juga dirancang oleh Paul Andreu, sang arsitek yang juga merancang bandara Soetta, lokasinya berada di pinggiran ibukota Roissy, namun sering keliru diidentifikasi berada di ibukota Paris. Kebijakan yang menegaskan nama lokasi bandara dari Cengkareng menjadi Tangerang oleh PT. Angkasa Pura II, meskipun kode aviasinya tetap merujuk ke Cengkareng (CGK bukan TNG), memberikan suatu kejelasan yang lebih terang terkait posisi

Tangerang sebagai gerbang utama negara via jalur udara, yang menjadi pusat pertemuan dan interaksi pengguna jasa penerbangan di Indonesia.

Bandara Soetta merupakan sebuah proyek mega skala nasional era pemerintahan Orde Baru yang menggantikan peran sentral dua bandara utama negara sebelumnya, yaitu Halim Perdanakusumah di Cililitan dan Kemayoran, yang kapasitasnya sudah tidak lagi memadai untuk mengakomodasi perkembangan penerbangan internasional dan swasta. Pesatnya pertumbuhan penduduk, terkonsentrasinya pusat pemerintahan dan ekonomi-bisnis di Jakarta membuat lahan ibukota tidak mampu lagi mengatasi permintaan (*demand*) layanan penerbangan publik yang semakin hari terus meningkat. Data tahun 2017, tiga tahun sebelum pandemi Covid-19 melanda, menunjukkan aktivitas bandara Soetta telah melayani rata-rata sekitar 68 juta pengguna setiap tahunnya.²²

Kemungkinan kekeliruan dalam penyebutan lokasi bandara ini mungkin disebabkan oleh kecenderungan orang untuk menandai dan merujuk suatu hal yang asing dan jauh kepada sesuatu yang lebih dekat dengan pusat. Jika dilihat dari arsip dan dokumen *masterplan* bandara, kesalahan nama lokasi telah terjadi sejak proyek dimulai, ketika masterplan dinamai sebagai *Cengkareng Airport* atau *Jakarta International Airport Cengkareng*. Presiden Soeharto sendiri membenarkan salah nama lokasi ini dalam pidatonya saat meresmikan Terminal I Soetta pada tahun 1985. Dalam pidatonya, Soeharto mempersembahkan dengan bangga bandara ini sebagai karya prioritas pembangunan nasional, dan bahwa pada hari itu,

*“....adalah hari yang memiliki makna khusus bagi perkembangan dunia penerbangan di Tanah Air akan diresmikan bandara internasional baru yang terletak di **ibukota negara kita**. Bandara ini bukan hanya baru, tetapi juga merupakan bandara terbesar dan termodern yang dimiliki hingga saat ini.”*²⁶

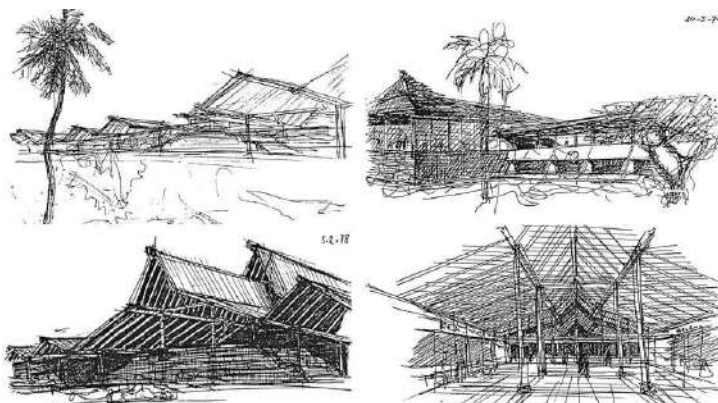
²² Basauli Umar Lubis, Rabu, 15 Maret 2017, “Mendesain Airport di Indonesia”. Seminar IAI & Imelda Akmal Writing Studio, Jakarta Design Center (JDC), Jakarta.

Mengingat pada masanya, perkembangan teknologi dirgantara di tingkat nasional waktu itu memang patut dirayakan lebih besar daripada sekadar di tingkat lokal. Lokasi terminal bandara Soetta yang dibangun di tengah area pertanian sawah dan pemukiman kampung Kecamatan Benda, menjadi area baru yang kelak secara perlahan menandai perubahan besar pada tata guna lahan wilayah pinggiran Jakarta ini. Bandara dan penerbangan semakin menjadi arah pembangunan di Tangerang raya, dengan pengembangan Bandara Pondok Cabe di Pamulang (1981-1986) dan Bandara Budiarto di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug sejak era Orde Lama. Pengaspalan *runway* yang ada, sebagaimana juga pengaspalan jalan tol Jakarta-Tangerang tahun 1984, seolah bersiap menyambut lepas landas kehidupan masyarakat Tangerang yang teknokratik, industrial dan makin terhubung dengan pusat simpul ibukota.

Meskipun berlokasi di Tangerang, Soetta lebih menonjolkan corak budaya identitas budaya nasional dalam filosofi desain dan arsitekturnya. Desain bangunannya dipandang mencerminkan kebudayaan Indonesia dengan menggunakan konsep arsitektur Nusantara yang dilengkapi sistem konstruksi cakar ayam karya Prof. Sedijatmo tahun 1962. Presiden Soeharto menilai arsitektur bandara Soetta ‘bernafaskan Indonesia’, ‘menciptakan lambang kemoderenan yang mempertahankan identitas kebangsaan’. Ungkapan-ungkapan serupa, ‘kebanggaan nasional’, menampilkan ‘kepribadian Indonesia’ dan ‘suasana Indonesia’ diulang-ulang juga saat meresmikan Terminal II bandara ini.

Di sisi lain, yang dimaksud dengan istilah ‘kepribadian Indonesia’ menurut Presiden Soeharto sebenarnya merujuk kepada oleh satu-dua material budaya spesifik di Indonesia, tepatnya Jawa Tengah dan Bali, sebagaimana penjelasan komite Aga Khan Award for Architecture saat menilai bandara Soetta dalam suatu nominasi tahun 1996. Menurut arsitek utama Paul Andreu, desain Soetta ingin mencerminkan suasana alam pedesaan dan kampung-kampung yang eksotis di Jawa Tengah, yaitu

'kumpulan rumah kecil beratap genteng merah, menggabungkan alam dan teknologi, dan menggabungkan dua bentuk: tukang kebun dan arsitek.'²³ Seorang intelektual Jepang bernama Saya Shiraishi (1990) pernah menulis pengalamannya saat berkunjung ke terminal Soetta pada tahun 1987. Ia mengungkapkan material bangunan yang digunakan seperti keramik berwarna batu bata merah sebagai pola lantai bandara mengekspresikan 'warna tanah yang eksotis' bagi orang asing. Ia mengungkapkan, "*Atap genteng dibakar dari tanah merah menyala matahari terbenam dari daerah yang pernah disebut Tanah Merah... Warna ini adalah warna Jakarta, atau, lebih tepatnya, warna kota elegan lama Batavia; warna pesona eksotis dan nostalgia...*"



Gambar 3.2. Sketsa rancangan bandara Soetta. Sumber: Paul Andreu

Dua pandangan luar ini, baik dari Shiraishi maupun Andreu, melihat Indonesia sebagai tanah yang eksotis untuk mereka yang berkesempatan mengalami yang “lain” dan “asing” dimulai dari bandara sebagai gerbang negara. Ini menunjukkan pandangan orang non-Indonesia terhadap kebudayaan Indonesia sebagai sesuatu yang berbeda. Di saat yang sama, bandara Soetta telah menjadi lokasi interaksi berbagai pihak asing, pemerintah pusat dan daerah, hingga warga lokal dalam tahap

²³ Paul Andreu, website *Aéroport de Paris* (ADP): <https://www.parisacroport.fr/>.

perancangan, pembangunan, maupun penggunaannya. Proyek era Orde Baru sejak tahun 1977 ini melibatkan arsitek dan konsultan internasional seperti Ralph. M. Parsons dari Amerika Serikat, APS/ACRES/SWR dari Kanada, hingga Aéroport de Paris (ADP) yang dipimpin Paul Andreu.

Jika dilihat dari dampak hadirnya bandara Soetta terhadap mobilitas perkotaan antara Jakarta dan Tangerang, perlahan-lahan Jakarta yang selama ini dianggap sebagai pusat superior lambat laun tengah mengalami suatu “kelonggaran di pusat”. Desain arsitektur Terminal 1 & 2 bandara Soetta mungkin juga dianggap “asing” dan tidak sepenuhnya dapat dianggap merepresentasikan budaya lokal penduduk Tangerang, yang mayoritasnya terdiri dari kelompok etnis Betawi dan Sunda, belum lagi jika hendak memperhitungkan keunikan budaya Tionghoa Peranakan khas Cina Benteng di kota ini. Dengan kondisi ini, mungkin penting juga melihat bagaimana masyarakat lokal Tangerang memandang keterwakilan identitas sosial-budaya dan sosial-ekonomi mereka di bandara, selain dari perspektif birokratis dan teknokratis sebagai pihak luar. Pandangan ini juga akan membuka jalan memahami konteks pembangunan bandara Soetta dan bagaimana kaitannya dengan Kota Tangerang itu sendiri.

Dimulai dari kasus tapak bandara, fokus utama yang digarisbawahi di sini adalah masalah Kota Tangerang sebagai ruang pinggiran kota yang semakin berkembang pesat. Masalah salah sebut lokasi bandara yang mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya memiliki isu yang lebih kompleks. Sebagian besar orang mungkin memaklumi salah sebut lokasi ini dan tidak terlalu ambil pusing apakah bandara berada di Cengkareng/Jakarta atau Tangerang, karena secara tidak langsung, masyarakat menganggap bandara terbesar di Indonesia sudah seharusnya terletak di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak hanya terbatas pada pemahaman keliru tentang lokasi, melainkan juga isu laten yang bermula dari dominasi kota besar seperti Jakarta sebagai pusat

ekonomi terbesar negara dianggap sebagai tempat di mana semua pembangunan besar dan teknologi maju/modern harus berada.

Membahas sejarah infrastruktur bandara Soetta sangat penting dalam sejarah terbentuknya Kota Tangerang, karena pembangunan bandara menjadi katalis terbentuknya Pemerintah Daerah di Tangerang. Pada tahun 1982, Kota Administratif Tangerang terbentuk secara paralel saat pembangunan Terminal I Soetta dilaksanakan di Kecamatan Benda. Ditambah lagi, terbentuknya Kotamadya Tangerang pada tahun 1993 hanyalah berselang 1 (satu) tahun setelah peresmian Terminal II Soetta.

B. Tangerang di antara pusaran Global-Lokal

Perubahan paradigma dalam industri aviasi mulai hadir di dunia pada era pascaperang sejak dekade tahun 1970-an, dari yang awalnya hanya terbatas pada kebutuhan militer menjadi jasa penerbangan sipil komersial, seiring dengan tren lalu lintas penerbangan komersial, fenomena *oil boom*, dan masifnya investasi asing. Sejak saat itu, liberalisasi maskapai udara muncul di banyak wilayah (Smith, 1990). Undang-Undang Deregulasi Maskapai tahun 1978 mendorong lebih banyak orang datang ke bandara yang disulap menjadi pusat perbelanjaan, restoran, galeri seni, dan pusat hiburan. Bandara menciptakan suatu kehidupan layaknya sebuah kota *aerotropolis* atau *aeropolis*, yaitu sebuah kota bandara yang terletak di dalam kota (Zukowsky, 1996). Fenomena ini juga terjadi di tanah air khususnya di Tangerang raya, yang terdampak kebijakan aviasi nasional di Jakarta.

Pencarian lokasi proyek bandara Soetta melibatkan konsultan asing dari Amerika Serikat, Kanada dan Perancis. Studi awal mengenai lalu lintas udara (*air traffic*) and survei cuaca (*forecast survey*) dilaksanakan oleh konsultan Amerika Serikat Ralph. M. Parsons (1969), dan studi awal masterplan dikerjakan APS/ACRES/SWR dari Kanada (1974). Studi masterplan dari konsultan Kanada mengestimasi biaya senilai 462 juta dollar AS, sedangkan Pemerintah meminta ADP bekerja dengan anggaran

batas atas hanya 200 juta dollar AS. Akhirnya, proyek bandara dibangun dengan pendanaan sekitar 40 persen dari pemerintahan Indonesia dan 50-60% berupa hutang (*soft loans*) dari Pemerintahan Perancis.

Pada tahun 1977, ADP merancang total 3 tiga terminal bandara Soetta yang terdiri dari 2 terminal untuk lalu lintas penerbangan nasional dan 1 terminal penerbangan internasional khususnya bagi jemaah haji dan umroh —meskipun pada akhirnya rancangan terminal 3 yang diresmikan Agustus 2016 silam berubah jauh di kemudian hari. ADP bertanggung jawab terhadap rencana induk (*masterplan*) bandara, sedangkan bagian teknis dan pelengkap seperti lansekap dan interior lebih banyak melibatkan biro arsitek Indonesia, misalnya Atelier 6.

Proyek ini melibatkan 98 persen masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah buruh dan sisanya profesional, serta 2 persen orang Perancis yang terdiri dari profesional ahli. Mereka bekerja di bagian desain, supervisi, serta kontraktor, sedangkan lansekap dan interior dipegang oleh tenaga kerja asal Jawa Tengah dan Bali. Dalam laporan-laporan ADP, tidak dijelaskan rinci sejauh mana keterlibatan orang-orang Tangerang terutama yang tinggal di sekitar bandara, kecuali untuk menjadi pekerja setelah bandara terbangun yang didominasi oleh pekerjaan di bidang pengamanan (*aviation security*), pelayanan (*service*), dan pendukung (*support*).

Proyek bandara Soetta sendiri dimulai oleh Aéroport de Paris (ADP) sepanjang tahun 1977-1982 untuk Terminal I, dan selanjutnya Terminal II hingga tahun 1992 di bawah supervisi Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Rencana induk bandara diperkirakan mencakup total area 1.800 hektar di Tangerang. Terminal I memiliki luas 126.000 m², dan lahan sisanya direncanakan untuk landasan pacu dan taksi, apron, hingga area pemeliharaan pesawat dan kargo. ADP bertanggung jawab atas rencana induk, sedangkan bagian teknis dan komplementer seperti lanskap taman bandara dan interior melibatkan lebih banyak tenaga ahli arsitek dan seniman dari Indonesia.

Gedung terminal bandara menentukan pengalaman keruangan penggunanya. Terminal berfungsi sebagai pusat transit penumpang antara wilayah udara (*air*) dan tanah (*land*), dan tempat penumpang beristirahat setelah kelelahan dalam perjalanan dan mengalami gangguan *jettlag* (Uffelen, 2012:1). Konsep bandara sebagai gerbang belakangan waktu menjadi sebuah jenama atau *branding* dari Kota Tangerang, melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PT. Angkasa Pura yang menjadikan Kota Tangerang berslogan *Gateway of Indonesia* atau “Gerbang Indonesia.”

Sebagai gerbang interaksi antara global dan lokal, bandara menjadi pusat pertukaran nilai antarbudaya antara global dan lokal (Lloyd, 2003). Pada awal abad ke-20, kemajuan teknologi bandara di dunia sering menjadi simbol hegemoni, kekuatan, serta kebanggaan bangsa modern, yang dimulai dari Negara Weimar (Jerman) yang merintis revolusi teknologi dirgantara untuk kepentingan militer. Setiap desain bandara berusaha menuangkan gagasan nilai budaya negaranya selain fungsi praktisnya (Zukowsky, 1996:18). Desain terminal, landasan pacu, *taxiway*, hingga lanskap bandara menjadi tempat jaringan sosial-budaya antarbangsa, menampilkan keterwakilan budaya dari gaya arsitektur terminal dan bangunan lainnya yang menciptakan identitas visual negara tersebut.

Dalam mendesain arsitektur Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terdapat relasi kuasa pemerintah Orde Baru yang kuat untuk memvisualisasikan budaya nasional dan simbol identitas bangsa secara keseluruhan di Tangerang. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Abidin Kusno (2000), bahwa negara-negara bekas jajahan cenderung meneruskan praktik dan kebijakan negara kolonial di dalam perencanaan kota yang terpusat dalam membangun daerah pinggiran. Pandangan ini dianggap sebagai warisan kolonial yang mempengaruhi pemikiran pemerintahan dan masyarakat pascakemerdekaan di Indonesia.²⁴

²⁴ Abidin Kusno (2000), *Behind the Postcolonial: Architecture, Urban Spaces and Political Cultures in Indonesia*. New York: Routledge.

Presiden Soeharto yang dikenal sebagai “Bapak Pembangunan” menggunakan arsitektur dan teknologi modern bandara sebagai alat melegitimasi penanaman ide-ide tradisi di Tangerang demi mencapai visi nasional. Tema-tema pembangunan nasional sepanjang tahun 1980-1990-an banyak berkuat pada identitas, kebangsaan, dan ketahanan budaya yang sengaja dibuat dalam rangka menghadapi arus globalisasi akibat masuknya investasi asing sejak Orde Baru.²⁵



Gambar 3.3. Presiden Soeharto dan jajarannya meninjau rencana induk bandara Soetta melalui maket kompleks bandara. Sumber: Kompas

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya proyek nasional yang menyeimbangkan arus modernisme global dengan keterakaran pada budaya, misalnya Taman Mini Indonesia Indah (1970-1975), kompleks kampus Universitas Indonesia (1980), dan konstruksi masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila di seluruh negeri (1982-2009). Ketiga contoh *masterplan* proyek ini menonjolkan elemen-elemen tradisi, sejarah, budaya, dan pusaka lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

²⁵ Abidin Kusno, “Conclusion: Beyond the Postcolonial?”, *Behind the Postcolonial*, hlm. 209.

Desain bandara Soetta yang diharapkan mencerminkan tradisi dan budaya negara atau “budaya pusat” sehingga semakin menegaskan hubungan pusat dengan daerah pinggiran dalam pembentukan ruang kota di Tangerang. Di sisi lain, pembangunan modern yang berlangsung di Kota Tangerang ini justru secara positif juga memperlebar peluang bagi pemangku kepentingan dan masyarakat di wilayah pinggiran ibukota untuk melepaskan diri dari pusat lama, dan memekarkan dirinya menjadi suatu “pusat yang baru”. Infrastruktur bandara di wilayah pinggiran mampu menjadi katalisator pembangunan daerah, seperti yang juga dicontohkan oleh hubungan daerah-pusat Gatwick di selatan Inggris, Rein-Mein dan Frankfurt, Roissy dan Paris, serta O'Hare dan Chicago.

Itulah yang terjadi pada Pemerintah Kota Tangerang yang secara otonom berkembang seiring dengan pembangunan bandara Soetta. Faktanya, terbentuknya wacana wilayah Kota Administratif (kotif) Tangerang sejak tahun 1981 terjadi tidak lama setelah proyek Soetta berjalan, dan ketika Terminal I diresmikan pada tahun 1985, dirilis pula Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota yang peruntukannya sebagai daerah industri, perumahan, perdagangan, dan jasa dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.

C. Desain arsitektur bandara Soetta

Romi Khosla (1989) melaporkan, rencana induk dua terminal Soetta diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penerbangan sipil di kota modern masa depan yang hemat biaya, sederhana, dan fungsional, serta yang paling penting, harus mencerminkan karakter “Arsitektur Indonesia”. Bagi Presiden Soeharto, tujuan ekspresi tradisi ini adalah demi menjaga stabilitas nasional dalam ranah kebudayaan, karena aliran deras neoliberalisme ke Indonesia melalui kebijakan investasi asing mempercepat masuknya pengaruh budaya global ke Indonesia yang menimbulkan kekhawatiran akan luntarnya kebudayaan nasional.

Soeharto juga menginginkan agar nama dua pendiri bangsa, yaitu Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta selaku sang proklamator dan pasangan presiden-wakil presiden pertama negara, agar terus diingat dan terkenang dalam salah satu karya teknologi terbesar yang pernah dibangun oleh Negara.²⁶ Banyak pula bandara daerah di tanah air menggunakan nama-nama pahlawan lokal mereka masing-masing, sedangkan untuk bandara pusat negara harus diambil nama dari pahlawan nasional yang terbesar.

Pada tahun 1995, bandara Soetta berhasil meraih penghargaan Aga Khan Award for Architecture karena ide-idenya dalam mewakili budaya nasional yang tercermin dalam lanskap taman bandara yang terintegrasi dan penerapan teknologi lokal. Konstruksi cakar ayam, sebagai contoh, adalah salah satu eksperimen ide paling inovatif dan terkemuka dalam teknologi struktur yang dipelopori oleh Ir. Sedyatmo pada tahun 1962. Nama “cakar ayam” merujuk pada adaptasi morfologis kaki ayam yang ajeg pada lahan basah alami di wilayah tropis seperti Indonesia. Aplikasi ini menciptakan rasa kesetempatan dengan menerjemahkan kearifan lokal ke dalam bentuk arsitektur, material, dan ornamentasi untuk menciptakan pengalaman yang berkesan, menciptakan pengaturan harmonis antara dua dunia: eksploitasi struktur buatan manusia modern dan nuansa lanskap alam tradisional, yang diharapkan memberikan rasa dan pengalaman ruang khas Indonesia.

Davidson & Serageldin (1995) juga mengungkapkan, Paul Andreu dan ADP berhasil mengaplikasikan adaptasi budaya lokal Jawa ke dalam desain bandara Soetta yang modern. Elemen dekoratif yang terinspirasi dari unsur budaya lokal ditemukan di banyak sudut, baik di dalam maupun di luar ruangan, misalnya unsur budaya Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua. Penggunaan ubin terazzo *precast* pada dinding dan lantai bandara yang menyerupai pola batu bata merah; gedung paviliun dan gazebo terbuka menyediakan pencahayaan alami, kisi-kisi dan ventilasi udara; serta

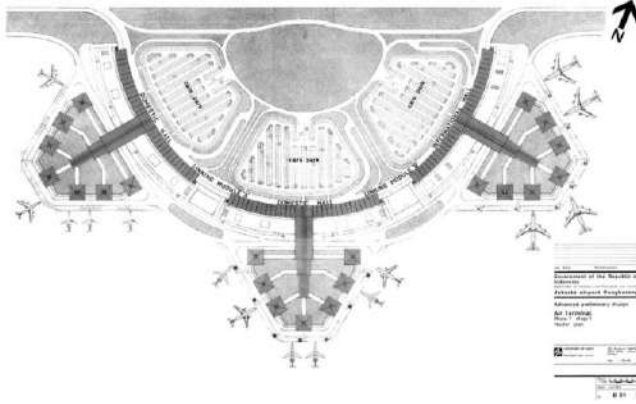
²⁶ Presiden Soeharto (1985), *Sambutan Upacara Peresmian Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, pada Tanggal 5 Juli 1985*.



Gambar 3.6. Atap selasar dan lobi terminal bandara tersusun atas pipa-pipa besi berlapis cat merah menyerupai warna kayu-kayu atap pendopo dan Joglo. Sumber: Gregorius Antar, AKA

Selama periode pembangunan bandara Soetta (1977-1992), Eropa dan Amerika tengah mengalami tren gaya desain yang terakar dalam keaslian dan karakteristik lokal setempat yang disebut dengan regionalisme dan neo-regionalisme setelah berkembangnya praktik arsitektur modern dan penyebaran *International Style*. Namun, gaya arsitektur ini juga terkendala oleh masalah, karena cenderung melibatkan hegemoni pandangan dunia utara (*Global North*) yang memandang aspek regional dari sudut pandang dunia selatan (*Global South*) dengan kaca mata yang terbatas.

Desain bandara Soetta berbeda dari desain bandara karya Andreu lainnya, seperti Charles de Gaulle International Airport di Perancis, yang lebih mengungkap pendekatan modernis dalam bentuk dan materialnya. Proyek Soetta menciptakan dialog antara desain modern dengan lokalitas desain. Ide desain Soetta mencerminkan proses rekayasa ulang tradisi Indonesia jauh sejak zaman kerajaan dan sebelum penjajahan. Meskipun demikian, tidak semua ragam budaya dan tradisi Nusantara dapat disertakan dalam merancang bandara Soetta, mengingat keragamannya yang begitu banyak. Oleh karena itu, seleksi tradisi tidak dapat dihindari.



Gambar 3.5. Denah masterplan terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta.
 Sumber: ADP, AKA



Gambar 3.6. Bandara Charles de Gaulle International Airport di Roissy.
 Sumber: ADP Ingenierie

Beberapa karakter etnik mencuat dalam wujud fisik bangunan permanen, sementara yang karakter etnik lain hanya menjadi dekorasi di permukaan atau bahkan tidak mewakili sama sekali. Budaya Jawa menjadi fokus desain terminal dengan banyaknya ruang pendopo untuk berbagai kegiatan. Pemerintah sebagai pusat bagi Tangerang, dan Paul Andreu (Aéroport de Paris) sebagai agen global dalam membangun infrastruktur

bandara besar pertama di Indonesia menceritakan representasi budaya tradisional dalam pembangunan modern. Desain bandara yang seolah merangkum suasana Indonesia adalah contoh makna dan identitas budaya nasional dibangun secara terpusat. Di Tangerang sendiri, gaya arsitektur bangunan Lapas Kelas I yang baru berdiri tahun 1980 menerapkan ide yang dikembangkan dari prinsip atap Joglo dan pendopo. Ide desain menjadi produk dari proses pencarian kembali tradisi Indonesia balik ke masa lalu.



Gambar 3.7. Gerbang bandara mengambil gapura khas Bali.
Sumber: Gregorius Antar, AKA



Gambar 3.8. Maket Lapas Kelas I Kota Tangerang.
Sumber: Dokumentasi penulis

Meskipun desain Paul Andreu di terminal bandara Soetta mencoba menciptakan nuansa tradisional Jawa, beberapa kritik muncul terkait kesesuaian dengan fungsi praktisnya. Penggunaan elemen tradisional terkadang tampak lebih sebagai sentuhan dekoratif daripada solusi yang benar-benar efisien atau relevan untuk pengalaman penumpang dan kebutuhan operasional bandara modern. Kritikus mungkin bertanya-tanya apakah penekanan pada estetika tradisional ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan ekspektasi pengguna yang lebih kontemporer.

Ir. Budi Sukada, dosen dan arsitek senior yang berpengalaman menjadi seorang juru gambar (*drafter*) Terminal I Soetta pernah mengkritik arsitek Paul Andreu dalam wawancaranya tahun 2016, dan menganggapnya tidak memahami falsafah lokal dan iklim tropis di pulau Jawa. Menurut Budi, pilihan warna merah atap, dinding, dan lantai bandara Soetta berangkat dari pandangan eksotis Andreu terhadap budaya Jawa. Sebaliknya, Saptono Istiawan yang pernah bekerja sebagai arsitek di perusahaan Aéroport de Paris dalam wawancara tahun 2017 memberi kesaksian desain Soetta sudah cukup mengakomodasi dan iklim tropis.

Pendapat lain dari Prof. Slamet Wirasonjaya, seorang konsultan arsitek yang terlibat di konstruksi terminal 2 dan juga merancang Masjid Raya Al-A'zhom Kota Tangerang, mengkritik tajam lanskap terminal II yang cenderung dipaksakan dan terlihat jelas terpisah dari akses bangunan bertembok dan berkaca di sekelilingnya, sehingga gagal sebagai arsitektur bandara negara tropis. Kaca-kaca itu ditambahkan karena sering terjadi becek akibat air hujan yang tumpah akibat ruang terminal yang terbuka. Dari segi iklim dan biaya perawatan, lanskap di terminal bandara akhirnya tidak mencerminkan taman tropis yang berfokus pada naungan yang membuat nyaman, malahan justru memerlukan pemeliharaan harian dan mingguan yang mahal. Pada intinya, alih-alih membahas simbol dan makna budaya, aspek praktis dalam bandara lebih menonjol untuk ditekankan.

D. Bandara dan pusat baru kota

Selama lebih dari 20 tahun, melalui program pemerintah Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I-VI, Presiden Soeharto telah resmi membuka sekurang-kurangnya 7 terminal bandara sepanjang kepulauan tanah air selain bandara Soetta di Tangerang, antara lain bandara Halim Perdanakusuma baru (1974), El Tari Nusa Tenggara Timur (1988), Ngurah Rai Denpasar (1992), Dewa Daru Semarang (1993), Supadio Pontianak (1995) dan Hang Nadim Batam (1995).²⁷ Pembangunan Soetta memindahkan P.N. Angkasa Pura Kemayoran ke Angkasa Pura I dan II di Tangerang tahun 1987. Namanya pun berubah dari Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta, dan menyusul pendirian Angkasa Pura II (1986). Menyatunya bandara Soetta dengan kantor pusat semakin mendorong kemajuan bagi hadirnya Kota Tangerang sebagai pusat baru.

Pada tahun 2017, pertumbuhan bandara di Indonesia termasuk yang tertinggi dan tersibuk di dunia, dengan total 670 lapangan terbang, 298 bandara aktif, dan 16 bandara baru. Per tahun 2016, bandara Soetta melayani aktivitas penerbangan sekitar 300.000 penumpang per harinya (Lubis & Suryadarman, 2017). Perjalanan udara menawarkan pengalaman unik melihat ruang kota melalui pemandangan udara semakin menarik minat pengguna komersial. (Lloyd, 2003:93) Kota *aeropolis*, sebuah kota bandara yang terletak di dalam kota akhirnya terwujud di Tangerang dengan dibangunnya banyak klaster perumahan seperti Bandara Mas dan Komplek Garuda, hotel Aeropolis dan lainnya, perusahaan kargo, pergudangan dan logistik yang menunjang keberadaan bandara sekaligus berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah Kota Tangerang.

²⁷ <http://soeharto.co/jcjak-presiden-soeharto-dalam-peresmian-proyek-pembangunan>.

BAB 4

WALI KOTA TANGERANG DARI MASA KE MASA

M. Alfian Nugraha Fauzi

Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1993 sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, wilayah ini telah mengalami berbagai masa kepemimpinan dari sejak masa Djakaria Machmud hingga masa kepemimpinan Arief Rachadiono Wismansyah. Dalam perubahan dan perkembangan yang cukup pesat itu, terdapat pula andil dari para pemimpin yang pernah memimpin wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang hingga menjadi Kota Tangerang dari masa ke masa. Kepemimpinan Wali Kota Tangerang dari masa ke masa tersebut tentunya menghasilkan berbagai macam kebijakan atau program yang dapat dirasakan hingga kini khususnya oleh masyarakat Kota Tangerang. Bahkan beberapa kebijakan atau program yang dibuat oleh beberapa Wali Kota maupun Wali Kotamadya dari setiap masa banyak yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar di luar wilayah Kota Tangerang.

1. Djakaria Machmud (1993—1998)

Djakaria Machmud merupakan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pertama yang mulai menjabat pada tahun 1993 dan sebelum bertugas sebagai Wali Kotamadya, Djakaria Machmud bertugas sebagai Wali Kota Administratif Tangerang periode tahun 1990 hingga tahun 1993. Djakaria Machmud dilantik sebagai Pejabat Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang pada tanggal 28 Februari 1993 oleh Menteri Dalam Negeri pada masa itu Yaitu Jenderal (Purn) Rudini. Pelantikan Djakaria Machmud dilakukan di Alun-Alun Ahmad Yani. Dengan dilantiknya Djakaria Machmud sebagai Pejabat Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang maka secara resmi

berdiri wilayah otonom baru di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yaitu Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Salah satu langkah Djakaria Machmud ketika bertugas sebagai Pejabat Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang adalah dengan membentuk kelengkapan Sekretariat Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Selanjutnya dibentuk pula DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang pada bulan Juli tahun 1993 dan selanjutnya melantik anggota DPRD terpilih. Pembentukan dua komponen tersebut merupakan langkah untuk menyongsong definitifnya jabatan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang setelah sebelumnya dijabat oleh Pejabat Wali Kotamadya.²⁸

Pada bulan November 1993, diadakan Pemilihan Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang diselenggarakan oleh DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Djakaria Machmud yang menjadi Pejabat Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang terpilih sebagai Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang pertama.²⁹ Pada 2 November 1993 Menteri dalam Negeri pada masa itu Rudini mengangkat Djakaria Machmud sebagai Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang untuk periode tahun 1993 hingga tahun 1998. Djakaria Machmud pada saat itu menyisihkan 2 calon Wali Kotamadya lainnya yang juga bersaing untuk mengisi posisi yang serupa.

²⁸ Ibid, hlm. 25.

²⁹ Mufti Ali, dkk., op. cit., hlm. 216.



Gambar 4.1. Penandatanganan yang dilakukan oleh Djakaria Machmud sebagai Pejabat Wali Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang di hadapan Menteri Dalam Negeri Rudini. Sumber: Khastara Perpusnas

Pada saat bertugas memimpin sebuah wilayah, seorang pemimpin daerah biasanya memiliki berbagai kebijakan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di setiap wilayah dan juga berupaya untuk mensejahterakan perekonomian rakyat di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini berlaku pula pada masa pemerintahan Wali Kotamadya Djakaria Machmud di mana terdapat berbagai macam kebijakan atau program yang berhasil digagas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dari sejak menjabat sebagai Wali Kota Administratif hingga kemudian menjadi Wali Kotamadya Tangerang. Beberapa kebijakan atau program tersebut di antaranya yaitu:

a. Program Stimulan Nyi Mas Melati

Program yang digagas oleh Djakaria Machmud selama masa kepemimpinannya ini pertama kali diperkenalkan pada saat menjabat sebagai Wali Kota Administratif Tangerang hingga terbentuknya

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan minat masyarakat berswadaya memenuhi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana di lingkungannya masing-masing. Pemerintah selanjutnya memberikan bantuan dana kepada seluruh Rukun Warga (RW) di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang di mana masing-masing Rukun Warga (RW) memperoleh bantuan sebesar Rp. 150.000 sebagai dana pemancing anggaran swadaya.³⁰ Langkah ini merupakan cara agar masyarakat dapat membangun lingkungannya dengan dana swadaya yang berasal dari pemerintah serta dapat mengelolanya dengan baik untuk pembangunan di wilayahnya.



Gambar 4.2. Wali Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Djakaria machmud menyalami masyarakat pada saat meresmikan Pasar Malabar tahun 1995. (Sumber: Khastara Perpusnas)

Program ini kemudian dianggap berhasil dengan dibangunnya berbagai macam sarana seperti jalan setapak lingkungan, pembangunan sarana olahraga. Pos Kamling, pemasangan papan nama jalan dan pembangunan saluran air melalui dana yang diberikan oleh pemerintah

³⁰ Harry Mulya Zein dkk., op. cit., hlm. 12.

tersebut. Melihat keberhasilan program ini, selanjutnya anggaran yang disalurkan kepada setiap Rukun Warga (RW) diperbesar menjadi RP. 250.000. Dengan keberhasilan yang diperoleh dari Program Nyi Mas Melati tersebut berhasil menarik perhatian dari banyak pihak bahkan pemerintah dari berbagai macam daerah melakukan studi banding ke pemerintahan Djakarta Machmud untuk selanjutnya dapat diterapkan di wilayahnya. Selanjutnya peran dana swadaya yang selama ini diberikan kepada masyarakat mulai diambil alih oleh APBD Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.³¹

b. Program Si Hitam Manis

Program ini merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang berniat untuk membangun jalan lingkungannya namun biaya material diluar aspal menjadi tanggung jawab swadaya masyarakat. Si Hitam Manis merupakan sebutan untuk “Aspal” yang menjadi bahan utama dalam pembangunan jalan tersebut. Bantuan ini kemudian mendapatkan respon yang baik dari masyarakat di mana dengan masyarakat di setiap desa dan kelurahan di masing-masing kecamatan memanfaatkan bantuan aspal ini.

Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari bantuan dana dari Program Nyi Mas Melati yang berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing wilayah yang dilakukan sendiri oleh masyarakat.³² Dengan adanya bantuan tersebut secara tidak langsung masyarakat dapat membangun daerahnya untuk berbagai macam sarana dan prasarana yang bermanfaat dan berguna.

c. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kebijakan lain yang dilakukan pada masa pemerintahan Wali Kotamadya Djakarta Machmud adalah pembangunan berbagai macam

³¹ Ibid., hlm. 13.

³² Ibid., hlm. 23.

sarana penunjang transportasi berupa jalan dan jembatan di berbagai macam wilayah di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Beberapa jembatan yang dibangun pada masa pemerintahannya di antaranya yaitu Jembatan di sekitar Pintu Air 10, Jembatan Ampera di Kecamatan Batuceper dan Jembatan Maju Karya di Jalan Sangego. Keberadaan jembatan yang dibangun pada masa Djakarta Machmud ini tidak hanya menunjang dari segi transportasi saja namun juga sebagai penghubung wilayah yang sebelumnya sangat sulit diakses oleh masyarakat. Dengan dibangunnya berbagai macam jembatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang telah mempermudah masyarakat dalam melakukan segala aktifitas dan berbagai macam keperluan.



Gambar 4.3. Jalan Inspeksi Benteng Jaya yang berada di Tepi Sungai Cisadane yang dibangun pada masa Djakarta Machmud. Sumber: Buku Kota Tangerang, Benteng yang Berhias

Selain membangun berbagai macam jembatan pada masa itu juga dibangun pula jalan sebagai sarana penunjang transportasi. Beberapa ruas jalan yang dibangun di antaranya Jalan Inspeksi Benteng Jaya serta pelebaran jalan terhadap Jalan KH. Hasyim Asyari di wilayah Cipondoh. Dengan dibangunnya berbagai macam sarana penunjang seperti jembatan

dan jalan yang manfaatnya hingga saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat tidak hanya oleh warga Kota Tangerang saja namun juga warga di sekitar Kota Tangerang yang merasakan dampak dari pembangunan tersebut.



Gambar 4.4. Pembangunan jembatan penghubung di perbatasan antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang pada tahun 1995 di sekitar wilayah Karawaci. Sumber: Khastara Perpunas

d. Pembangunan Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada masa kepemimpinan Djakaria Machmud dibangun pula berbagai macam Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun berada di sekitar tepian Kali Mookervaart. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini sesuai motto Kota Tangerang BERHIAS yang diperkenalkan pada masa kepemimpinan Djakaria Machmud. Hadirnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut menjadi cara dalam memanfaatkan lahan yang berada di tepi Kali Mookervaart sebagai salah satu destinasi wisata bagi masyarakat di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan juga daerah sekitar.



Gambar 4.5. Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang sedang memberikan penjelasan terkait pertumbuhan pembangunan di wilayahnya kepada Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumatamaja pada tahun 1996. Sumber: Khastara Perpunas

Salah satu yang menjadi alasan Djakaria Machmud membangun Taman dan juga Ruang Terbuka Hijau adalah ingin menjadikan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sebagai kota yang asri dan hijau serta nyaman salah satunya dengan pembangunan sarana dan prasarana tersebut. Dengan pembenahan yang dilakukan tersebut, Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang memperoleh Piala Adipura pada masa kepemimpinannya Djakaria Machmud. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun di tepi Kali Mookervaart tersebut hingga kini masih dimanfaatkan oleh masyarakat dan menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Tangerang.

e. Gedung Cisadane dan Gedung Windu Karya

Pada masa kepemimpinannya Djakaria Machmud sebagai Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang dibangun berbagai macam sarana penunjang dalam mendukung lancarnya kegiatan

pemerintahan. Sarana penunjang yang dibangun salah satunya adalah gedung perkantoran yang meliputi Gedung Cisadane dan Gedung Windu Karya. Kedua gedung ini memiliki peranan penting dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan pada masa Djakarta Machmud. Hingga saat ini kedua gedung peninggalan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang, Djakarta Machmud masih tetap digunakan dan berfungsi dengan baik.



Gambar 4.6. Gedung Cisadane yang baru diresmikan pada tahun 1998
Sumber: *Buku Kota Tangerang, Benteng yang Berhias*

Gedung Cisadane merupakan gedung perkantoran yang diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu, R. Nuriana pada tanggal 23 februari 1998. Gedung Cisadane merupakan bangunan yang diperuntukkan untuk Kantor Pelayanan Perizinan terpadu (KPPT) beserta Dinas atau Instansi yang berkaitan dengan perizinan. Gedung Cisadane termasuk memiliki fasilitas yang memadai pada masa itu dengan tujuan agar masyarakat merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Gedung Windu Karya merupakan gedung perkantoran lain yang dibangun pada masa kepemimpinan Djakaria Machmud yang digunakan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dengan fasilitas yang memadai. Gedung Windu Karya berlokasi di Jalan Ahmad Yani Kota Tangerang dan hingga kini masih tetap digunakan sebagai Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang.

f. Terbentuknya Persikota Tangerang

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, salah satu langkah yang dilakukan pada masa kepemimpinan Djakaria Machmud adalah dengan membentuk sebuah klub Sepak Bola. Pada tanggal 11 Oktober 1994 akhirnya dibentuk Persikota Tangerang (Persatuan Sepak Bola Indonesia Kota Tangerang) sebagai klub Sepak Bola yang dimiliki oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.³³ Djakaria Machmud berperan pula sebagai Ketua Umum Persikota Tangerang dan tidak lama setelah dibentuk pada tahun 1995 Persikota Tangerang resmi menjadi anggota PSSI dan berhak tampil pada kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh PSSI.

Sebelum terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, di wilayah Tangerang telah berdiri sebuah klub Sepak Bola yaitu Persita Tangerang yang telah berdiri pada tahun 1953. Dalam perkembangannya kedua klub yang berasal dari Tangerang ini menempati stadion yang sama yaitu Stadion Benteng Tangerang. Kiprah Persikota Tangerang pada gelaran Kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI termasuk diperhitungkan pada masa itu hingga mendapatkan julukan “Bayi Ajaib”

Masa pemerintahan Djakaria Machmud sebagai Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang berakhir pada tahun 1998 dan selanjutnya digantikan oleh Bapak Moch. Thamrin. Setelah tidak menjabat

³³ Ibid., hlm. 50.

sebagai Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang, Djakaria Machmud yang akrab dipanggil Jack kembali ke kampung halamannya di Cirebon hingga wafatnya pada tanggal 10 Januari 2017. Semasa hidupnya setelah tidak lagi menjadi Wali Kotamadya Tangerang Djakaria Machmud pernah menjadi Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

2. Mochammad Thamrin (1998—2003)

Wali Kota Tangerang kedua yang menjabat setelah Djakaria Machmud adalah Mochammad Thamrin yang memerintah pada tahun 1998 hingga tahun 2003. Pemerintahan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang dipimpin oleh Mochammad Thamrin dapat dikatakan merupakan masa peralihan dari masa Orde Baru kepada masa Reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Pada masa kepemimpinan Mochammad Thamrin terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia di mana istilah Kotamadya diubah menjadi Kota sehingga sebutan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang berubah menjadi Wali Kota Tangerang.³⁴

Pada masa pemerintahan Wali Kota Mochammad Thamrin selama satu periode terdapat beberapa kebijakan atau program yang dibuat. Kebijakan atau program yang terlihat oleh masyarakat adalah berkaitan langsung dengan pembangunan yang dilakukan. Pembangunan yang dilakukan pada masa Wali Kota Mochammad Thamrin hingga kini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya.

³⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah



Gambar 4.7. Wali Kota Mochammad Thamrin
(Sumber: Pemerintah Kota Tangerang)

a. Pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang

Pada masa pemerintahan Wali Kota Mochammad Thamrin kebijakan yang dilakukan adalah salah satunya melakukan pembangunan terhadap kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Pembangunan tersebut merupakan salah satu kebijakan atau program besar yang dilakukan pada masa Wali Kota Mochammad Thamrin. Selain Kantor Wali Kota Tangerang di dalam kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang berdampingan pula dengan Gedung DPRD dan juga berbagai macam Instansi atau Dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Pembangunan terhadap Pusat Pemerintahan Kota Tangerang ini sekaligus menggantikan kantor sebelumnya yang digunakan oleh Wali Kota Tangerang yang kini digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang tersebut hingga saat ini tetap digunakan oleh Wali Kota setelah Mochammad Thamrin.

b. Pembangunan Masjid Al-Azhom

Pembangunan lain yang dilakukan oleh Mochammad Thamrin selama menjabat sebagai Wali Kota Tangerang yaitu melakukan pembangunan Masjid Al-Azhom yang saat ini menjadi masjid kebanggaan

bagi masyarakat Kota Tangerang dan menjadi landmark Kota Tangerang. Masjid Al-Azhom diresmikan pada tahun 2003 oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada masa itu, Said Agil Husin Al Munawar.

Perencanaan masjid ini pada dasarnya telah dimulai sejak pemerintahan Wali Kota Djakaria Machmud namun baru terealisasi pada masa pemerintahan Wali Kota Mochammad Thamrin. Masjid Al-Azhom dirancang oleh Ir. H. Slamet Wirasonjaya, Guru Besar jurusan arsitektur ITB dan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan masjid lainnya, salah satunya adalah bentuk kubah masjid.³⁵ Masa kepemimpinan Mochammad Thamrin berakhir pada tahun 2003 dan selanjutnya digantikan oleh Wahidin Halim yang sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Daerah Kota Tangerang.



Gambar 4.8. Gerbang Pusat Pemerintahan Kota Tangerang tahun 2003.
Sumber: Tempo

³⁵<https://www.republika.id/posts/20834/masjid-raya-al-azhom-unik-dan-megah-di-kota-benteng>, diakses pada tanggal 5 November 2023, 14.19 WIB.

3. Wahidin Halim (2003—2013)

Wahidin Halim merupakan Wali Kota Tangerang ketiga yang bertugas selama dua periode sejak tahun 2003 hingga tahun 2013 dan menggantikan Wali Kota sebelumnya yaitu Mochammad Thamrin. Wahidin Halim merupakan seorang birokrat yang merintis karir sejak dekade 1970-an di lingkungan Pemerintah Kota Administratif Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang serta pernah menduduki beberapa jabatan strategis di antaranya pernah menjabat sebagai Sekretaris Kota Administratif Tangerang pada tahun 1988 hingga menjadi Sekretaris Daerah Kota Tangerang pada tahun 2003 hingga dilantik menjadi Wali Kota Tangerang pada tahun yang sama.



Gambar 4.9. Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim dan Wakil Wali Kota Tangerang memegang Piala Adipura yang diraih oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2013. Sumber: Tempo

Pelantikan Wahidin Halim sebagai Wali Kota Tangerang dilakukan langsung oleh Gubernur Banten pada masa itu yaitu H. Djoko Munandar pada tanggal 16 November 2003. Terpilihnya Wahidin Halim

sebagai Wali Kota dilakukan langsung oleh anggota parlemen di DPRD Kota Tangerang. Pada masa itu pemilihan Kepala Daerah masih dilakukan oleh anggota parlemen di setiap wilayah dan sejak tahun 2004 pemilihan dilakukan oleh rakyat secara langsung. Wahidin Halim pada masa itu berpasangan dengan Deddy Syafei dan menyisihkan dua pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada periode kedua, Wahidin Halim terpilih kembali sebagai Wali Kota Tangerang pada Pemilihan Umum Wali Kota Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2008. Pada Pemilihan Kepala Daerah periode ini, Wahidin Halim berpasangan dengan Arief Rachadiono Wismansyah sebagai Wakil Wali Kota. Wahidin Halim dan Arief Rachadiono Wismansyah menyisihkan 2 pasang calon lainnya dalam Pemilihan Umum Wali Kota Tangerang pada tahun 2008. Wahidin Halim dan Arief Rachadiono Wismansyah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Pada tanggal 16 November 2008 di Kantor DPRD Kota Tangerang oleh Gubernur Banten pada masa Ratu Atut Chosiyah.

Pada masa kepemimpinan Wahidin Halim sebagai Wali Kota Tangerang, terdapat berbagai macam kebijakan atau program yang digagas dan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu kebijakan atau program yang digagas oleh Wahidin Halim adalah dalam bidang pendidikan hingga mendapatkan apresiasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007, di mana keberpihakan Wahidin Halim terhadap dunia pendidikan salah satunya diwujudkan dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar untuk anggaran pendidikan. Beberapa kebijakan Wahidin Halim sebagai Wali Kota Tangerang dapat dilihat dari dua periode kepemimpinannya.

Selama periode kepemimpinan Wahidin Halim sebagai Wali Kota terdapat beberapa kebijakan atau program yang dilakukan dan berdampak kepada masyarakat Kota Tangerang.

a. Tangerang Kota Akhlaqul Karimah

Pada saat kepemimpinan Wahidin Halim sebagai Wali Kota Tangerang, salah satu yang dilakukan adalah dengan membuat slogan Kota Tangerang sebagai kota yang berakhlaqul karimah. Hal ini tentunya merupakan sebuah harapan agar Kota Tangerang menjadi kota yang religius bagi semua umat beragama yang ada di Kota Tangerang. Slogan Kota Tangerang sebagai kota yang berakhlaqul karimah tetap dipergunakan hingga saat ini dan menjadi visi dari Kota Tangerang.

b. Kebijakan Dalam Bidang Pendidikan

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Wahidin Halim adalah perhatian dan keberpihakannya terhadap dunia pendidikan khususnya di Kota Tangerang. Kebijakan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Wahidin Halim salah satunya adalah membuat 220 gedung sekolah baru yang tersebar di Kota Tangerang. Peresmian ratusan gedung sekolah baru tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal lain yang dilakukan oleh Wahidin Halim adalah dengan mengalokasikan sebagian besar APBD Kota Tangerang untuk urusan pendidikan hingga kemudian mendapatkan apresiasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan lain yang dilakukan adalah meniadakan Biaya Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) sehingga peserta didik dibebaskan untuk biaya sekolah setiap bulannya. Kebijakan lainnya adalah peningkatan terhadap kesejahteraan guru di Kota Tangerang dengan cara memberikan uang insentif setiap bulannya kepada para guru.



Gambar 4.10. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan 220 Gedung Sekolah baru di Kota Tangerang tahun 2007.

Sumber: Facebook Susilo Bambang Yudhoyono

c. Kebijakan Dalam Bidang Kesehatan

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Wahidin Halim adalah perhatiannya dalam bidang kesehatan khususnya di Kota Tangerang. Kebijakan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Wahidin Halim salah satunya adalah dengan pembangunan 1000 Posyandu di Kota Tangerang. Hal ini menjadi sesuatu yang penting mengingat peran vital dari Posyandu dalam menggalakan pentingnya kesehatan kepada masyarakat. Kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat Kota Tangerang dan juga pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang.

Kebijakan kesehatan gratis kepada masyarakat Kota Tangerang dilakukan dengan menggratiskan biaya pengobatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Rujukan. Salah satu alasan didirikannya Rumah Sakit Umum Kota Tangerang adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Tangerang dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakatnya. Selain itu selama ini masyarakat Kota Tangerang jika ingin berobat salah satu pilihannya adalah ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dan rumah sakit lainnya sehingga pada tahun 2012 dimulailah pembangunan terhadap RSUD Kota Tangerang di daerah Modernland dan dioperasikan penggunaannya tahun 2013.³⁶

3. Arief Rachadiono Wismansyah (2013—2023)

Arief Rachadiono Wismansyah merupakan Wali Kota Tangerang yang keempat yang menjabat selama dua periode yang dimulai sejak tahun 2013 hingga tahun 2023. Arief Rachadiono Wismansyah bertugas sebagai Wali Kota Tangerang menggantikan Wahidin Halim yang kelak menjadi Gubernur Banten. Pada saat periode Wali Kota Tangerang tahun 2008 hingga tahun 2013, Arief Rachadiono Wismansyah merupakan Wakil Wali Kota Tangerang pada saat Wahidin Halim memimpin di periode kedua kepemimpinannya.

Arief Rachadiono Wismansyah berpasangan dengan Sachrudin naik menjadi Wali Kota Tangerang setelah memenangkan Pemilihan Umum Wali Kota Tangerang yang dilaksanakan pada 31 Agustus 2013 dan menyisihkan 2 pasang calon lainnya. Pasangan Arief Rachadiono Wismansyah dan Sachrudin dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang terpilih pada 24 Desember 2013 di Kantor DPRD Kota Tangerang oleh Wakil Gubernur Banten pada masa itu Rano Karno.³⁷

³⁶ <https://rsud.tangerangkota.go.id/a/sejarah>, diakses 2 Desember 2023, 14.34 WIB.

³⁷ <https://nasional.tempo.co/read/539567/rano-karno-lantik-wali-kota-tangerang-besok>, diakses pada tanggal 28 November 2023, 05.24 WIB.



Gambar 4.11. Pelantikan Arief R. Wismansyah bersama Sachrudin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang oleh Wakil Gubernur Banten Rano Karno. Sumber: Republika



Gambar 4.12. Pelantikan Arief R. Wismansyah bersama Sachrudin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang oleh Gubernur Banten Wahidin Halim di Pendopo Gubernur Banten
Sumber: Pemerintah Kota Tangerang

Pada periode kedua, Arief Rachadiono Wismansyah terpilih kembali sebagai Wali Kota Tangerang pada Pemilihan Umum Wali Kota Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pada Pemilihan Kepala Daerah periode ini, Arief Rachadiono Wismansyah masih tetap berpasangan dengan Sachrudin sebagai Wakil Wali Kota. Arief Rachadiono Wismansyah dan Sachrudin dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Pada tanggal 26 Desember 2018 di Pendopo Gubernur Banten oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.

Pada saat pertama kali bertugas sebagai Wali Kota Tangerang tentunya Arief Rachadiono Wismansyah telah mengetahui situasi dan kondisi yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang karena sebelumnya pernah bertugas sebagai Wakil Wali Kota Tangerang pada masa Wahidin Halim. Layaknya seorang pemimpin tentu pada masa kepemimpinan Arief Rachadiono Wismansyah sebagai Wali Kota Tangerang terdapat berbagai macam program atau kebijakan yang inovatif yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat bahkan menjadi percontohan bagi wilayah lain. Beberapa program atau kebijakan yang digagas oleh Arief Rachadiono Wismansyah dapat disaksikan dari dua periode kepemimpinannya. Beberapa program atau kebijakan yang digagas di antaranya yaitu:

a. Tangerang Ayo

Tangerang Ayo merupakan program atau gerakan yang diluncurkan pada 28 Oktober 2014 oleh Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah. Tangerang Ayo merupakan slogan yang berisi ajakan kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk bersama-sama mewujudkan Kota yang nyaman, layak investasi, kota yang menjadi tujuan wisata dan juga kota digital. Program ini digagas karena melihat besarnya kompleksitas persoalan yang dihadapi di wilayah Kota Tangerang sehingga untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan tersebut perlu adanya keterlibatan dan kepedulian dari masyarakat.

Dengan slogan Tangerang Ayo, masyarakat menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam membangun lingkungannya, salah satunya dengan Program Bedah Rumah, Pemerintah Kota Tangerang bekerjasama dengan masyarakat telah berhasil membangun 4987 unit rumah.³⁸ Selain itu dengan slogan Tangerang Ayo ini digagas pula Kampung PHBS di mana PHBS merupakan sebuah akronim dari Pola Hidup Bersih dan Sehat. Dengan adanya Kampung PHBS ini berkat inisiatif warga hampir di setiap RW di Kota Tangerang sudah menjadi Kampung PHBS. Kampung PHBS menjadi sesuatu yang penting mengingat pola hidup masyarakat dianggap masih jauh dari harapan sehingga dengan digagasnya program ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

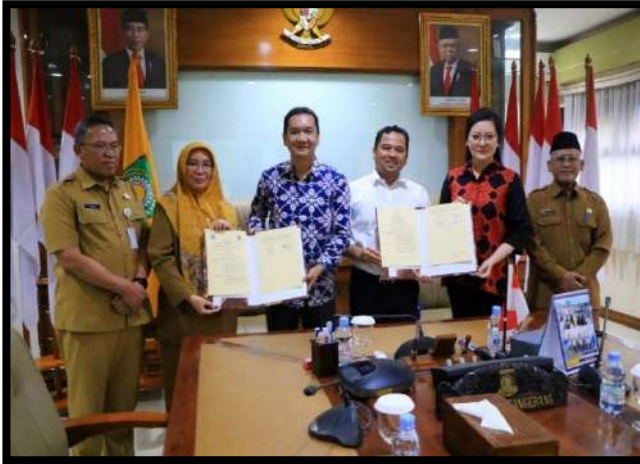
Slogan Tangerang Ayo juga menjadi nama transportasi publik berupa bus umum yang dinamakan Tayo atau Tangerang Ayo yang digunakan oleh masyarakat Kota Tangerang. Transportasi publik tersebut kini memiliki empat koridor yang melayani berbagai macam wilayah di Kota Tangerang termasuk daerah sekitarnya. Salah satu alasan transportasi publik ini diluncurkan adalah agar masyarakat kembali menggunakan kendaraan umum sebagai sarana transportasi dalam menjalankan segala aktifitasnya sekaligus menekan angka kemacetan yang saat ini termasuk tinggi dan juga menekan polusi yang dihasilkan dari asap kendaraan.

b. Tangerang LIVE

Tangerang LIVE merupakan salah satu program yang digagas oleh Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah pada periode pertama kepemimpinannya. LIVE merupakan sebuah akronom yang meliputi Liveable yakni Kota yang Layak huni, Investable yakni Kota yang layak investasi, Visitable yakni Kota yang layak dikunjungi dan E-City

³⁸<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/tangerang/pr-59612714/walikota-tangerang-raih-penghargaan-kepala-daerah-inovatif>, diakses tanggal 2 Desember 2023, 15.44 WIB.

yakni Kota Pintar. Program ini merupakan salah satu cara dari Pemerintah Kota Tangerang untuk mewujudkan konsep Smart City melalui Tangerang LIVE yang diharapkan dapat dirasakan langsung kehadiran serta manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kota Tangerang.



Gambar 4.13. Penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Poso Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2023
(Sumber: Pemerintah Kota Tangerang)

Tangerang LIVE juga menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia untuk dapat lebih mengetahui dan mempelajari sejauh mana konsep yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tersebut, salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Poso yang melakukan studi banding terkait dengan konsep Smart City yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang.³⁹ Dengan adanya kunjungan tersebut menandakan bahwa program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota

³⁹<https://tangerangkota.go.id/berita/detail/38861/bupati-poso-acungi-jempol-super-apps-tangerang-live> diakses pada tanggal 28 November 2023, 11.11 WIB.

Tangerang begitu berperan besar bagi masyarakat sehingga layak untuk di contoh oleh daerah lain di Indonesia.

Kota Tangerang sebagai kota yang layak huni, dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat menempati sebuah lingkungan dengan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai macam aspek. Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan kota layak huni adalah dengan mengadakan program bedah rumah bagi masyarakat sehingga memiliki hunian yang layak ditempati.⁴⁰ Pemerintah Kota Tangerang berusaha menjadikan wilayahnya sebagai tempat yang layak huni untuk semua masyarakat yang berada di Kota Tangerang.

Kota Tangerang sebagai kota yang layak investasi, dengan adanya program ini masyarakat menjadi dipermudah dalam melakukan berbagai macam perizinan dan hanya cukup menggunakan sistem online. Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan kota layak investasi adalah dengan memberikan kemudahan melalui Aplikasi Perizinan Online Terintegrasi 123. Sesuai namanya, inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang ini mengintegrasikan 123 jenis perizinan. Perizinan online ini telah memotong alur birokrasi dalam permohonan rekomendasi kepada OPD teknis terkait perizinan menjadi satu pintu melalui Sistem Perizinan Online.⁴¹

Kota Tangerang sebagai kota yang layak dikunjungi, dengan adanya program ini diharapkan masyarakat yang berada di Kota Tangerang maupun dari wilayah lain dapat berkunjung ke Kota Tangerang sebagai salah satu tempat yang memang layak untuk dikunjungi. Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan kota yang

⁴⁰<https://tangerangkota.go.id/berita/detail/30637/wujudkan-kota-layak-huni-7-032-rumah-di-kota-tangerang-telah-dibedah> diakses pada tanggal 28 November 2023.

⁴¹<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/wujudkan-kota-layak-investasi-tangerang-integrasikan-123-layanan> diakses pada tanggal 29 November, 05.44 WIB.

layak dikunjungi salah satunya adalah dengan membuat berbagai macam destinasi wisata yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke Kota Tangerang.

Destinasi wisata yang mampu untuk menarik minat para wisatawan di antaranya adalah wisata sejarah, wisata kuliner, wisata belanja dan wisata edukasi yang dapat menjadi andalan pariwisata di Kota Tangerang. Terbukti dengan adanya berbagai macam destinasi wisata yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang tersebut berhasil meningkatkan jumlah kunjungan dari para wisatawan yang datang berkunjung ke wilayah Kota Tangerang.

Kota Tangerang sebagai kota pintar atau Smart City, Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan kota pintar atau *smart city* adalah dengan memperkenalkan aplikasi Tangerang LIVE. Dengan aplikasi ini masyarakat dapat mengakses berbagai macam pelayanan publik Pemerintah Kota Tangerang dengan mudah dan juga mengakses berbagai macam informasi lainnya yang berhubungan dengan Kota Tangerang.

Sebagai informasi pada periode pertama kepemimpinannya dengan mengusung konsep Tangerang LIVE, pasangan Arief Rachadiono Wismansyah dan Sachrudin telah membawa Kota Tangerang meraih tak kurang dari 100 penghargaan baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang juga berhasil membangun sejumlah infrastruktur untuk mengatasi persoalan di masyarakat seperti pembangunan turap banjir, kampung tematik, dan juga program pendidikan.⁴²

⁴² <https://www.tangerangkota.go.id/berita>, diakses tanggal 28 November 2023.

c. Kampung dan Taman Tematik

Pada masa kepemimpinan Arief Rachadiono Wismansyah sebagai Wali Kota dibangun pula berbagai macam sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Tangerang di antaranya Taman Tematik dan Kampung Tematik. Pembangunan terhadap dua fasilitas publik ini mulai dilaksanakan pada masa periode pertama kepemimpinan Arief Rachadiono Wismansyah hingga periode kedua. Taman Tematik merupakan salah satu program yang dihasilkan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Taman Tematik yang dibangun oleh Pemerintah Kota Tangerang tersebar di berbagai macam wilayah di Kota Tangerang dan menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya.



Gambar 4.14. Taman Potret, salah satu taman tematik. Sumber: Liputan6

Taman Tematik merupakan sebuah taman rekreasi yang memiliki karakteristik khusus untuk mencirikan tempat tersebut dengan tema yang diusung dan dijadikan sebuah konsep. Taman Tematik yang tersebar di wilayah Kota Tangerang memang memiliki karakteristik tertentu sehingga memiliki keunikan tersendiri. Kehadiran berbagai macam taman tematik yang tersebar di berbagai macam wilayah di Kota Tangerang telah menjadi

destinasi wisata bagi masyarakat di Kota Tangerang dan luar wilayah Kota Tangerang. Selama ini konsep taman menurut penilaian masyarakat adalah seperti lazimnya taman pada umumnya namun Taman Tematik menghadirkan sesuatu yang berbeda bagi masyarakat sehingga taman tematik tidak hanya menjadi destinasi wisata saja namun lebih dari itu dapat menjadi sarana wisata edukasi bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Tangerang hingga tahun 2018 telah membangun tidak kurang dari 27 Taman Tematik, 52 Taman Lingkungan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mempercantik kota. Bahkan beberapa Taman Tematik yang ada seperti Taman Gajah dan Taman Potret tidak menggunakan dana yang berasal dari APBD, karena bersumber dari dana CSR perusahaan yang berada di Kota Tangerang.⁴³

Melihat banyaknya jumlah Taman Tematik yang berada di Kota Tangerang tentunya ini merupakan sebuah kepedulian dari Pemerintah Kota Tangerang untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakatnya sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Selain Taman Gajah dan Taman Potret terdapat pula Taman Pramuka dan Taman Herbal yang terletak tidak jauh dari Pusat Pemerintahan Kota Tangerang yang dapat menjadi salah satu tujuan destinasi wisata dan juga sarana edukasi sesuai dengan namanya bagi masyarakat.

Selain Taman Tematik terdapat pula Kampung Tematik yang berada di wilayah Kota Tangerang yang dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan destinasi wisata oleh masyarakat. Seperti Taman Tematik, Kampung Tematik juga memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dari setiap kampung yang ada. Kehadiran Kampung Tematik menjadi salah satu daya tarik wisata yang layak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan. Kota Tangerang sendiri memiliki beberapa Kampung Tematik yang dapat menjadi sarana edukasi dan informasi bagi masyarakat

⁴³<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/16338/taman-terbuka-buat-kegiatan-masyarakat> diakses pada tanggal 3 Desember 2023, 16.20 WIB.

sehingga sangat menarik untuk dikunjungi. Terdapat beberapa Kampung Tematik yang tersebar di berbagai macam wilayah di Kota Tangerang di antaranya yaitu Kampung Bekelir, Kampung Markisa, Kampung Danau Kalpataru, Kampung Pink dan berbagai macam kampung lainnya yang juga memiliki kekhasannya masing-masing.



Gambar 4.15. Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah meresmikan Kampung Bekelir sebagai Kampung Wisata pada tahun 2017. Sumber: Berita Tangerang

Program pembentukan Kampung Tematik oleh Pemerintah Kota Tangerang secara tidak langsung memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar yang berada di kawasan tersebut salah satunya dalam bidang ekonomi. Adanya Kampung Tematik yang kemudian menjadikan kawasan ini sebagai salah satu tujuan destinasi wisata ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan kepada besarnya jumlah kunjungan dari para wisatawan yang datang berkunjung ke Kampung Tematik ini. Pada akhirnya banyak masyarakat sekitar yang kemudian membuka berbagai macam usaha setelah wilayahnya tertata rapi dengan adanya Kampung

Tematik. Penerapan ini sudah dilakukan di salah satu Kampung Tematik dan masih tetap berjalan hingga saat ini di kampung tersebut.



Gambar 4.16. Kunjungan Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah ke Kampung Grendeng Pulo (Grenpul) pada tahun 2023.
Sumber: Pemerintah Kota Tangerang

Keindahan dan keunikan Kampung Tematik tersebut menjadi salah satu daya tarik sehingga berdampak kepada hadirnya wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dalam bidang ekonomi, manfaat dari Kampung Tematik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam potensi yang diangkat. Misalnya Kampung Bekelir yang telah banyak dikunjungi masyarakat dan berhasil menjual cinderamata sebagai oleh-oleh setelah berkunjung ke kampung tersebut. Posisi kampung yang berada di dekat Sungai Cisadane, juga berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk menyiapkan kuliner.⁴⁴ Hal ini menjadi salah satu bukti dengan hadirnya Kampung Tematik dapat

⁴⁴<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/16586/manfaat-kampung-tematik-bidang-ekonomi-kesejahteraan-warga-meningkat-banyak-usaha-baru-muncul>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023, 16.30 WIB.

berdampak kepada kehidupan masyarakat sekitar dengan berbagai macam usaha yang dibuat dapat menunjang terhadap kehidupan sehari-hari.

d. Pembangunan Jembatan Berendeng

Selama masa kepemimpinan Wali Kota Arief Rachadiono Wismansyah dibangun pula berbagai macam fasilitas yang kemudian menjadi landmark bagi Kota Tangerang. Salah satu yang dibangun adalah Jembatan Berendeng yang menghubungkan wilayah Benteng Makasar di Kecamatan Tangerang dengan wilayah Gerendeng di Kecamatan Karawaci. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh Sungai Cisadane yang sangat bersejarah dan juga sudah menjadi identitas Tangerang.

Asal muasal nama Jembatan Berendeng merupakan gabungan dari dua wilayah tersebut yaitu Benteng Makassar dan Gerendeng. Dikabarkan bahwa pada jaman dahulu, para pemuda antarwilayah ini seringkali terlibat dalam perkelahian yang berujung tawuran. Dengan hadirnya jembatan ini, maka ia secara simbolis juga menjadi penyambung hubungan sosial-budaya antarwilayah sekaligus mampu menjembatani perbedaan antarkelompok masyarakat di kedua wilayah.

Jembatan Berendeng diresmikan penggunaannya pada tanggal 4 Februari 2017 oleh Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah. Jembatan ini merupakan salah satu fasilitas publik yang dibangun untuk mengurangi kemacetan di ruas Jalan Daan Mogot dan ruas Jalan Karel Satsuit Tubun. Namun Jembatan Berendeng kini lebih dikenal sebagai salah destinasi wisata baru yang berada di Kota Tangerang. Masyarakat dari berbagai macam wilayah baik di Kota Tangerang maupun luar Kota Tangerang datang berkunjung ke jembatan ini.



Gambar 4.17. Jembatan Berendeng yang menjadi salah satu landmark baru di Kota Tangerang. Sumber: Info Publik

Jembatan Berendeng memiliki bentuk yang unik sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang berkunjung. Jembatan ini dikenal pula dengan Jembatan Kaca karena memiliki flying deck kaca yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berfoto serta dapat melihat Sungai Cisadane dari atas jembatan. Ketika Akhir pekan Jembatan Berendeng akan ditutup untuk kendaraan agar masyarakat bisa menikmati keindahan jembatan ini serta dapat mengabadikan setiap momentum yang ada, selain akhir pekan jembatan ini akan dibuka kembali untuk kendaraan.

e. Revitalisasi Stadion Benteng

Pada masa kepemimpinan Arief Rachadiono Wisnansyah sebagai Wali Kota Tangerang salah satu program yang dilakukan adalah merevitalisasi Stadion Benteng yang berada di pusat Kota Tangerang. Revitalisasi yang dilakukan terhadap stadion kebanggaan bagi masyarakat Kota Tangerang tersebut mulai dilakukan pada tahun 2020. Sebelum dilakukan renovasi oleh Pemerintah Kota Tangerang, stadion ini tidak digunakan untuk

kompetisi resmi sehingga tidak ada aktifitas terhadap stadion ini selama beberapa tahun.



Gambar 4.18. Pembukaan Pekan Olah Raga Penyandang Kusta Nasional I Tahun 1988 di Stadion Benteng. Sumber: Arsip Ibu Siti Hardiyanti Rukmana

Stadion Benteng sendiri sebelumnya merupakan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yang digunakan sebagai Markas Klub Sepak Bola Persita Tangerang saat mengikuti kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh PSSI. Dalam sejarahnya setelah terbentuknya Persikota Tangerang pada tahun 1994 maka stadion ini digunakan oleh kedua klub sebagai markas bersama. Bahkan kedua klub pernah bermain bersama pada kompetisi teratas yang diselenggarakan oleh PSSI yaitu Liga Indonesia. Kedua klub pernah bertanding bersama di kompetisi tersebut sehingga memunculkan istilah “Derby Tangerang” antara Persita Tangerang dan Persikota Tangerang. Saat ini baik Persita Tangerang maupun Persikota Tangerang masih tetap bermain di kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh PSSI di mana Persita Tangerang bermain di Liga 1 sedangkan Persikota Tangerang bermain di Liga 3.



Gambar 4.19. Stadion Benteng setelah direnovasi dan berganti nama menjadi Stadion Benteng Reborn. Sumber: Banten News

Selain digunakan oleh kedua klub dalam mengarungi kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI, stadion ini pernah digunakan pula dalam berbagai macam kegiatan. Dalam sejarahnya Stadion Benteng pernah digunakan sebagai arena Pekan Olah Raga Penyandang Kusta Nasional I pada tahun 1988 dan dihadiri oleh Ibu Negara, Tien Suharto. Dalam perkembangannya terdapat regulasi yang dibuat oleh PSSI terkait dengan layak tidaknya sebuah stadion dapat digunakan dalam kompetisi yang diselenggarakan. Dengan adanya regulasi ini membuat Stadion Benteng tidak dapat menyelenggarakan pertandingan sehingga klub Sepak Bola yang bermarkas di stadion tersebut mencari stadion pengganti yang layak sesuai regulasi yang ditetapkan oleh PSSI. Persita Tangerang pada akhirnya membangun stadion baru di Kecamatan Kelapa Dua yang saat ini digunakan untuk mengarungi kompetisi Liga 1.

Pada tahun 2018 terjadi penyerahan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap berbagai macam aset yang selama ini berada di Kota Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang

termasuk di dalamnya adalah penyerahan terhadap Stadion Benteng.⁴⁵ Dengan adanya penyerahan tersebut, Stadion Benteng menjadi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

Renovasi selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2020 di mana konsep yang diusung adalah *sportainment* di mana stadion ini berfungsi bukan hanya sebagai sarana olah raga namun juga menjadi lokasi hiburan dan juga tempat rekreasi bagi masyarakat.⁴⁶ Dalam revitalisasi yang dilakukan tersebut adalah menghilangkan tribun penonton yang berada di sisi kanan dan kiri stadion. Setelah proses revitalisasi rampung maka pada tanggal 4 Februari 2022 Stadion Benteng diresmikan penggunaannya oleh Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, selain itu dalam peresmian itu dilakukan pula penggantian terhadap nama stadion yang sebelumnya Stadion Benteng diubah menjadi Stadion Benteng Reborn.

f. Kebijakan Sekolah Gratis

Salah satu kebijakan yang dilakukan menjelang masa akhir kepemimpinan Arief Rachadiono Wismansyah adalah kebijakan sekolah gratis untuk masyarakat Kota Tangerang di Tingkat SD dan SMP baik sekolah Negeri maupun Swasta. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa sekolah gratis tidak hanya dilakukan untuk sekolah Negeri saja melainkan juga sekolah Swasta sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ketika menyekolahkan anaknya tidak akan ada biaya yang dikelurakan. Kebijakan sekolah gratis yang dilakukan oleh Pemerintah

⁴⁵<https://banten.antaranews.com/berita/32545/pemkab-serahkan-stadion-benteng-ke-pemkot-tangerang> diakses pada tanggal 4 Desember 2023, 10.40 WIB.

⁴⁶<https://sport.republika.co.id/berita/r6s552456/stadion-benteng-tangerang-resmi-berganti-nama-renovasi-besarbesaran-juga-dilakukan> diakses pada tanggal 4 Desember 2023, 11.00 WIB.

Kota Tangerang tersebut dilakukan terhadap 146 sekolah swasta dengan rincian 73 tingkat SD dan 73 tingkat SMP.

Kebijakan sekolah gratis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang khusus untuk sekolah swasta adalah biaya pendaftaran, biaya ujian, biaya ulangan, biaya praktik, biaya bangunan, biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), biaya organisasi siswa intra sekolah (OSIS), dan lain sebagainya.⁴⁷ Kebijakan sekolah gratis ini berlaku masyarakat Kota Tangerang yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau identitas lainnya. Dengan adanya program ini tentunya sangat berguna bagi masyarakat Kota Tangerang karena memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sehari-hari khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga membutuhkan bantuan semacam ini.

Adanya kebijakan sekolah gratis ini diharapkan bagi masyarakat yang putra-putrinya tidak dapat masuk ke sekolah negeri pada saat dilaksanakannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah swasta. Selama ini masyarakat masih menganggap jika menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah swasta akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit sehingga masyarakat berusaha untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah negeri. Dengan kebijakan sekolah gratis yang dilakukan terhadap sekolah swasta ini menjadi salah satu solusi dari Pemerintah Kota Tangerang agar masyarakat memiliki banyak pilihan untuk tetap bisa bersekolah agar tidak ada lagi generasi muda di Kota Tangerang yang putus sekolah.

⁴⁷<https://regional.kompas.com/read/2023/06/08/19344181/pemkot-tangerang-gratisk-an-biaya-sekolah-di-146-sd-smp-swasta-pengamat?page=all> diakses pada tanggal 4 Desember 2023, 12.01 WIB.

BAB 5

TANGERANG KOTA PASCAINDUSTRI

Mushab Abdu Asy Syahid

A. Tangerang Kota Industri

Pembangunan yang terpusat di antara hubungan kota besar dan kota pinggiran memicu hadirnya aglomerasi, yaitu mengelompoknya atau terpusatnya kegiatan swasta dan pemerintahan di wilayah kota pusat. Jakarta sebagai inti (*core*) dikelilingi wilayah penyangganya (*urban fringes*). Pola yang sama ditemukan di kota-kota lain. Hal ini berakibat pada tingginya biaya hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi, seperti kebutuhan lahan baik untuk hunian maupun industri, yang semakin lama ikut berdampak ke pembangunan kota penyangga seperti Kota Tangerang, dan menjadi salah satu titik awal sejarah berdirinya Kota Tangerang itu sendiri.

Konsep “megapolitan” yang disebut oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin (1966-1977), dan begitu juga pada era pemerintahan Orde Baru, konsep pembangunan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1976 menetapkan wilayah Tangerang sebagai daerah penyangga, area industri dan perumahan di kawasan Jabotabek guna mengurangi kepadatan penduduk dan industri di ibukota. Ide juga ini beriringan dengan kebijakan pembangunan bandara Soetta pada masa yang sama. Hal itu semakin diperkuat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 1989, di mana Pemerintah Pusat mengalokasikan sekitar 3.000 hektar tanah di Tangerang menjadi zona industri besar.

Tepat pada tahun yang sama ketika Pemerintahan Kotamadya Tangerang berdiri, keluar pula inisiasi paket kebijakan deregulasi dan debirokrasi *Pakto '93* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 98 tahun 1993 tentang Kawasan Industri, serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 3 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Tangerang yang ikut mengubah konfigurasi ruang secara besar-besaran lahan Tangerang, baik dalam wilayah administratif kabupaten maupun kota ikut berdampak.⁴⁸



Gambar 5.1. Pembukaan Industri Sepeda, Induk Koperasi Pegawai Negeri di Batu Ceper, Tangerang yang dibuka Soeharto pada 12 Juli 1974. Sumber: Tim Dokumentasi Soeharto.org

⁴⁸ Asmadi (2001), *Tingkat Kebutuhan dan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Perumahan di Kabupaten Tangerang tahun 1993-1999*, Tesis Magister (S-2) Ilmu Geografi Program Pascasarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UI.

Tangerang lantas menjadi kawasan “Sejuta Buruh”. Buruh yang dimaksud ialah buruh produksi, sebelum adanya UMR mereka mendapat upah rendah karena dianggap alat produksi yang murah dan mudah. Pabrik-pabrik produksi manufaktur dan padat karya seperti garmen, sepatu, olah kayu untuk kebutuhan dalam dan luar negeri. Pemasok jumlah persediaan tenaga kerja besar lebih banyak berasal dari kaum pendatang. Pembangunan kompleks industri pun ditemukan subur di sepanjang Jalan Daan Mogot penghubung Jakarta dan Tangerang, membentang dari Cengkareng ke Batu Ceper, Tangerang, Jatiuwung dan Benda. Menurut *Kotamadya Tangerang Dalam Angka* (1995), Kotamadya Tangerang telah menampung 756 perusahaan industri yang beroperasi pada tahun 1995.

Pada tahun 1999 ketika peraturan otonomi daerah dikeluarkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Kota Tangerang telah mengalami transformasi struktur perekonomiannya dari agraris menjadi industri dan perdagangan. Kendala meliputi ketersediaan sumber daya yang terbatas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kondisi kemiskinan, pengangguran, dan kurang optimalnya kualitas sumber daya aparatur pengelolaan.

Interaksi masyarakat lokal Kota Tangerang dengan infrastruktur industri juga menarik untuk disimak. Bagaimana hubungan sosial-ekonomi antara penduduk kampung dengan bandara Soetta, dapat diilustrasikan melalui wawancara terhadap seorang pensiunan pegawai PT. Angkasa Pura II yang menjabat sebagai penanggung jawab lapangan atau *Airport Duty Manager* di Terminal 3 Soetta. Ia dan keluarganya merupakan bagian dari kelompok masyarakat Betawi pinggir (Betawi Ora) yang tinggal di Kampung Rawa Burung dan Bojong Renged, yang lokasinya dekat dengan Soetta setelah mengalami pembebasan lahan dari Kecamatan Benda.

Narasumber mengakui bahwa tidak banyak warga lokal yang berkesempatan untuk bekerja menjadi pegawai tetap di bandara, kecuali hanya sedikit saja. Ia sendiri bekerja di Angkasa Pura II sejak tahun 1983,

dari awalnya hanya sebagai buruh kontrak di bawah perusahaan kontraktor COLAS dari Perancis selama proyek konstruksi bangunan terminal 1. Pekerjaan awalnya melibatkan pemantauan produksi dan distribusi material batu kali untuk konstruksi *runway* dan lainnya. Setelah kontraknya berakhir tahun 1985, statusnya naik menjadi pegawai tetap di bawah JICA dan turut melibatkan diri dalam proyek-proyek penting di bandara.



Gambar 5.2. Plang pengumuman tanah milik persero untuk perluasan bandara. Sumber: Dokumentasi arsip

Selain pekerjaan di bandara, narasumber juga mengejar pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Syech Yusuf, Tangerang, dan lulus pada tahun 1995. Dengan latar belakang akademik ini, ia menjadi salah satu *legal manager* senior di Soetta, mengurus berbagai aspek legalitas manajemen dan proyek-proyek pembangunan bandara. Pada tahun 2015, ia terlibat dalam proyek perluasan bandara yang melibatkan pembebasan lahan di wilayah Rawa Burung dan Rawa Rengas tempat ia tinggal, untuk membangun *runway* dan terminal baru di sisi utara. Ia pun diakui sebagai “orang nomor 1 hukum” di bandara Soetta karena perannya dalam mengurus legalitas manajemen dan proyek-proyek pembangunan serta menjadi penghubung atau mediator yang baik dengan masyarakat.

Ia memberikan pandangannya tentang teritorialitas lahan Soetta, pengurusan dokumentasi pertanahan, dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Narasumber juga mencatat perbedaan sistem pembebasan tanah antara pembangunan terminal 1 dan 2 pada tahun 1980-1990-an dengan pembangunan terminal 3 pada tahun 2016-2017, di mana harga lahan pada tahun 2016-2017 semakin menurun. Ia juga menggambarkan kondisi sekitar proyek pembangunan bandara pada tahun 1975 ketika ia masih berusia 13 tahun, banyak rumah berkelompok dan area persawahan di Benda mengalami pembebasan lahan untuk konstruksi terminal 1 bandara. Penduduk Betawi Ora yang terdampak lebih banyak berpindah dan mencari tempat tinggal ke arah barat Tangerang, seperti di daerah Sepatan dan Lebak Wangi, atau ke arah utara seperti di Rawa Rengas dan Rawa Burung tempat ia dan keluarga bertinggal saat ini.

Sebagai seorang *Airport Duty Manager*, ia juga memiliki peran dalam operasional utama di dalam Terminal 3, termasuk seleksi pegawai dan memberikan informasi pekerjaan bagi penduduk yang terdampak pembebasan lahan akibat proyek bandara. Sekitar 150 warga lokal ditempatkan di Angkasa Pura Solusi, yang sebagian besar berusia relatif muda (18-25 tahun) dan dipekerjakan sebagai karyawan kontrak di bagian pelayanan, pengamanan, dan operasional, misalnya *terminal inspection* dan *maintenance* seperti staf *aviation security*, *apron security*, *cleaning service*, hingga *office boy*. Malahan, ada rekan sebayanya yang sejak tahun 1985 hingga saat wawancara ini berlangsung (2017), masih bekerja sebagai *cleaning service*.

Menurutnya sebagai warga lokal, kualitas SDM penduduk sekitar bandara belum mampu bersaing dengan penduduk Jakarta dan orang-orang Jawa. Ia mengatakan, “*Di bandara kue [lapangan pekerjaan] banyak, tapi bagaimana cara ngambilnya... Banyak yang manja.*” Tingkat kesadaran akan pendidikan juga menghambat bekerja di Angkasa Pura II atau bandara Soetta. Dari keterangan informasi ini, perlu digaribawahi mengenai adanya pergeseran profesi penduduk lokal dari basis pertanian ke basis industri.

Karakteristik wilayah Kota Tangerang dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial-ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Faktor-faktor seperti kependudukan, perkembangan industri dan perdagangan, serta kehidupan sosial masyarakat memberikan dampak yang signifikan. Kebijakan pembangunan awal di Kota Tangerang akhirnya lebih terfokus ke peningkatan sarana fisik untuk mendorong perekonomian dan peningkatan pendidikan dan demi mendukung kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi industrialisasi dan perdagangan. Namun, pengembangan lembaga perekonomian mikro yang berorientasi pada layanan kepada warga masih perlu banyak perhatian.



Gambar 5.3. Gadis berbaju korporat PT. Mayora dalam perjalanan berangkat kerja di Batu Ceper tahun 1995. Sumber: Daniel Koning

Mobilitas urban yang didukung hadirnya teknologi infrastruktur transportasi mendorong adanya aglomerasi antara batas-batas wilayah pusat dan wilayah pinggir, menghadirkan kecepatan pergerakan manusia yang intensif dan membentuk pola urban baru. Dengan hadirnya kompleks bandara juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta

meningkatkan perpindahan manusia menuju ke pinggir kota Jakarta, alias ke Tangerang. Banyaknya warga Jakarta yang menjadi pelaju (*commuter*) yang akhirnya bermukim di Kota Tangerang dan bekerja di Jakarta, sedangkan kawasan industri lebih banyak diisi oleh masyarakat dari Kabupaten Tangerang. Mereka lebih banyak merupakan masyarakat pendatang dari pulau Jawa yang menjadi karyawan pabrik. Pada tahun 2002, Walikota Wahidin Halim melaporkan dalam bukunya bahwa di wilayah kota sendiri terdapat 52 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang diisi oleh tenaga kerja lokal dan asing yang berasal dari Asia seperti Jepang, Taiwan, Hongkong, Singapura, serta Eropa dan Amerika. Jenis produk yang dihasilkan yaitu sepatu, alat elektronik, komponen otomotif, garmen dan pangan.⁴⁹

Dalam kurun waktu tahun 1990-1995, kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun, terdapat lebih banyak tenaga kerja perempuan daripada laki-laki. Ini disebabkan oleh minat tinggi tenaga kerja perempuan dalam industri garmen dan sepatu. Pada tahun 1990 dan 1993, persentase tenaga kerja perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun adalah 56,44% dan 56,58%. Sementara itu, untuk kelompok umur 20-24 tahun, persentasenya adalah 51,22% tahun 1992 dan 51,17% tahun 1993. Pertumbuhan ekonomi, terutama sektor listrik, gas, dan air, menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 1992-1993, kecuali dalam sektor pertanian. Indikator ini mencerminkan tingginya permintaan karena pertumbuhan sektor industri, konstruksi, sewa rumah, perbankan, perdagangan, dan restoran.

B. Tangerang Kota Hunian

Pertumbuhan penduduk di Kotamadya Tangerang, khususnya selama kurun waktu 1992-1995, meningkat secara signifikan dan didominasi oleh migrasi, dari 1.083.071 jiwa menjadi 1.464.738 jiwa atau naik rata-rata 11,36 persen per tahunnya. Kenaikan rata-rata penduduk per

⁴⁹ *Kota Tangerang dalam Angka*, 2002, dalam Wahidin Halim (2005), hlm. 89-91.

tahun tertinggi terjadi di Kecamatan Ciledug (14,91%), Cipondoh (12,82%), Jatiuwung (11,86%), dan Tangerang (10,62%), sedangkan Batuceper (7,20%) dan Benda (5,32%) memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih rendah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh peruntukan wilayah dan pengembangan kegiatan di masing-masing kecamatan. Kecamatan Cipondoh dan Ciledug yang memiliki permukiman skala besar mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi (12,82%). Pertambahan penduduk cukup tinggi berikutnya adalah Kecamatan Jatiuwung (11,86%), karena dikembangkan untuk industri sekaligus permukiman pada tapak-tapak tertentu. Pengaruh pengembangan daerah industri pada Kecamatan Jatiuwung menyebabkan pertambahan rata-rata penduduk per tahunnya hampir sama dengan penduduk per tahun pada Kecamatan Cipondoh.

Dalam konteks tersebut, sayangnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1989 mengenai alokasi lahan industri sebesar 3.000 hektar tidak diiringi dengan kebijakan perumahan secara bersamaan. Kebijakan perumahan baru dirancang melalui Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kotamadya Tangerang Tahun 1994-2010, satu tahun setelah daerah ini menjadi kota terpisah dari kabupaten. Pola permukiman, baik perkampungan informal maupun klaster perumahan elit, cenderung dibangun tanpa dasar perencanaan tata ruang kota dan berjalan secara autopilot. Hal ini menyebabkan maraknya pembangunan *real estate* dan perumahan elit bermodel komunitas tergerbang (*gated community*), karena selain belum terdapat kepercayaan masyarakat urban sebagai pendatang baru terhadap keamanan lingkungan di kota industri, hal ini juga sebagai dampak gaya hidup modern yang semakin eksklusif dan individualistis.

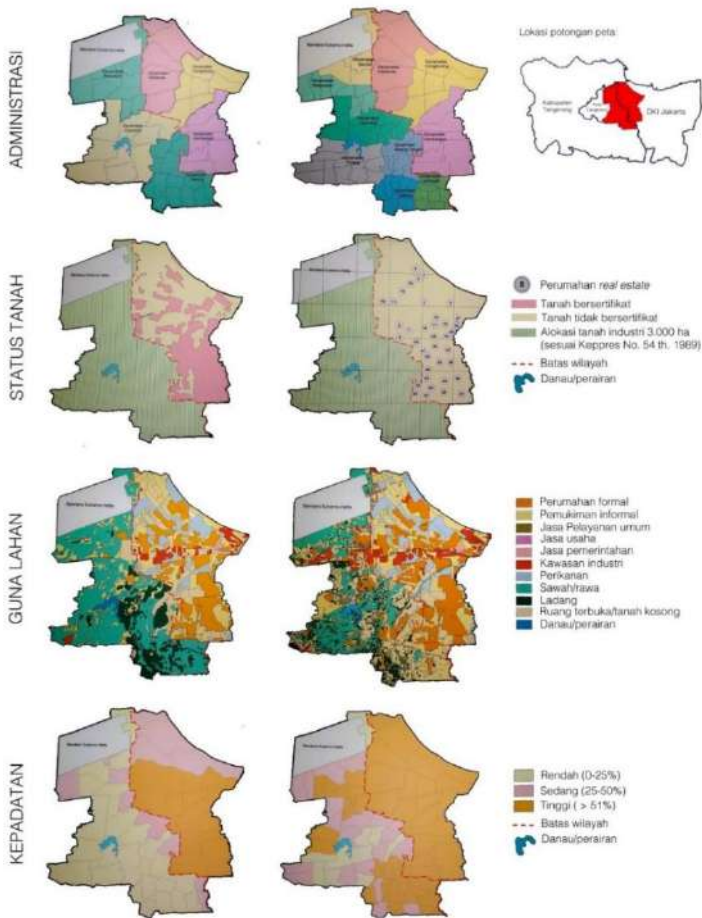
Menurut Asoit (2003), area industri yang terletak di sekitar bandara Soetta di Tangerang dan berdekatan dengan Jakarta menghasilkan pola *urban sprawl*, yaitu merembetnya peruntukan lahan yang acak dan menyebar, tidak terencana, tidak teratur, yang terjadi di wilayah pinggiran atau di wilayah sekitar kota (*urban periphery*) dalam waktu akibat

pembangunan pascaindustri. Proses mengkota di wilayah perbatasan antara Jakarta dan Tangerang semakin membedakan karakteristik Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang, akibat urbanisasi yang menyebabkan bergesernya kehidupan masyarakat kota dari komunitas pertanian sejak abad ke-18 di Jawa ke komunitas industri. (**Gambar 5.4**)

Beberapa kecamatan di Kota Tangerang, terutama Cipondoh, Jatiuwung, dan Cileduk, menjadi fokus utama pengembangan perumahan dan industri. Pengembangan perumahan tetap dilakukan meskipun tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotamadya Tangerang. Kecamatan Tangerang, sebagai pusat kota dan perdagangan, telah memiliki kawasan perumahan yang berkembang. Sebaliknya, Kecamatan Benda, yang didominasi oleh infrastruktur bandara, memiliki sedikit pengembangan hunian karena keterbatasan lahan akibat kebutuhan menyangga pelayanan dan fasilitas bandara.

Pada tahun 1992, terdapat pengaruh signifikan dari kepadatan penduduk terhadap perluasan lahan terbangun untuk perumahan. Namun, pada tahun 1995, pengaruh ini menurun, menunjukkan bahwa kepadatan penduduk memiliki dampak lebih rendah terhadap luas lahan terbangun untuk perumahan. Hal ini disebabkan kurangnya pembangunan perumahan baru pada tahun 1995 dan lebih fokus pada pengisian rumah yang sudah ada. Selain itu, kepadatan penduduk di Kecamatan Tangerang juga berkontribusi pada perluasan pembangunan perumahan ke arah vertikal, mengingat banyaknya rumah dan toko yang sudah terbangun.⁵⁰

⁵⁰ Mursiwan Taqim (1997), *Analisis Dinamika Penduduk terhadap Perubahan Fungsi Lahan di Kotamadya Tangerang*, Tesis Magister (S2) Pascasarjana Prodi Ilmu Lingkungan UI.



Gambar 5.4. Perubahan zona wilayah perbatasan Jakarta dan Tangerang antara tahun 1990 (kiri) dan tahun 2000 (kanan), yang ikut mendorong pemekaran wilayah. Sumber: BPS dan Asoit, 2003, telah diolah kembali

Menurut **Gambar 5.4**, fenomena keruangan yang diteliti di antara wilayah Kota Tangerang dan wilayah Jakarta Barat dapat diterangkan

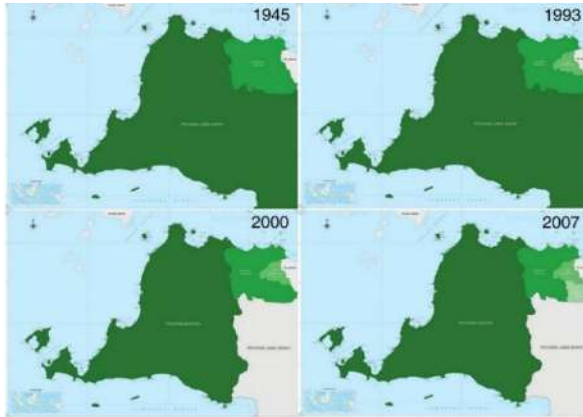
melalui pola dan karakteristik kegiatan ekonomi, industri, dan permukiman. Di wilayah perbatasan, ditentukan faktor harga tanah yang cenderung lebih murah dan terjangkau semakin mengarah ke pinggiran kota (*urban fringes*). Kecenderungan ini juga mengikuti kurva nilai sewa yang semakin menurun ke arah pinggiran kota. Hal ini dapat terlihat dari maraknya pembangunan kawasan perumahan dan peradaban kota baru seperti Perumnas Tangerang sebagai perumahan nasional terbesar di Indonesia, selain juga model kota satelit dan kota mandiri seperti Bumi Serpong Damai (BSD) berkembang di Tangerang raya, yang kelak juga mendorong pemekaran wilayah Tangerang Selatan pada tahun 2007.



Gambar 5.5. Perumahan *real estate* Banjar Wijaya, Cipondoh yang mengimpor bentuk arsitektur Yunani-Romawi. Lihat bangunan jam besar di depan kompleks meniru Big Ben di Inggris. Sumber: Google Maps, 2017

Dengan demikian, pola permukiman dan perumahan di Kota Tangerang, begitu pula juga dinamika pemekaran wilayah administratif, mengikuti pola perkembangan kawasan industri. Terdapat sebaran struktur dan peruntukan ruang tidak teratur berupa wilayah industri, pemukiman teratur, pemukiman tidak teratur, jasa dan perdagangan sesuai wilayah penduduk yang padat. Keruangannya mengikuti sepanjang Jalan

Daan Mogot dan sekitar area bandara Soetta. Karakteristik kota besar dan kota kecil di perbatasan menciptakan heterogenitas ruang, sekaligus menaikkan tensi kewilayahan (*territorial tension*).



Gambar 5.6. Transformasi wilayah administratif Tangerang, Banten dan Jawa Barat. Sumber: Peta Provinsi Banten, Badan Geografi Spasial

Pengotaan wilayah Kotamadya Tangerang pada era pascareformasi secara berangsur mengubah pola kehidupan “Kota Seribu Buruh” menjadi “Kota Seribu Industri Sejuta Jasa”, yang menawarkan lebih beragam lagi model bisnis dan ekonomi kota selain sektor produksi bahan mentah. Meningkatnya kemakmuran dan otonomi daerah membuat otoritas kota mampu mengatur arahan dan identitas kotanya secara mandiri. Usaha tersebut dapat dilihat, misalnya melalui kebijakan pembangunan berupa desain bangunan perkantoran resmi milik pemerintah daerah di kawasan pemerintahan kota. Pencarian konsep dan inspirasi dari arsitektur lokal Melayu-Betawi, yang bercampur baur dengan pengaruh unsur budaya Sunda dan Cina Benteng, dianggap akar budaya dan identitas resmi kota.



Gambar 5.5. Pusat pemerintahan Kota Tangerang. Sumber: *BantenMaps*



Gambar 5.6. Masjid Raya Al A'zhom. Sumber: *Balai Kota Tangerang*

Pada Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, elemen religiusitas seperti kubah, menara, dan simbol-simbol keagamaan menjadi ciri khas pada desain arsitektur masjid, khususnya Masjid Raya Al-Azhom. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah di pusat pemerintahan, tetapi juga dianggap sebagai masjid terbesar pada zamannya. Penggunaan elemen religius dalam arsitektur tersebut terkait dengan visi-misi kota yang ingin menonjolkan nilai keagamaan, tercermin dalam slogan "Akhlaqul Karimah". Kubah menjadi simbol moral inti kota gerbang negara.⁵¹

⁵¹ Lihat catatan kaki Abidin Kusno, "The Reality of One-Which-is-Two", hlm. 305-306.

C. Permasalahan Kota Pascaindustri

Kota Tangerang, terutama setelah periode industrialisasi, menghadapi tantangan besar dengan peran serikat pekerja yang terbatas dan meningkatnya keresahan buruh. Meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi di kawasan industri yang berkembang, upah minimum sering tidak dipenuhi dengan cermat oleh pemilik perusahaan asing. Sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabotabek, Kota Tangerang menunjukkan rekor pertumbuhan produksi yang cepat, akan tetapi juga menghadapi masalah upah terendah di Asia Tenggara pada tahun 1994.⁵²

Di tahun yang sama, buruh pabrik di Kota Tangerang melakukan demonstrasi, melibatkan ribuan pekerja yang meminta upah minimum harian baru dan hak membentuk serikat pekerja. Demonstrasi serupa terjadi di kota-kota lain seperti Semarang, Jakarta, dan Bekasi, mencerminkan tantangan dalam kota pasca-industri. Pemogokan pekerja terjadi di sekitar Jakarta, termasuk Tangerang dan Bekasi, melibatkan sebanyak 13.000 pekerja. Menteri Tenaga Kerja mencabut undang-undang yang memicu pemogokan, disebutkan ada tekanan militer dan ancaman Amerika terhadap hak istimewa perdagangan Indonesia. Meskipun demikian, harapan perbaikan lebih lanjut tetap ada.⁵³

Dalam konteks ini, perlu dicermati bagaimana masyarakat Kota Tangerang pascaindustri menghadapi isu ketenagakerjaan sebagai dampak pembangunan modern kota yang semakin nyata. Ekses ekonomi pun akhirnya merambat pada ekses sosial dan politik, yang puncaknya terjadi beberapa tahun ke depan, ketika menyambut tahun 1998.

⁵² P. Jongeling, et.al., *Nederlands dagblad: gereformeerd*, 5 Mei 1994.

⁵³ "Indonesiërs staken voor uitbetaling van minimumloon," *De Volkskrant*, 19 Januari 1994.

BAB 6

RIAK SEJARAH TRAGEDI 1998 DI TANGERANG DALAM KENANGAN KOLEKTIF

M. Alfian Nugraha Fauzi

“Biarlah waktu mencatat tentang sejarah tragedi yang tak boleh terulang lagi. Jangan pernah darah tumpah antar saudara setanah air ini, tak perlu api-api berkobar dan asap membumbung tinggi menyesakkan jiwa menumpahkan air mata Indonesia Raya hanya karena sebuah perbedaan yang sesungguhnya merupakan Rahmat Tuhan”

Sepenggal kalimat tersebut merupakan salah satu pengingat di sebuah tugu penanda yang berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Selapajang Jaya tentang sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di Kota Tangerang. Dalam sejarah panjang perjalanan Kota Tangerang sejak berdiri pada tahun 1993 hingga saat ini pernah terjadi satu peristiwa kelam yang memakan hingga banyak korban jiwa. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1998 tepatnya di bulan Mei dimana ketika itu terjadi suatu upaya untuk menuntut pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto untuk mundur dari kekuasaannya yang ternyata mengalami dampak yang luas hingga menyebar ke Kota Tangerang.

Upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan juga masyarakat pada masa itu karena melihat Rezim Orde Baru yang telah lama berkuasa kurang lebih selama 32 tahun dan juga melihat berbagai macam penyimpangan yang dilakukan selama kepemimpinan Presiden Suharto sehingga dilakukan upaya untuk melengserkan Presiden Suharto dari jabatannya sebagai presiden. Terjadinya Krisis Moneter yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia hingga membuat perekonomian Indonesia pada masa itu terpuruk berdampak pula terhadap masyarakat yang banyak

kehilangan pekerjaan akibat banyaknya perusahaan menutup usahanya sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

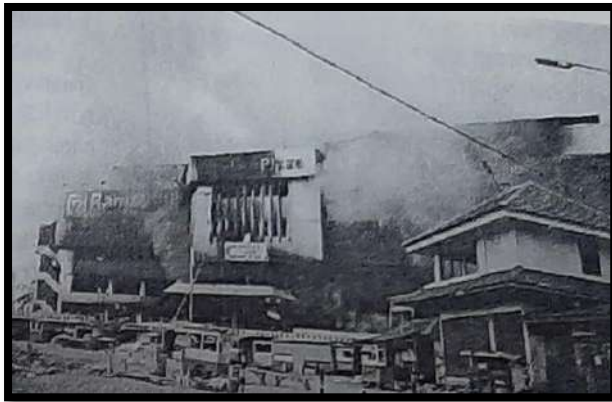
Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut melibatkan banyak pihak yang dimotori oleh para mahasiswa pada saat itu dengan menggelar aksi demonstrasi menuntut mundurnya Presiden Suharto dari jabatannya. Salah satu aksi yang dilakukan adalah dengan menduduki Gedung DPR/MPR RI di Jakarta yang dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai macam Perguruan Tinggi. Upaya untuk melengserkan pemerintahan Orde Baru tersebut kemudian berhasil tercapai dengan mundurnya Presiden Suharto dari jabatannya sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 yang dilaksanakan di Istana Merdeka dan selanjutnya digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dengan berbagai macam aksi yang dilakukan pada masa itu untuk melengserkan Presiden Suharto ternyata menimbulkan dampak begitu besar yang dialami oleh masyarakat.

Dampak tersebut adalah timbulnya kerusuhan yang cukup besar yang terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia. Kerusuhan yang cukup besar dan tergolong parah terjadi di sekitar wilayah Jakarta dan Sekitarnya hingga menyebabkan terjadinya penjarahan dan pembakaran terhadap pusat perbelanjaan dan pusat perniagaan. Dari peristiwa yang terjadi di berbagai macam daerah tersebut memunculkan sebuah tragedi yang menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut tercatat jumlah korban meninggal mencapai hingga ribuan orang yang sebagian besar berada dalam kondisi yang mengenaskan beserta jumlah korban luka yang tercatat dalam peristiwa tersebut.⁵⁴ Peristiwa Mei '98 tercatat sebagai salah satu peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia.

⁵⁴<https://www.penamerdeka.com/395631/mengenang-20-tahun-melawan-lupa-kerusuhan-mei-98-di-kota-tangerang.html>, diakses 22 November 2023, 09.16 WIB.

A. Dampak Kerusuhan di Kota Tangerang

Kerusuhan Mei '98 yang terjadi pada masa itu merupakan sebuah dampak langsung dari upaya untuk melengserkan Rezim Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto. Namun dari peristiwa tersebut ternyata berdampak langsung ke berbagai macam wilayah yang berada di sekitar Jakarta, salah satunya adalah wilayah Kota Tangerang. Salah satu faktor meluasnya kerusuhan hingga ke wilayah Kota Tangerang karena letak geografisnya yang merupakan daerah penyangga dan berbatasan langsung dengan wilayah Ibukota Jakarta sehingga membuat Kota Tangerang terkena dampak langsung dari peristiwa yang termasuk dalam sejarah kelam di Kota Tangerang.



Gambar 6.1. Ciledug Plaza yang hangus terbakar saat kerusuhan Mei tahun 1998. Sumber: *Kota Tangerang, Benteng yang Berbias*

Pada saat terjadinya peristiwa tersebut Kota Tangerang merupakan wilayah yang baru saja terbentuk selama lima tahun namun dengan usia yang masih terbilang baru telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dimana terdapat berbagai macam pusat perbelanjaan dan pusat perniagaan yang tersebar di berbagai macam wilayah di Kota

Tangerang. Berbicara tentang Masyarakat di Kota Tangerang, dapat dikatakan merupakan masyarakat yang multi etnis, di kota ini terdapat masyarakat Betawi, Sunda dan Tionghoa beserta berbagai macam suku lainnya yang tinggal di wilayah Kota Tangerang. Sebelum terjadinya peristiwa kerusuhan tersebut, wilayah Kota Tangerang merupakan wilayah yang aman bagi semua etnis yang tinggal di kawasan ini.

Terjadinya kerusuhan pada saat itu sebenarnya terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam faktor, tidak semata-mata karena menginginkan Presiden Suharto untuk lengser dari jabatannya sebagai Presiden. Salah satu yang menjadi pemicunya adalah masalah perekonomian masyarakat yang pada saat itu juga ikut terpuruk akibat terjadinya Krisis Moneter yang menimpa Indonesia beserta beberapa Negara Asia pada tahun 1997. Dengan berbagai macam permasalahan yang ada pada saat itu akhirnya menimbulkan kerusuhan hingga penjarahan yang terjadi di berbagai macam wilayah di Jakarta dan sekitarnya serta daerah lain di Indonesia.

Ketika kerusuhan meluas hingga wilayah Kota Tangerang, pada dasarnya telah ada upaya dari Petugas keamanan beserta aparat sipil dan dibantu oleh masyarakat memblokir perbatasan antara Jakarta dengan Kotamadya Tangerang agar amuk massa tidak meluas ke wilayah Kotamadya Tangerang.⁵⁵ Namun hal yang dikhawatirkan tersebut kemudian terjadi pada saat terjadi ketika amuk massa yang diawali dengan kerumunan massa di sejumlah tempat berbuah petaka hingga kemudian terjadi pembakaran dan juga penjarahan yang terjadi di beberapa tempat di wilayah Kota Tangerang. Beberapa pusat perbelanjaan dan kawasan perniagaan di berbagai macam wilayah Kota Tangerang menjadi sasaran dari massa untuk dijarah. Penjarahan serta pembakaran dilakukan oleh

⁵⁵ Ibid., hlm. 73.

massa terhadap pusat perbelanjaan dan perniagaan yang terjadi di berbagai macam wilayah Kota Tangerang.

Dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Mei hingga 15 Mei tahun 1998 tersebut beberapa pusat perbelanjaan dan kawasan perniagaan di Kota Tangerang dibakar serta dijarah oleh massa yang sebelumnya melakukan aksi. Beberapa pusat perbelanjaan yang mengalami nasib naas tersebut diantaranya adalah Ciledug Plaza yang berada di wilayah Ciledug, Ramayana dan Toserba Sabar-Subur yang berada di daerah Pasar Baru, Toserba Sabar-Subur yang berada di daerah Jatiuwung serta berbagai macam pusat perbelanjaan dan kawasan perniagaan lain yang juga menjadi sasaran amuk massa pada saat itu. Selain itu aksi massa juga terjadi di berbagai macam ruas jalan di wilayah Kota Tangerang seperti yang terjadi di sekitar Tanah Tinggi hingga terjadi pembakaran yang dilakukan oleh massa di kawasan tersebut. Kerusakan yang terjadi pada masa itu begitu berdampak besar bagi wilayah Kota Tangerang dengan banyaknya aksi massa yang berujung kepada pembakaran dan penjarahan terhadap berbagai pusat perbelanjaan dan kawasan perniagaan hingga membuat situasi dan kondisi menjadi tidak terkendali.

B. Tragedi Mei '98 di Kota Tangerang

Dampak dari kerusakan yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998 tersebut tidak hanya berujung kepada pembakaran dan penjarahan saja, namun juga menimbulkan jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit dalam peristiwa tersebut. Pembakaran dan penjarahan yang terjadi di berbagai pusat perbelanjaan dan kawasan perniagaan di wilayah Kota Tangerang tersebut menyebabkan sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan menjadi salah satu peristiwa kelam yang pernah terjadi di Kota Tangerang. Dalam peristiwa tersebut tercatat ratusan orang harus kehilangan nyawanya dalam kerusakan yang berujung terhadap aksi pembakaran dan penjarahan di berbagai wilayah di Kota Tangerang.



Gambar 6.2. Asap membumbung tinggi di sekitar Tanah Tinggi pada saat Peristiwa Mei '98. Sumber: *Kota Tangerang, Benteng yang Berbias*

Tragedi Mei '98 yang terjadi di Kota Tangerang menyebabkan setidaknya 113 orang meninggal dunia, dimana para korban yang meninggal sebagian besar merupakan korban yang berada di Ciledug Plaza. Para korban yang meninggal terjebak di dalam pusat perbelanjaan tersebut ketika terjadinya aksi pembakaran pada saat itu. Selain itu terdapat pula belasan korban meninggal dunia yang tersebar di beberapa pusat perbelanjaan dan kawasan perniagaan lainnya di wilayah Kota Tangerang.⁵⁶ Para Korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut umumnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dan sulit teridentifikasi sehingga pemakaman terhadap para korban harus dilakukan secara Massal. Dalam aksi penjarahan dan pembakaran tersebut terdapat pula aksi kekerasan yang dialami oleh para korban selain para korban yang harus kehilangan nyawa dalam tragedi tersebut.

⁵⁶ Ibid., hlm. 72.



Gambar 6.3. Mobil-mobil yang dibakar oleh massa di Jalan Ciledug Raya
Sumber: Kompas

C. TPU Selapajang Jaya, Peristirahatan Terakhir

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Selapajang Jaya merupakan salah satu pemekaman yang berada di wilayah Kota Tangerang tepatnya di Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari. Pemakaman ini dibangun pada masa pemerintahan Wali Kota Djakarta Machmud yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Tangerang, mengingat pada masa itu Kota Tangerang (Dahulu Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang) menjadi daerah yang baru saja berdiri sehingga kebutuhan terkait dengan sarana pemakaman begitu besar. Pemakaman ini dibagi menjadi dua kategori yaitu untuk pemakaman muslim dan non-muslim.

Pada saat terjadinya Tragedi Mei '98 yang terjadi di wilayah Kota Tangerang yang memakan banyak korban pada masa itu, pemakaman ini menjadi saksi kelamnya peristiwa tersebut. Sebagian besar masyarakat yang menjadi korban peristiwa Mei '98 pada saat itu meninggal dengan kondisi yang mengenaskan sehingga para korban dimakamkan secara massal di

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Selapajang Jaya. Para korban yang dimakamkan bahkan disatukan menjadi satu baik laki-laki maupun perempuan karena sudah sulit untuk diidentifikasi. Peristiwa haru tersebut disaksikan langsung oleh keluarga para korban pada saat dilakukan prosesi pemakaman secara massal terhadap para korban. Pemakaman massal yang dilakukan terhadap para korban di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Selapajang Jaya disaksikan langsung oleh Wali Kotamadya Djakaria Machmud sekaligus memberikan sambutan prosesi pemakaman tersebut.



Gambar 6.4. Suasana pemakaman terhadap para korban Tragedi Mei '98 di Tangerang yang dilakukan di TPU Selapajang Jaya
Sumber: *Kota Tangerang, Benteng yang Berhias*

Pemakaman massal untuk para korban dalam Tragedi Mei '98 yang terjadi di Kota Tangerang ini berada pada salah satu bagian di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Selapajang Jaya. Selain di Kota Tangerang, terdapat juga pemakaman massal yang diperuntukkan untuk para korban Tragedi Mei '98 di beberapa daerah diantaranya berada di TPU Pondok Rangan, Jakarta Timur. Saat ini di pemakaman massal korban Tragedi Mei '98 tersebut berdiri sebuah tugu peringatan tentang peristiwa kelam yang

pernah terjadi di Kota Tangerang tersebut. Tugu ini menjadi saksi kelamnya sebuah peristiwa hingga harus mengorbankan banyak jiwa yang tidak berdosa karena adanya sebuah perbedaan sesuai dengan kutipan kalimat yang terdapat pada tugu peringatan tersebut.

D. Ingatan Tentang Tragedi Mei '98

Meskipun telah lebih dari 20 tahun berlalu, namun ingatan tentang Peristiwa Mei '98 masih tetap diingat oleh masyarakat karena peristiwa ini dianggap sebagai salah satu tonggak sejarah berakhirnya sebuah rezim yang telah lama berkuasa. Peristiwa Mei '98 dianggap sebagai sebuah keberhasilan dalam melakukan sebuah pembaharuan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia pada masa itu sehingga disambut dengan suka cita. Namun dibalik itu semua, muncul sebuah tragedi kemanusiaan yang harus terjadi dalam upaya untuk mencapai sebuah tujuan yaitu Reformasi.



Gambar 6.5. Tugu peringatan Tragedi Mei '98 di TPU Selapajang Jaya
(Sumber: Christina Yulita On X)

Bagi sebagian besar masyarakat khususnya di Kota Tangerang tentu Peristiwa Mei '98 yang berujung kepada aksi pembakaran dan penjarahan masih teringat dengan jelas. Masih teringat dengan jelas bagaimana situasi dan kondisi yang serba darurat sebagai akibat dari aksi pembakaran dan penjarahan yang terjadi di berbagai macam tempat di wilayah Kota Tangerang pada masa itu. Dalam peristiwa tersebut terdapat Aksi kekerasan yang dialami oleh masyarakat yang umumnya tidak tahu terkait dengan permasalahan yang ada. Puncaknya adalah jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa yang berujung tragedi yang jumlahnya mencapai hingga ratusan orang di Kota Tangerang.

E. Sisa-Sisa Terjadinya Peristiwa Mei '98 di Kota Tangerang

Seiring berjalannya waktu setelah terjadinya peristiwa yang memilukan tersebut, sebagian besar pusat perbelanjaan dan kawasan perniagaan yang menjadi sasaran pembakaran dan penjarahan oleh massa pada saat itu di wilayah Kota Tangerang mulai diperbaharui kembali. Hal ini terjadi pula di beberapa daerah lain yang juga mengalami hal serupa seperti Yogya Departement Store di daerah Klender Jakarta Timur yang kini telah diperbaharui kembali menjadi Mall Klender. Secara tidak langsung dengan pembaharuan atau difungsikannya kembali pusat perbelanjaan tersebut dapat sedikit menghilangkan sisa terjadinya peristiwa kelam tersebut.

Pada awal tahun 2000-an masih dapat ditemukan beberapa pusat perbelanjaan yang belum diperbaharui atau difungsikan kembali pasca terjadinya pembakaran dan penjarahan saat terjadinya Peristiwa Mei '98, namun kemudian dilakukan pembaharuan terhadap pusat perbelanjaan tersebut. Beberapa pusat perbelanjaan dan kawasan perniagaan di Kota Tangerang pasca terjadinya Peristiwa Mei '98 yang telah diperbaharui atau difungsikan kembali diantaranya adalah Toserba Sabar-Subur Jatiuwung yang diperbaharui kembali setelah mengalami aksi penjarahan dan

pembakaran. Namun ada pula pusat perbelanjaan yang tidak sempat diperbaharui kembali setelah peristiwa tersebut dan dibiarkan begitu saja hingga akhirnya hancur dan rata dengan tanah seperti Toserba Sabar-Subur Pasar Baru.



Gambar 6.6. Toserba Sabar-Subur Pasar baru pada tahun 2013 yang kosong sejak terjadinya aksi penjarahan pada tahun 1998, bangunan Toserba ini sekarang sudah rata dengan tanah. Sumber: Google Maps

Peristiwa Mei '98 menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa segala perbedaan yang ada dapat diselesaikan secara bersama-sama tanpa harus timbul jatuhnya korban jiwa. Peristiwa ini mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan diantara sesama bangsa Indonesia merupakan hal penting yang harus dijaga sehingga peristiwa semacam ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

BAB 7

TATENGER, TENGARA, TANGERANG

Mushab Abdu Asy Syahid

Urban symbolism expresses itself through different phenomena, such as the layout of the city, architecture, statues, street, and place names, poems, as well as rituals, festivals and processions; another strand consists of myths, novels, films, poetry, rap, music, songs and websites, all of which can be called symbol bearers." (P.J.M. Nas, 2011: 9)

A. Citra Kota, Sejarah, dan Tenggara

Kevin Lynch (1960), seorang teoretisi perkotaan klasik, dalam karya kanonnnya *Image of The City* mengidentifikasi tengara atau *landmark* sebagai elemen vital dalam pembentukan citra kota (*city image*). Landmark dianggap sebagai simbol visual menarik dengan penempatan yang memikat perhatian, seringkali memiliki bentuk yang unik dan perbedaan skala yang menonjol dalam lingkungan sekitarnya. Citra kota diartikan sebagai gambaran mental (*mental image*) yang berkembang secara organik dari tempat dan ruang tertentu, yang mencerminkan proses berjalannya waktu dan tumbuhnya beragam aktivitas sosial-ekonomi-budaya masyarakat di dalam ruang kota tersebut.

Dalam kesempatan lain, Lynch juga menyatakan setidaknya tiga komponen utama yang dapat memengaruhi gambaran masyarakat terhadap suatu kawasan adalah identitas, struktur, dan makna. Identitas mencakup kemampuan objek kawasan untuk dapat dibedakan dari yang lain, struktur melibatkan hubungan spasial dan pola citra objek dengan masyarakat serta objek lainnya, sementara makna berkaitan dengan arti yang dimiliki objek baik secara fungsi maupun emosi. Pembentukan citra kota, menurut Lynch (1960), tergantung pada rasa, pengalaman, persepsi,

dan imajinasi masyarakat terhadap suatu tempat atau lingkungannya. Ketiga hal ini dapat juga terbentuk atas gambaran mental terhadap sejarah berdirinya kota, konteks sosial-budaya, dan sosial-politik dalam kota.

Upaya untuk memperkuat penjenamaan kota atau *city branding* dari Kota Tangerang banyak melibatkan pembangunan tengara atau *landmark* ikonik dan menarik selama tiga dekade ke belakang, baik menarik secara konsep maupun menarik karena mengandung humor, lokalitas, dan bahkan kontroversial. Sekian bangunan tengara ini dibangun pada masa kepemimpinan setiap walikota, bertujuan menciptakan karakter dan citra kota dengan menonjolkan keunikan kawasan setempat menurut para pemangku kepentingan, dengan terintegrasi dan harmonis di skala kota.

Sebagai salah satu langkah dalam membangun identitas lokal Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang dalam kurun waktu tiga dekade telah menaruh beragam ide dan gagasan dalam menciptakan *landmark* yang berupaya mencerminkan karakter setempat, beradaptasi dengan kondisi serta kearifan lokal, termasuk aspek alamiah dan non alamiah seperti sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, dan seni. Pembangunan *landmark* kota ini direalisasikan dengan memenuhi standar fungsional, struktural, arsitektural, dan budaya, norma, serta citra kota untuk memberikan kontribusi positif dalam citra Kota Tangerang.

Identitas, berasal dari kata Latin *idem* yang berarti sama. Ia dapat dibangun dari kesamaan-kesamaan yang timbul akibat latar belakang primordial, sosial-budaya, politik, dan sejarah. Identitas lokal kota berarti mencakup kesamaan-kesamaan yang dimiliki secara khusus oleh masyarakat kota yang sifatnya terbatas, unik, langka, spesifik, dan partikular dalam konteks kota yang mereka tinggali tersebut. Dalam konteks negara pascakemerdekaan di Indonesia, kesamaan itu dapat berasal dari latar belakang sejarah, yaitu senasib sepenanggungan akibat pengalaman pahit penjajahan dan perjuangan melawan penjajah pada masa kolonialisme. Identitas kota biasanya dimanifestasikan dan dikonkretkan

dari memori kolektif masyarakat ke dalam wujud atau bentuk fisik, misalnya berupa monumen, tugu, ikon, simbol, dan logo. Di sisi lain, memori kolektif masyarakat tidak selalu akurat, multitafsir, namun berpotensi membuka beragam kreasi baru di dalam pemaknaannya.

Tulisan ini akan mengulas singkat tentang dinamika pembentukan identitas melalui citra kota yang terbentuk dari faktor sejarah (historis) dan upaya membangun citra kota melalui tengara (*landmark*), antara lain diskusi tentang “tatengger” dan “benteng” sebagai dua elemen penting di dalam sejarah Kota Tangerang. Keduanya, di antara beragam macam hal, seringkali dibahas sebagai modalitas daripada banyaknya tengara yang dibangun di Kota Tangerang. Sebagai kota modern, sejarah tidak selalu dijadikan sebagai beban masa lalu tetapi juga menjadi potensi untuk membedakan citra kota dengan kota-kota lainnya, serta menjadi landasan yang lebih argumentatif dalam membangun citra kota.

Kota Tangerang sejak awal sejarahnya adalah “kota landmark”. Banyaknya penanda di Kota Tangerang tidak terlepas dari fakta bahwa wilayah Tangerang menjadi daerah perbatasan geopolitik antara Kesultanan Banten, Kerajaan Pakuan-Pajajaran di Sunda Kelapa, dan perusahaan dagang VOC di Batavia sepanjang abad 16-17. Hal inilah yang membentuk identitas ruang kota perbatasan di tengah wilayah kekuasaan di bumi Nusantara, seperti dibangunnya benteng pertahanan sejak abad ke-17 hingga penjara bagi kaum kriminal buangan sejak abad ke-19.

Seiring berjalannya waktu, batas-batas tersebut memudar dan berganti. Ada kebutuhan mewujudkan tengara baru yang menjahit seluruh memori ruang kota Tangerang di masa lalu dan masa kini untuk dibawa ke masa depan. Kemajuan pelestarian warisan budaya modern hari ini juga telah mencapai pada tingkat yang sangat lokal. Kebutuhan meneliti dan memperkuat sejarah dan identitas berbasis kewilayahan dan kemasyarakatan setempat tidak bisa dihindari, namun sering kali wujud

fisik warisan budaya yang mereka miliki telah hilang sebelum gagasan pelestarian terhadap warisan budaya tersebut direalisasikan.

B. Hilangnya *Tatengger* sebagai Tengara

Kata “Tangerang”, Tangerang, Tanggeran, Tanggerang, atau Tamgara/Tangaram (dalam versi Tome Pires, apabila benar) ditengarai berasal dari bahasa Sunda, yaitu *tengger* atau *tatengger* yang bermakna tanda atau penanda. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, makna ini juga bisa dikaitkan dengan kata *tengger* bisa juga diartikan kokoh, tegak, berdiam, sebagaimana layaknya sebuah tugu penanda atau prasasti. Perbedaan imbuhan –an serta penekanan kata di tengah disebabkan oleh fleksibilitas bahasa lisan dan tulisan khas Sunda (Banten) dalam pelafalan kata yang mengacu pada arti yang sama.

Seorang apoteker Portugis bernama Tomé Pires pernah menulis dalam catatan perjalanannya mengelilingi Pulau Jawa yang berjudul *Suma Oriental* selama tahun 1512-1515. Ia menyatakan bahwa nama “Tamgara” atau “Tamgaram”, serta sungai Cisadane adalah satu dari enam pelabuhan penting di Kerajaan Sunda di barat pulau Jawa; antara lain *Bantam* (Banten), *Pomdam* (Pontang), *Cheguide* (Cigede), *Tangaram* (Tangerang), *Calapa* (Sunda Kelapa), dan kali *Chi Manuk* (Cimanuk). Nama *Tamgaram* atau *Tamgara* bisa juga merujuk pada desa Tangora, Tanara, atau Tangerang. Sepertinya, apabila mengikuti pola pesisir laut Banten, maka asumsi *Tamgaram* sebagai Tangerang menjadi kurang tepat, dan lebih cocok diasosiasikan kepada daerah Desa Tanara atau Desa Tengkurak yang berada di sisi utara pesisir Kabupaten Serang, Provinsi Banten.⁵⁷

Mengacu beberapa sumber tradisi lisan, “tanda” yang dimaksud ialah tugu yang terletak di wilayah perbatasan kekuasaan Kesultanan

⁵⁷ Armando Cortesão (1944), *The Suma Oriental of Tomé Pires and The Book of Francisco Rodrigues, an Account of The East, from The Red Sea to Japan*, Vol. 1, Council of Hakluyt Society, London, hlm. 166-171.

Banten dan pemerintahan kolonial VOC Batavia sepanjang masa perang di abad ke-17 hingga ke-18. Tenggeran, atau tugu tanda yang sudah hilang itu terletak di bagian barat sungai Cisadane, kampung Grendeng. Ia didirikan Pangeran Soegiri, putra Sultan Ageng Tirtayasa penguasa Kesultanan Banten saat itu. Di tugu tersebut diukir aksara Arab-Jawi pegon berbahasa Sunda Banten, menuliskan memori perjuangan mempertahankan bumi Parahyangan dari ancaman VOC.

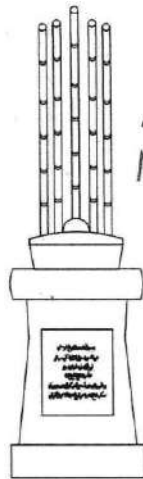
Terbentuk dari aliran Sungai Cisadane, pelabuhan Tangerang berfungsi sebagai titik transit dan aktivitas perdagangan rempah-rempah, pakaian, sayur-mayur dan buah-buahan dari hulu ke hilir. Belakangan waktu, Sungai Cisadane pun juga menjadi pembatas geografis sekaligus geopolitik yang membagi wilayah ini ke dalam tiga kekuatan besar sepanjang abad 16-17: Kesultanan Banten di sisi barat; Kesultanan Jayakarta dan perusahaan dagang VOC Belanda di sisi timur; hingga Kerajaan Sunda Pakuan-Pajajaran di sisi selatan. Tangerang otomatis menjadi *tenggeran* atau *tatengger*, yang dalam bahasa Sunda berarti “batas”, “tanda”, dan “pinggiran” antar pusat-pusat kekuasaan politik.

Dalam sumber sejarah lokal masyarakat Kalipasir yang berbentuk manuskrip berjudul *Paririmbon Ka-Aria-an* yang ditulis oleh Regent Idar Dilaga (1830; 1970), salah satu bagian dari manuskrip menjelaskan soal keberadaan tenggeran ini. Menurut keterangan catatan pinggir (marginalia) yang dibubuhkan dalam salinan manuskrip tersebut, kira-kira pada tahun ± 1654 , tugu tanda tatengger pernah didirikan di Grendeng. Berikut isi manuskrip dalam bahasa Sunda menggunakan ejaan lama.

XXI. Dina taboen nawoe eta keneb kaoem Parahijang ngajakeun tjoetjoerakan ngaradegkeun Pager- endeng (Gerendeng) djeung Tangoer anoe luburna sapandjang 5 dempa diparenabkeun nana 40 toembak koeloneun Tjipamoegas. Dina Tangoer teh dipadjang koe merek anoe kaoegel kijeu:

- *Bismillah peget ingkang Goesti –*
- *Dinigsoen djoepoet perenah kala saptoe –*
- *Ping Gasal Sapar taoen Wawoe –*
- *Rengsena perang neteg Tangger nanggeran –*
- *Boengas wetan Tjipamoegas kilen Tjidoeren -*
- *Sakabeh angraksa sitingsoen Parahijang – titi/xxx*

Oegelan ijen teh ditaatan nana teh dina papan djati koe Goesti Soegiri ti Banten make boeroep Arab Goendoel, djeung Aria Wangsakara anoe kadjoeloek Ki Imam Wangsaradja, ajeuna didjenengkeun djadi Aria Tanggeran.-



“Tatenger” Pangeran Sugiri Mapay Sejarah Tangeran

*Bismillah peset ingkang gusti
Dinigsoen luput parenah kala rabtu
Ping gasal saper taen wau
Rengsena perang neteg nangeran
Bungas wetan cipamunggas kilen cidurian
Sakabeh angraksa sitingsun parahijang titi*

Gambar 7.1. Tafsiran bentuk *tatenger* yang telah hilang, yaitu REPLIKA “TUGU TATENGER 1654” karya Harrys Jasim Judanegara dan “Tatenger Pangeran Sugiri” karya Raufi Syarofi & warga Kalipasis.
Sumber: Arsip warga Kampung Kalipasis

Teks di kerap tersirkulasi di internet dan sumber informasi resmi pemerintah kota/kabupaten Tangerang untuk mengabsahkan eksistensi Tangerang sebagai *tatenger* atau penanda batas antara wilayah kekuasaan Banten dan Batavia. Di sisi lain, manuskrip *Paririmbun Ka-Aria-an* sifatnya

cenderung tertutup dan tidak sembarang publik mengaksesnya, sehingga sumber sejarah ini masih memerlukan verifikasi dan kritik sumber sejauh mana teks ini dapat ditelusuri kebenaran dan asal muasalnya.

Tradisi lisan lokal menunjukkan bahwa penginderaan masyarakat lokal terhadap daerah Tangerang sebagai wilayah yang ditandai sebagai batas telah terbentuk sejak lama. Bentuk *tatenger* asli yang sudah hilang, mungkin karena menggunakan material sederhana dan tidak permanen, nampaknya masih menyisakan pola bentuk yang sama di setiap memori kolektif masyarakat, terlihat dari dua tafsiran di atas meskipun keduanya juga belum bisa dipastikan akurat karena ketiadaan arsip sejarah visualnya. Hal ini dapat menjadi potensi penelitian selanjutnya yang dikembangkan demi menemukan petunjuk tentang aspek kesejarahan *tatenger*, dan bahkan mungkin juga asal-usul nama tempat atau toponimi kota ini.

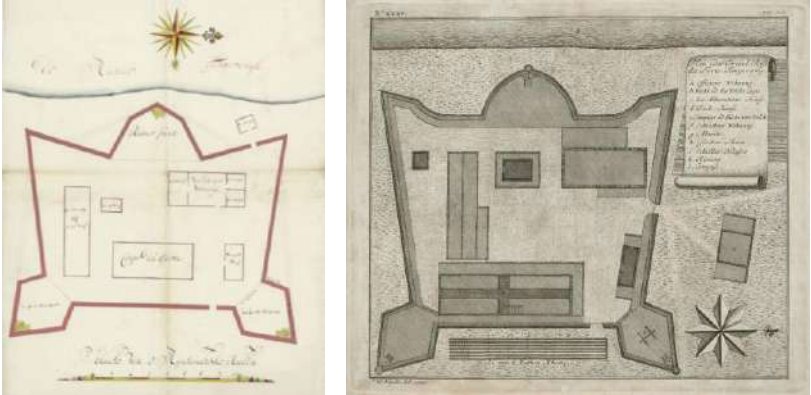
C. Hilangnya Benteng sebagai Tengara

Sebagai kota pinggiran yang menyandang nama retrospektif “Benteng” dan semestinya mencerminkan akar kesejarahan kotanya, Tangerang menghadapi tantangan hilangnya warisan budaya bangunan benteng. Bangunan benteng kolonial selama masa penjajahan bangsa Belanda di Banten dan Tangerang telah menjadi sebuah tanda penunjuk lokasi pusat kota, alias menjadi tengara pusat kota kolonial di Tangerang. Hilangnya peninggalan fisik benteng mengakibatkan hilangnya tengara penting lainnya di Tangerang, yang selama ini menjadi sandaran atas identitas sejarah kota pinggiran Batavia/Jakarta ini.

Hal ini membuat pemerintah daerah dan masyarakat swasta mengambil langkah dan strategi pelestarian *landmark* yang berbeda untuk mengembangkan potensi lainnya, termasuk warisan budaya benda-tak benda, dan ekowisata lanskap perkotaan di sekitar benteng. Hal ini mengindikasikan pergeseran metode pelestarian yang dihasilkan dalam beragam bentuk komodifikasi ingatan tentang “benteng”.



Gambar 7.2. Perbandingan morfologi pusat kota Tangerang dalam peta VOC tahun 1780 (kiri), peta Hindia-Belanda tahun 1900-1901 (tengah), dan peta satelit tahun 2021 (kanan) dengan orientasi utara di bawah. Sumber: *Sejarah Nusantara* ANRI B40, Bibliotheken Leiden, Google Earth.



Gambar 7.3. Denah Benteng Tangerang pada tahun 1708 (kiri) dan tahun 1739 (kanan). Sumber: Atlas of Mutual Heritage

Pasca pembongkaran sisa-sisa reruntuhan Benteng Tangerang, peninggalan perkotaan yang ada di kawasan pusat kota belakangan waktu

dilabeli sebagai Kota Lama Tangerang, terutama sejak era kampanye program Kota Pusaka di Indonesia tahun 2012. Kota Lama ini terdiri dari kompleks Pasar Lama Tangerang, kampung-kampung pecinan dan Kalipasir, serta bangunan ibadah milik masyarakat yang terdiri dari Masjid Jami Kalipasir dan Kelenteng Boen Tek Bio. Pasar Lama menjadi inti program revitalisasi Kota Lama, bersama blok Masjid Agung Al-Ittihad, blok pendopo Kabupaten Tangerang, dan blok Stasiun Kereta Api. Pasar Lama terbentang di sepanjang Jalan Kisamaun, Sukasari.

Sekarang, benteng tidak lagi ada di Kota Lama Tangerang. Yang tersisa hanyalah nama: nama kelompok, nama jalan, nama merek atau jenama kota. Warga Tionghoa peranakan yang berasal dari sini menyebut diri mereka *Cina Benteng*; sebuah jalan raya di depan Masjid Agung dinamai Jalan Benteng Raya; sebuah Jalan Benteng Betawi berlokasi cukup jauh dari Kota Lama; produk industri rumah tangga yang Kecap Benteng Tan Giok Sen dan Kecap SH (Shiong Hin) yang dibuat sejak tahun 1882 dan 1920 di Pasar Lama. Karakteristik stereotipe benteng juga melekat pada desain bangunan resmi lembaga pemerintahan seperti kantor, sekolah, puskesmas, monumen tugu... sampai jenama angkutan umum *Si Benteng*. Cara ini ditemukan hampir di seluruh wilayah Tangerang raya, mungkin dalam rangka merawat ingatan kolektif tentang benteng.

Pada bulan Agustus 2011, Pemerintah Kota Tangerang secara resmi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor 430/kep.337-disporbudpar/2011 tentang Penetapan Cagar Budaya tahun 2011. Terdiri dari tiga penjara tua, dua kelenteng (Boen San-Bio dan Boen Tek-Bio), Makam dan Masjid Jami Kalipasir, Bendung Pasar Baru, Stasiun Kereta Api Tangerang, dan satu rumah khas Tionghoa milik swasta (Udaya Halim) yang kini difungsikan sebagai museum Benteng Heritage di Pasar Lama. Seleksi objek Cagar Budaya ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sepanjang Maret-Agustus 2011 di bawah tim Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang (BP3S)— yang kemudian

menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten—, karena saat itu belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Tangerang. Meskipun begitu, Kota Tangerang termasuk daerah otonom pertama se-Bodetabek yang menerapkan upaya penetapan setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diberlakukan di tingkat nasional.

Pada tanggal 11 November 2011, 3 bulan setelah keluarnya Surat Keputusan Walikota Tangerang tentang Cagar Budaya, Udaya Halim sebagai salah satu warga lokal yang biasa menghabiskan masa kecilnya di komunitas Pasar Lama secara resmi membuka Museum Benteng Heritage “The Pearl of Tangerang” (2012) bersama dengan KPH. Prof. Dr. H. E. Harimurti Kridalaksana dan Ping Sopandi. Halim mengambil nama “Benteng” untuk museum bersejarah ini yang mengadaptasi rumah vernakular-tradisional Tiongkok kuno abad ke-18 yang dibelinya. Letaknya hampir di belakang candi vihara Padumuttara.

Namun, hampir tidak ada dokumentasi sejarah tentang peninggalan benteng Tangerang itu sendiri, kecuali hanya beberapa penyebutan saja. Museum ini lebih banyak bercerita tentang sejarah budaya Tionghoa peranakan Cina Benteng di Kota Tangerang. Tak heran jika banyak pengunjung yang menyebut museum ini sebagai ‘museum komunitas Tionghoa pertama di Indonesia’, sementara di dinding bangunan terdapat prasasti yang menyatakan museum tersebut sebagai *Warisan Budaya Peranakan Tionghoa Tangerang*. Dari hal tersebut, nama “benteng” telah bergeser posisinya dari tengara fisik kini sudah hilang, berganti menjadi penanda atau tengara sosial bagi kelompok masyarakat.

Udaya Halim pernah mendaftarkan Benteng Heritage Museum kepada UNESCO Bangkok and Asia and Pacific Regional Bureau Education untuk mengglobalisasikan proyeknya, dan agar menerima 2012 UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation. Berdasarkan arsip surat Halim, Tim Curtis yang berkantor di Kepala Unit Kebudayaan UNESCO Bangkok pada 14 September 2012 menyiratkan

apresiasi positif kepada Halim atas upaya dan dedikasinya dalam melestarikan budaya hibrida etnis Tionghoa, meski belakangan juri juga menyatakan bahwa proyek ini “sulit dipahami sepenuhnya...”, karena kurangnya dokumentasi yang mapan.

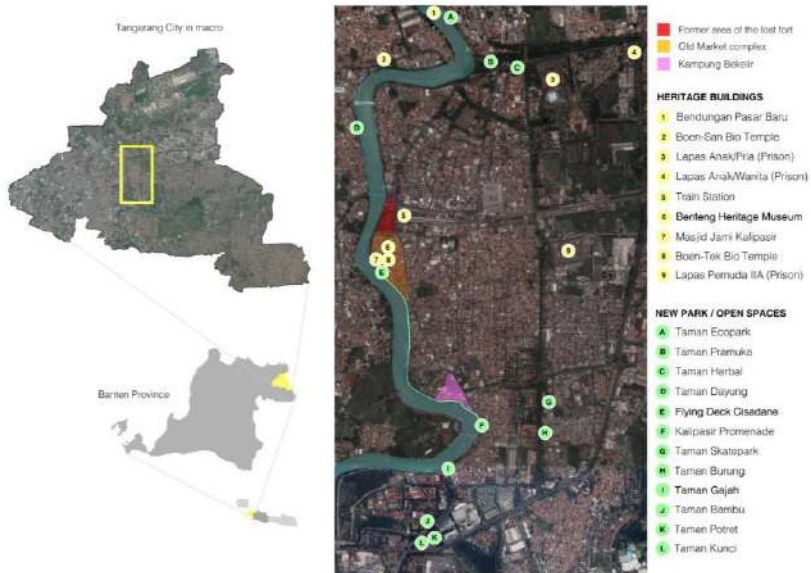
Analisis lebih lanjut dapat ditegaskan bahwa pelestarian ini tidak terlalu melekat pada keseluruhan cerita kota tersebut (utamanya sejarah Tangerang sebagai “Benteng” itu sendiri), karena koleksi dan cerita yang diberikan lebih banyak mengenai kelompok etnis Tionghoa peranakan sejak masa tersebut. Pertama, hal itu sedikit membingungkan Dewan Juri UNESCO, tercermin dari kesan mereka yang mempertanyakan luasnya karya, signifikansi sejarah, dan keaslian budaya bangunan yang digunakan sebagai museum tersebut, padahal intervensi yang lebih sederhana justru lebih diapresiasi. Program konservasi yang dilakukan pihak swasta ini, dan diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai objek Cagar Budaya, tetap mampu memberikan makna berbeda dan contoh unik tentang bagaimana sejarah dan pusaka masyarakat setempat dilestarikan.

D. Taman, *Landmark*, dan Lanskap Budaya

Sejak 2016, Pemerintah Kota Tangerang menggolongkan bidang pertamanan dan dekorasi kota ke dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Secara tersirat dan sengaja, langkah ini mengindikasikan bahwa setiap penataan lanskap alam dan buatan, dari penataan taman sampai lingkungan agar menjadi objek tengara baru dan destinasi wisata yang memuat nilai-nilai sejarah dan kota yang berkebudayaan. Ada banyak tugu dibangun di kota ini, beberapa yang terkenal antara lain Tugu Jam Damatex, Tugu Jam Gede Jasa, Tugu Piala Adipura, Tugu Akhlakul Karimah, tugu MTQ, tugu Pasar Anyar hingga gapura selamat datang dan selamat jalan yang baru-baru ini direvitalisasi.

Warisan lanskap perkotaan di Tangerang kini dikomersialkan dengan festival kuliner, kedai makanan *outdoor* semi permanen, dan pembangunan infrastruktur demi investasi dan menggerakkan ekonomi di

kota. Menurut Walikota Arief Rachadiano Wismansyah, visinya terhadap Kota Tangerang diwujudkan melalui *grand design* program yang diberi nama “Tangerang Layak Dikunjungi” (LIVE). Program ini melibatkan warisan budaya, pariwisata lokal, dan penerapan konsep *waterfront city* dalam lanskap perkotaan, di mana sungai menjadi plot utama pembangunan.



Gambar 7.4. Sebaran objek Cagar Budaya dan taman di Kota Tangerang

Secara historis, Sungai Cisadane telah menjadi lanskap perkotaan bersejarah terpadu yang terhubung dengan festival tahunan Arakan Perahu yang sakral bagi umat Islam setempat untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan festival Peh Cun untuk komunitas Cina Benteng di bawah Perkumpulan Boen Tek Bio, serta pemerintah kota juga telah menyelenggarakan “Festival Cisadane” secara tahunan. Program pengembangan ekowisata juga terjadi pada pemukiman di sepanjang sungai, seperti yang populer diterapkan dalam program “Kampung

Bekelir” bekerja sama dengan peringatan *anniversary* PT. Pacific Paint tahun 2017 untuk menciptakan karakter kampung lokal yang unik.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan ruang terbuka berupa taman tematik. Berdasarkan hasil observasi lapangan penulis pada tahun 2018, telah dibangun lebih dari 10 taman di sekitar kota, antara lain Taman Gajah dan Flying Deck Cisadane. “Kalipasir Promenade”, sebuah ruang terbuka yang difungsikan lapangan olah raga, “Taman Kunci” (singkatan dari Taman Kupu-Kupu & Kelinci), Taman Pramuka (2013), Taman Pisang (2014), Taman Potret (2015), Taman Eco-Park (2015), Taman Bambu (2016), Taman Skatepark (2016), Taman Dayung (2016), Taman Gajah (2017), Taman Herbal (2017), dan Taman Burung (2018).

Salah satu taman, yaitu Taman Gajah, merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Gajah Tunggal, Tbk., industri ban terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, yang telah beroperasi di kota ini sejak tahun 1978. Taman ini dibuka seluas 6.066 m², terdiri dari ruang terbuka dan fasilitas fasilitas rekreasi, *outdoor food court*, *birdwatching*, musala, dan lanskap Cisadane di samping taman. Ruang terbuka lain yang terkait dengan Cisadane adalah “Cisadane Walk”, yang dibangun tahun 2017 di sebelah barat Pasar Lama, serta sepanjang Jalan Benteng Jaya hingga Jalan Kalipasir dan Jalan Perintis Kemerdekaan, Tangerang. Trotoar pejalan kaki ini dilengkapi warung kuliner, panggung terbuka, taman bermain anak, dek terbang, dan bangku-bangku yang disediakan sebagai titik pemberhentian trotoar.

Peremajaan perkotaan yang bersifat atraktif mempengaruhi banyak lanskap kota lokal dengan menggunakan gaya *typoscape* yang populer sebagai templatnya. Seperti contoh di atas, “Flying Deck Cisadane” dan “Kampung Bekelir”, yang menunjukkan tema warna-warni pemukiman kampung penduduk asli di samping kompleks Pasar Lama. Di sisi lain, fasilitas semacam ini menciptakan *landmark* kota buatan yang mengelilingi lanskap alami perkotaan.



Gambar 7.5. Beragam tugu dan tengaran kota: Taman Gajah Tunggal, Jam Gede Jasa, Kampung Bekelir, Tugu Asmaul Husna, Tugu Jempol, dan Tugu Adipura. Sumber: About Tangerang, dan *Public domain*

Studi penulis menyimpulkan bahwa kehilangan warisan budaya fisik utama yang telah menjadi tengara kota akan diikuti secara tidak langsung oleh kehilangan nilai-nilai intrinsik identitas sejarah kota tersebut dalam pengembangan modern yang lebih luas. Warisan yang hilang tidak lagi menjadi warisan, dan hanya menjadi sebuah nama tanpa objek fisik yang diketahui. Program pembangunan *landmark* ekowisata oleh pemerintah daerah setempat di sekitar Kota Lama Tangerang mungkin tidak selalu mengacu pada aspek kesejarahan Tangerang sebagai “Kota Benteng” sama sekali, tetapi ini juga berarti menunjukkan perluasan ruang lingkup konservasi, di mana Sungai Cisadane memainkan peran penting sebagai lanskap sejarah perkotaan pengganti. Dengan kata lain, hilangnya “benteng” juga dapat dilihat sebagai simbol metaforis dari pergeseran fokus konservasi warisan kota dari satu objek monumental menjadi lanskap alam, sosial, dan budaya yang lebih luas.

Penutup

Dalam era pascakemerdekaan, terutama setelah reformasi tahun 1998, banyak kota/kabupaten baru mengalami perkembangan dan menjadi entitas maju dan mandiri melalui implementasi kebijakan otonomi daerah. Meskipun kemajuan tersebut membawa manfaat, namun juga menimbulkan beragam masalah dan tuntutan baru, termasuk perlunya konstruksi dan penguatan kekhasan, identitas, serta citra kota. Penyusunan narasi historiografi dan penelusuran identitas kota yang independen menjadi salah satu upaya untuk mengakui eksistensi kota-kota tersebut sejak masa lalu. Peninggalan sejarah, baik berupa warisan budaya maupun cerita pahlawan setempat, dihidupkan kembali, dan budaya lokal diperkuat melalui pembangunan monumen kota baru, yang seringkali juga tidak berangkat dari sumber-sumber sejarah secara mutlak.

Pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, termasuk Pemerintah Kota Tangerang, turut memperhatikan pentingnya melestarikan identitas dan sejarah lokal. Oleh karena itu, terlihat sekian upaya merancang tengara

Kota Tangerang yang berupaya mempertimbangkan aspek-aspek kultural-historis. *Tatenger* atau tengara (*landmark*) baru dirancang dan dibangun berupaya mencerminkan Kota Tangerang: sebuah kota modern baru dengan dinamika interaksi sosial, ekonomi, dan kebudayaannya yang terus berkembang. Identitas sosial, budaya, agama, dan pusaka kontemporer Kota Tangerang yang diwakili beragam lapisan masyarakat, terutama dari masyarakat Sunda, Betawi, Tionghoa Cina Benteng, dan warisan kolonial Eropa, umumnya menjadi fokus dalam rancangan tersebut.

Jika benar demikian, maka pendekatan desain yang diterapkan di dalam menemukan kembali *landmark* modern di Kota Tangerang salah satunya melalui pendekatan desain kontemporer dengan muatan historis, atau yang mungkin bisa disebut sebagai “historisisme kontemporer”. Meskipun sulit untuk selalu mendapatkan hasil yang ideal sesuai dengan selera masyarakat luas, karena biasanya lebih mudah menyederhanakan konsep identitas kota ke dalam simbol-simbol sederhana, pendekatan ini memungkinkan pengambilan referensi dari sejarah atau kesejarahan suatu wilayah dan pengolahan ulangnya menjadi elemen baru, sehingga tercipta narasi yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan Kota Tangerang dalam tengara yang berkesinambungan.

BAB 8

TANGERANG AKHLAKUL KARIMAH: HARMONI DALAM KEBERAGAMAN

M. Alfian Nugraha Fauzi

“Wujudkan Kota Tangerang sebagai Kota Yang Berakhlakul Karimah”

Bagi masyarakat Kota Tangerang, ungkapan ini menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi, bahkan bagi masyarakat yang berada di luar wilayah Kota Tangerang juga merasakan hal yang demikian. Bagi masyarakat yang berada di luar wilayah Kota Tangerang ketika memasuki wilayah ini sudah disuguhkan dengan ungkapan Kota Tangerang sebagai Kota yang Berakhlakul Karimah dan juga tulisan *Asmaul Husna*, yaitu “nama-nama yang baik”, yang terdapat di berbagai ruas jalan di wilayah Kota Tangerang. Hal ini tentunya menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan tujuannya menjadi Kota yang religius bagi semua pemeluk umat beragama yang berada di wilayah Kota Tangerang.

A. Akhlakul Karimah sebagai Visi Kota Tangerang

Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing merupakan visi dari Pemerintah Kota Tangerang.⁵⁸ Akhlakul Karimah sendiri pertama kali diperkenalkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Wahidin Halim yang bertugas selama dua periode sejak tahun 2003 hingga tahun 2013. Visi Kota Tangerang sebagai Kota yang Berakhlakul Karimah kemudian tetap dilanjutkan dan dipergunakan oleh Wali Kota Tangerang saat ini, Arief Rachadiono Wismansyah. Dengan visi Kota Tangerang yang berkahlakul karimah

⁵⁸ <https://tangerangkota.go.id/pemerintah>, diakses pada 22 November 2023, 08.44 WIB.

diharapkan nilai yang terkandung dalam Akhlakul Karimah dapat dilaksanakan serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di Kota Tangerang yang sangat beraneka ragam baik suku, agama, ras maupun antargolongan yang ada.



Gambar 8.1. Tulisan Asmaul Husna yang berada di ruas Jalan M.H. Thamrin di wilayah Cikokol. Sumber: Google Maps

Akhlakul Karimah sendiri jika diartikan merupakan sebuah sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antara manusia dengan tuhan dan hubungan antara manusia dengan manusia. Akhlak mulia ini menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual. Dengan visi Kota Tangerang yang demikian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua masyarakat

Kota Tangerang untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan perwujudan dari Akhlakul Karimah itu sendiri.

Selain itu dengan adanya nilai-nilai dalam Akhlakul Karimah dapat menjadi nafas dalam setiap pembangunan yang dilakukan di Kota Tangerang, serta dapat pula diterapkan dan menjadi sebuah budaya yang ada di masyarakat. Hal ini tentunya sangat penting mengingat dengan nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat agar dapat berperan dalam membangun Kota Tangerang mulai dari hal yang sederhana.⁵⁹ Peran serta masyarakat tentunya sangat penting dalam membangun Kota Tangerang karena dengan adanya peran serta masyarakat dapat menjadikan kota ini sebagai kota yang layak dan nyaman untuk semua kalangan masyarakat. Selain itu visi Kota Tangerang sebagai Kota yang berakhlakul karimah dapat diwujudkan dalam berbagai macam cara salah satunya adalah menjadikan kota ini sebagai kota yang religius untuk semua umat beragama yang ada di Kota Tangerang dengan menekankan pentingnya nilai toleransi di dalamnya.

Salah satu upaya untuk menanamkan nilai Akhlakul Karimah di masyarakat Kota Tangerang adalah dengan membuat tulisan Asmaul Husna yang berada di berbagai macam ruas jalan di Kota Tangerang salah satunya di ruas jalan M.H. Thamrin yang berada di daerah Cikokol. Selain itu di beberapa wilayah lain di Kota Tangerang juga ditemukan hal serupa sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk menumbuhkan nilai Akhlakul Karimah sesuai dengan visi yang dimiliki. Ada banyak cara lain yang dapat dilakukan pemerintah Kota Tangerang sebagai salah satu upaya dalam menerapkan visi tersebut kepada masyarakat di wilayah Kota Tangerang.

⁵⁹<https://harapanrakyatonline.com/walikota-percantik-kota-dengan-budaya/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023, 14.29 WIB.

B. Akhlakul Karimah: Wujud Harmoni dalam Keberagaman

Jika kita melihat dari aspek yang lebih luas, makna Akhlakul Karimah dikaitkan dengan konteks sebagai sebuah visi dari suatu wilayah tentu mencakup semua masyarakat yang berada di dalamnya yang berasal dari berbagai macam latar belakang baik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Kota Tangerang sendiri merupakan wilayah yang heterogen dengan masyarakat yang beranekaragam pula sehingga slogan Akhlakul Karimah menjadi sebuah wujud harmoni dalam keberagaman yang diterapkan di dalam masyarakat khususnya di Kota Tangerang. Hal ini sesuai dengan makna dari Akhlakul Karimah itu sendiri yang menitikberatkan kepada sikap dan perilaku yang baik terhadap hubungan antar sesama manusia.

Berbicara tentang hubungan yang terjalin antara dua kelompok masyarakat dimana terdapat sebuah perbedaan di dalamnya menjadi satu contoh terjalinnya sebuah hubungan yang harmonis. Hal ini terbukti sejak dahulu sebelum terbentuknya Kota Tangerang telah terjalin hubungan yang baik diantara keduanya. Salah satunya terdapat di wilayah Pasar Lama Tangerang dimana dua kelompok masyarakat yang berbeda suku dan agama dapat terjalin sebuah hubungan yang sangat baik sejak ratusan tahun yang lalu hingga saat ini. Salah satu bentuk toleransi tersebut adalah keberadaan Masjid Kali Pasir dan Klenteng Boen Tek Bio yang lokasinya berdekatan dan berada dalam satu kawasan di sekitar Pasar Lama.⁶⁰ Hal ini tentunya menjadi bukti adanya sebuah harmoni dalam keberagaman yang ada di masyarakat Kota Tangerang. Hingga kini masyarakat yang berada di kawasan tersebut tetap terjalin hubungan yang baik meskipun terdapat berbagai macam perbedaan diantara kedua masyarakat tersebut.

⁶⁰ Wahidin Halim (2005), *Ziarah Budaya Kota Tangerang: Menuju Masyarakat Berperadaban Akhlakul Karimah*. Jakarta: Pendulum, hlm. 42.

Melihat konteks pada masa kini tentunya harmoni dalam keberagaman merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat khususnya di Kota Tangerang. Masyarakat Kota Tangerang pada saat ini berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda serta berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Dengan adanya keberagaman tersebut tentu menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi sehingga salah satu yang harus dilakukan adalah dengan terjalannya sebuah harmoni serta toleransi yang baik di dalam keberagaman tersebut. Dengan terjalannya hubungan yang baik tersebut tentu keberagaman yang ada menjadi sebuah kekuatan yang berperan dalam membangun Kota Tangerang.

Jika melihat konteks yang lebih luas seperti Negara Indonesia tentunya keberagaman yang ada bukan lagi menjadi sebuah permasalahan bahkan menjadi sebuah kekuatan untuk tetap bersatu sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Dengan adanya contoh tersebut tentunya dapat menjadi salah satu penguat terkait dengan keberagaman yang ada di wilayah Kota Tangerang sesuai dengan visi Kota Tangerang sebagai Kota yang Berakhlakul Karimah. Secara tidak langsung dengan adanya keberagaman masyarakat yang hadir di Kota Tangerang pada saat ini turut ikut pula kebudayaan serta adat istiadat yang selama ini dilakukan di daerah asalnya saja. Namun hal tersebut seharusnya bukan menjadi sebuah persoalan karena dengan nilai Akhlakul Karimah yang menjadi pedoman selama ini dapat menjadikan hal tersebut sebagai sebuah keberagaman yang harus dijaga serta dilestarikan sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkannya.

Dengan melihat keberagaman masyarakat yang terdapat di Kota Tangerang menjadi salah satu alasan diselenggarakannya Festival Budaya Nusantara oleh Pemerintah Kota Tangerang yang dimulai pada tahun 2017. Kegiatan yang kemudian rutin digelar setiap tahunnya ini merupakan

cerminan keberagaman masyarakat yang berada di Kota Tangerang yang multikultur dengan berbagai macam suku yang berada didalamnya.⁶¹ Dengan adanya keberagaman budaya di Kota Tangerang tersebut menunjukkan bahwa walaupun beragam namun Kota Tangerang tetap kondusif dan aman.⁶² Kegiatan ini diikuti pula oleh masyarakat dari luar wilayah Kota Tangerang bahkan terdapat peserta yang berasal dari luar negeri yang mengikuti Festival Budaya Nusantara ini.



Gambar 8.2. Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah hadir dalam Festival Budaya Nusantara II yang diselenggarakan pada tahun 2018 oleh Pemerintah Kota Tangerang. Sumber: Antara News

C. Kota Tangerang sebagai Tempat Berziarah

Bagi sebagian besar masyarakat Kota Tangerang maupun masyarakat yang berasal dari luar Kota Tangerang, wilayah ini selalu

⁶¹<https://news.detik.com/berita/d-4811737/festival-budaya-nusantara-hadir-lagi-di-kota-tangerang>, diakses pada tanggal 5 Desember, 01.04 WIB.

⁶²<https://banten.antaranews.com/berita/32056/festival-budaya-nusantara-wujud-persatuan-keragaman-di-kota-tangerang>, diakses pada 5 Desember 2023, 01.17 WIB.

dianggap sebagai sebuah kota penyangga Ibukota Negara dan juga sebagai kota industri dan juga tempat dimana Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta berada. Namun hanya sebagian kecil yang mengetahui dibalik perkembangan Kota Tangerang yang cukup pesat, wilayah ini ternyata menjadi salah satu tempat bagi masyarakat yang ingin berziarah. Bahkan tempat ziarah yang berada di Kota Tangerang ini telah dikunjungi oleh para peziarah yang tidak hanya berasal dari wilayah Kota Tangerang saja namun juga masyarakat dari luar wilayah Kota Tangerang.



Gambar 8.3. Masjid Pintu Seribu pada tahun 1986 yang saat ini berlokasi di Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk (Sumber: Tempo)

Beberapa tempat ziarah yang selalu dikunjungi oleh para peziarah tersebut diantaranya adalah Masjid Pintu Seribu yang terletak di Kampung Bayur Kelurahan Periuk Jaya Kecamatan Periuk. Masjid Pintu Seribu merupakan masjid yang terbilang unik karena sepintas jika melihat bangunan masjid ini lebih menyerupai seperti sebuah benteng yang memiliki banyak pintu di dalamnya. Masjid yang memiliki nama Masjid Agung Nurul Yakin ini dibangun pada tahun 1978 dan menjadi salah satu tempat berziarah yang berada di Kota Tangerang yang setiap tahunnya selalu

dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai macam daerah. Masjid Pintu Seribu dapat dikatakan menjadi salah satu destinasi wisata religi yang berada di Kota Tangerang yang dapat dikembangkan beserta tempat wisata religi lainnya.



Gambar 8.4 Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah beserta Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin berziarah ke Makam di Masjid Kali Pasir pada tahun 2017 (Sumber: Pemerintah Kota Tangerang)

Tempat berziarah lainnya yang berada di Kota Tangerang yang selalu dikunjungi oleh para peziarah adalah Masjid Kali Pasir yang merupakan masjid tertua di Kota Tangerang. Selain itu di masjid tersebut terdapat pula makam-makam bersejarah yang berada di bagian barat Masjid Kali Pasir yang juga selalu diziarahi oleh para peziarah. Salah satu makam yang berada di area Masjid Kali Pasir tersebut adalah makam Bupati Tangerang Raden Ahyat Pena beserta makam lainnya yang juga bersejarah. Para peziarah yang datang ke Masjid Kali Pasir pada dasarnya tidak hanya mengunjungi masjid yang bersejarah namun juga berziarah ke makam yang berada di sekitar area masjid. Bahkan Wali Kota Tangerang

Arief Rachadiono Wismansyah setiap tahunnya menjelang HUT Kota Tangerang selalu menyempatkan berziarah ke Masjid Kali Pasir.⁶³

Salah satu tempat berziarah lain yang berada di Kota Tangerang adalah Makam Aria Yudanegara yang berada di Kecamatan Periuk yang juga selalu didatangi oleh para peziarah. Makam Aria Yudanegara merupakan salah satu situs bersejarah yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Tangerang.⁶⁴ Dengan penetapan ini diharapkan Makam Aria Yudanegara tetap terjaga dan terawat serta dapat menjadi tempat berziarah bagi masyarakat tidak hanya masyarakat di Kota Tangerang namun juga masyarakat di luar Kota Tangerang. Selain itu masih terdapat tempat berziarah lainnya di Kota Tangerang yang juga selalu diziarahi oleh para peziarah dari berbagai macam daerah.

⁶³<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/7924/kali-pasir-roh-dari-kota-tangerang-yang-menyimpan-sejarah-nasional>, diakses 1 Desember 2023, 10.42 WIB.

⁶⁴ Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya.

BAB 9

SEJARAH PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KOTA

Mushab Abdu Asy Syahid

A. Legal-Historis Warisan Budaya Kota

Amanat melestarikan dan memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi: “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*” Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian upaya dan langkah strategis meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia, melalui ruang lingkup Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Pasal 4 UU 5/2017, muaranya adalah Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Di bawah ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan, termasuk juga objek-objek Cagar Budaya, khususnya di Kota Tangerang:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia,
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda

Menurut UU 11/2010, terdapat sebanyak 5 jenis Objek Cagar Budaya di Indonesia yang meliputi Benda Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Kelima objek tersebut merupakan warisan budaya benda bersifat kebendaan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Selain itu, menurut Pasal 5 UU 5/2017, terdapat sebanyak 10 jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Indonesia yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, seni, teknologi tradisional, ritual dan bahasa. Kesepuluh objek ini yang nantinya dikembangkan menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) melalui penetapan di tingkat nasional. Warisan

Budaya Takbenda adalah hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian, penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan.

Seluruh obyek kebudayaan tersebut memerlukan upaya-upaya pelestarian demi menjaga keberlanjutannya sebagai warisan budaya bagi dunia dan generasi penerus. Pasal 3 UU 5/2017 juga mengatur asas-asas dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan, antara lain asas toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, gotong royong. Asas-asas ini menjadi landasan umum untuk seluruh penanganan terhadap seluruh objek warisan budaya benda dan tak benda di Indonesia.

Peraturan lainnya yang berkaitan khusus dengan Pemajuan Kebudayaan adalah yang mengatur penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di tingkat provinsi, hingga kota/kabupaten; serta Strategi Kebudayaan di tingkat nasional. Dokumen PPKD sangat penting, karena akan memberikan gambaran kondisi, masalah, tantangan, dan strategi serta solusi terhadap permasalahan kebudayaan untuk seluruh OPK di setiap kota/kabupaten dan provinsi. Mengenai hal ini, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang sedang melaksanakan rangkaian Penyusunan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Tangerang pada tahun 2023 dengan menggandeng Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Provinsi Banten.

Selain lembaga Dewan Kesenian Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang juga telah membentuk dua tim ahli di bidang kebudayaan, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Tangerang dan Tim Ahli Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) Kota Tangerang. TACB Kota Tangerang akan bekerja membuat kajian rekomendasi penetapan objek-objek Cagar Budaya di tingkat kota kepada Walikota Tangerang,

sedangkan Tim Ahli WBTb Kota Tangerang bertugas menyusun dokumen kajian yang mengusulkan OPK Kota Tangerang sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) Nasional.



Gambar 9.1. Penelitian Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kota Tangerang: Gerbang kebun Leenhof's Weergade, Rumah Telepon di Jl. Daan Mogot, dan rumah Lim Tian Tiang tahun 2022.

Ditambah lagi, Pemerintah Kota Tangerang juga tengah memproses penerbitan draft Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Kebudayaan Daerah Kota Tangerang yang direncanakan akan diterbitkan dalam

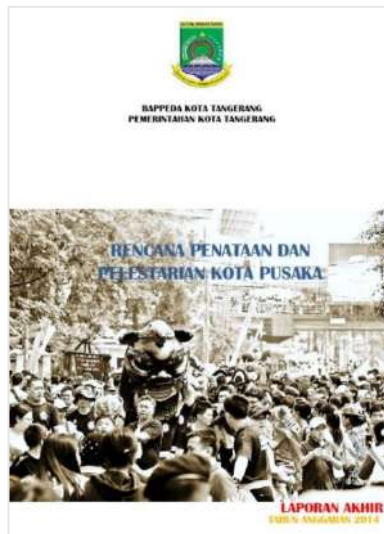
waktu dekat. Dengan demikian, pelestarian baik terhadap Cagar Budaya, Objek Pemajuan Kebudayaan, maupun Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) sejauh ini telah diakomodasi oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui kebijakan peraturan daerah beserta dengan pelaksanaannya.

Posisi Pemerintah Daerah sebagai fasilitator yang menggandeng kolaborasi dengan berbagai pihak, dan tidak hanya berada dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang saja, serta tidak melulu menjadi eksekutor sentral namun juga melibatkan akademisi, pelaku bisnis dan usaha, komunitas, media, dan para pemangku kepentingan yang berkaitan di daerah. Dengan semangat “Membangun Kota Melalui Kolaborasi”, pemerintah kota berkomitmen menggali serta meningkatkan potensi wisata dan kekayaan budaya yang dimiliki oleh kota ini, membawa Kota Tangerang menuju kemajuan yang lebih baik di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Mengilas balik ke *Dokumen Laporan Akhir Rencana Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka* yang pernah disusun sebuah tim konsultan di bawah Bappeda Kota Tangerang (2014), rencana ini juga memuat daftar kumpulan warisan budaya benda dan tak benda milik kota ini yang pada waktu itu digaungkan dalam semangat pembangunan dan penataan Kota Pusaka. Kota Tangerang telah menjadi bagian dari jejaring kota pusaka sejak tahun 2012. Pada tahun sama, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan umum menyelenggarakan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), dalam rangka mewujudkan implementasi RTRW atau penataan ruang kota yang konsisten berbasis kekuatan ruang kota dengan nilai-nilai pusaka di dalamnya, serta mendorong diakuinya Kota Pusaka Indonesia sebagai Kota Pusaka Dunia.

P3KP mendorong komitmen dan sinergi dukungan lintas sektoral, pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Peran pemerintah daerah beserta masyarakat, akademisi, dunia usaha akan menjadi komponen utama dalam menjamin kota pusaka yang berkelanjutan. Salah

satu cita-cita P3KP yaitu menggiring kota pusaka di Indonesia untuk dapat menjadi Kota Pusaka Dunia yang diakui UNESCO. Pemerintah kota/kabupaten berperan sebagai aktor utama gerakan kolektif dan kontribusi nyata upaya penataan dan pelestarian kota pusaka di daerah masing-masing; disertai kerjasama para pemangku kepentingan sehingga menguntungkan secara sosial-budaya dan ekonomi bagi masyarakatnya.



Gambar 9.2. Rencana Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (2014)

Dokumen Bappeda Kota Tangerang ini menjadi salah satu upaya menginventarisasi objek-objek warisan budaya benda dan tak benda di Kota Tangerang, yang dilengkapi dengan rencana induk pelestarian dan penataan warisan budaya dalam lingkup kota pusaka (*heritage town*) seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 mengenai Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) di tingkat nasional. Dokumen ini menuangkan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) yang memuat Visi dan Misi, *Road Map*, dan Rencana Aksi, yang mengidentifikasi kawasan strategis sosial-budaya dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah

(RTRW) Kota Tangerang Tahun 2012-2032, serta proses inventarisasi pusaka ragawi dan tak ragawi berdasarkan klasifikasi tipologi serta lokasi.

Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada Rencana Tata Bangun dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Kota Kecamatan Tangerang dalam pembahasan Focus Group Discussion (FGD) para pemangku kepentingan di Kota Tangerang pada tahun 2014, arah penataan menuju pada usaha pengembangan kawasan Kota Lama Tangerang yang meliputi revitalisasi Blok Kota Lama (alias Pasar Lama), Blok Masjid Agung-Pendopo dan Blok Stasiun Kereta Api. Blok Kota Lama adalah kawasan dengan fungsi, artefak, dan aktivitas yang lebih didominasi oleh peninggalan bangunan bersejarah dan pola permukiman yang masih mempertahankan karakter khususnya, sedangkan Blok Pendopo dan Stasiun berada berhadap-hadapan di luar kawasan Pasar Lama Tangerang.

Tulisan Bab 9 ini tidak hanya membahas secara deskriptif satu per satu objek-objek Cagar Budaya apa saja yang ada di Kota Tangerang, karena buku ini bukanlah dokumen inventarisasi objek Cagar Budaya atau Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Tangerang, tetapi juga membahas sejarah dan perkembangan pelestarian warisan budaya kota, seperti langkah apa saja yang telah dilakukan terhadap objek-objek ini berupa penelitian, sosoailisasi. Pelatihan, hingga festival yang telah dilakukan dalam beberapa waktu belakangan di Kota Tangerang.

B. Kekayaan Warisan Budaya Benda Kota

Inventarisasi objek-objek warisan budaya benda yang diduga sebagai Cagar Budaya dan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di Kota Tangerang sejauh ini telah dilakukan pada tahap kajian dan pendataan. Perkembangan di bidang ini cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kendala dan tantangan sejauh ini adalah proses registrasi objek dan terbatasnya sumber daya ahli yang pelakunya berada di wilayah kota/kabupaten yang

mumpuni dalam mengkaji objek-objek tersebut. Sebagian besar penggiat dan pemerhati Cagar Budaya beranjak dari komunitas-komunitas lokal dan luar Kota Tangerang yang proaktif dalam menyosialisasikan dan mengampanyekan kekayaan warisan budaya ini, namun tidak seluruhnya mendalami keilmuan khusus yang terkait dengan bidang Cagar Budaya.

Kondisi di atas, selain menunjukkan sisi positif keterlibatan aktif masyarakat kota yang semakin meningkat, di sisi lain seringkali menyebabkan interpretasi dan pemahaman arti khusus serta nilai penting Cagar Budaya bersifat umum dan kurang tergalis, serta tidak jarang menimbulkan kekeliruan dalam informasi sejarah dan pusaka. Dengan total 24 objek Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2018 termasuk yang telah ditetapkan sejak tahun 2011, masih banyak objek yang memiliki potensi sejarah namun secara artefak telah mengalami perubahan signifikan atau masih kurangnya penelitian terhadap objek.

Di samping itu, banyak pula artefak dan peninggalan sejarah dalam kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan kelompok, yang masih belum terdata dalam inventaris Cagar Budaya dan/atau belum terbuka untuk diakses publik. Beberapa objek yang dimaksud sebagian besar berasal dari milik komunitas setempat, misalnya rumah-rumah khas Betawi di perkampungan Belendung dan lainnya; rumah-rumah kebaya yang tersebar di beberapa tempat; kompleks makam kuno di Benteng Makassar; aset-aset Kelenteng Boen Tek Bio berupa koleksi lonceng, singa batu (*ciob say*), *thian sin lou*, tambur batu, tempat pembakaran kertas, tempat dupa yang tergantung (*sam kai lou*), *bio lou sakyamuni budha*, *bio lou kwan im*, *bio lou bok tek cek sin*, *bio lou kwan seng tee kun*, *bio lou kwan im bud couw*, dan kereta kencana; papan arwah milik keluarga Tan Oen Long; area permakaman Tanah Gocap dan Tanah Cepe; hingga beragam bangunan rumah pribadi berlanggam khas Tionghoa dan rumah budidaya walet di Pasar Lama, termasuk Rumah Boeroeng (Boemboer) milik Udaya Halim.

Berikut ini adalah objek-objek berupa benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan baik yang telah ditetapkan ataupun yang baru diduga sebagai Cagar Budaya. Untuk membuat daftar lebih mudah, pembahasan deskripsi objek secara umum akan dibagi menjadi dua, yaitu Cagar Budaya yang berasal dari kelompok masyarakat multikultural khususnya dari masyarakat Sunda, Betawi, dan Cina Benteng; dan Cagar Budaya yang berasal dari peradaban masa kolonial VOC dan Hindia-Belanda. Seluruhnya merupakan objek Cagar Budaya yang berkontribusi dalam kekayaan warisan budaya benda di Kota Tangerang.

Warisan Budaya Multikultural: Sunda, Betawi, dan Cina Benteng

1. Kawasan Cagar Budaya Pasar Lama Tangerang

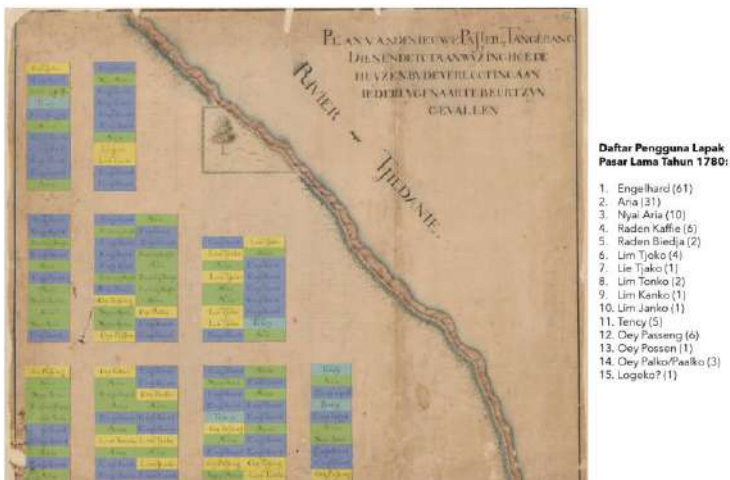


Gambar 9.3. Pasar Lama Tangerang. Sumber: LIVE Magazine

Kawasan bersejarah Pasar Lama Tangerang berlokasi di sepanjang koridor Jalan Kisamaun, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang dan menjadi tempat tinggal bagi komunitas Tionghoa

peranakan Cina Benteng dan masyarakat Kampung Kalipasir. Lingkungan ini terbentuk dari susunan rumah toko (ruko) dan hiruk-pikuk penjual kaki lima, lalu-lalangnya pengunjung dan kendaraan bermotor yang memadati sempadan jalan, yang membuat area ini hidup siang-malam. Pasar Lama menjadi area blok inti dari revitalisasi kawasan Kota Lama Tangerang.

Sebagai pusat kehidupan sosial dan ekonomi komunitas multikultural, di kawasan ini terdapat Bangunan Cagar Budaya Masjid Jami Kalipasir, Kelenteng Boen Tek Bio Museum, dan Museum Benteng Heritage yang merupakan sumber sejarah etnis Tionghoa peranakan Cina Benteng di Tangerang. Kelenteng dipenuhi warga Tionghoa yang beribadah, dan di area belakang kelenteng juga terdapat sebuah vihara yang bernama Vihara Padumuttara tempat peribadatan umat Buddha.



Gambar 9.4. Peta pasar Tangerang tahun 1794. Sumber: ANRI

Pasar Lama Tangerang telah berdiri sekurang-kurangnya pada abad 17-18 dan terus berkembang ketika VOC mendirikan Benteng Makassar (Benteng Tangerang) di tepi Sungai Cisadane sebagai perbatasan militer antara wilayah VOC di sisi timur dan wilayah Kesultanan Banten

di sisi barat sungai. Pada peta VOC tahun 1739, sudah tercatat adanya pasar di sini, sedangkan pada tahun 1794 dikabarkan terjadi kebakaran besar yang melanda pasar tersebut. VOC membuat denah lapak pasar dengan komposisi lapak-lapak dagang yang didominasi oleh Pieter Engelhard sebagai perwakilan VOC; keluarga Aria Sutadilaga dan Nyai Aria, beserta pemilik swasta yang terdiri dari kaum Raden, dan kelompok masyarakat Tionghoa bermarga Tan, Lim, dan Oey. Proses jual-beli lahan lapak dan peningkatan jumlah penduduk membuat area Pasar Lama semakin banyak dihuni oleh masyarakat Cina Benteng hingga hari ini.

2. Situs Masjid Jami dan Makam Kalipasir



Gambar 9.5. Situs makam di depan Masjid Jami Kalipasir

Situs Masjid Jami dan Makam Kalipasir terdiri dari bangunan masjid dan kompleks makam kuno yang terletak di samping masjid. Masjid peninggalan sejak masa Kesultanan Banten ini diduga merupakan masjid tertua di Kota Tangerang dan seringkali menjadi simbol kerukunan dan

toleransi umat beragama sepanjang sejarah di Kota Tangerang. Masjid yang berukuran sekitar 288 m² ini diduga telah didirikan sekitar tahun 1700-an oleh Tumenggung Pamit Wijaya dari Kahuripan Bogor. Tradisi lisan yang disusun para keturunan Aria di Tangerang, seperti *Parimbon Ka-Aria-an Tangerang* (1830) dan penyusunan sejarah lokal warga kampung bertajuk *Nyukcruk Galur Mapay Patilasan* (2016) menuturkan asal mula kampung dan masjid berikut makamnya diduga sejak abad ke-16. Komplek makam kuno di Kalipasir berada di atas tanah wakaf. Banyak nisan kuno di sisi barat halaman masjid, antara lain persemayaman Aria Tumenggung Soetadilaga serta Tumenggung Aria Ramdon sebagai Regent Tangerang di abad 18-19. Pada tahun 2001, tercatat sejumlah 37 buah makam kuno dengan beragam bentuk.

Hingga saat ini (2023), masjid masih digunakan sebagai tempat beribadah, akan tetapi masjid ini tidak lagi digunakan untuk shalat Jumat. Kondisi masjid masih terawat dengan baik. Komponen arsitektur yang menarik dari masjid ini adalah empat tiang kayu soko guru yang masih asli, dan kemuncak atap berupa mustaka/memolo yang umum ditemukan pada masjid-masjid kuno di pulau Jawa, dan warga namakan sebagai “baluwarti” atau “benteng” peradaban Kampung Kalipasir. Tiang-tiang tersebut tampak mulai keropos sehingga harus disangga sejumlah besi. Elemen lain seperti menara baru direnovasi awal abad ke-21 dengan denah segi delapan dan dianggap menyerupai langgam Tionghoa.

3. Kelenteng Boen Tek Bio

Kelenteng Boen Tek Bio sebagai kelenteng tertua di kawasan Pasar Lama Tangerang, memiliki akar yang erat dengan kedatangan komunitas Tionghoa yang dikenal sebagai Cina Benteng. Mereka membentuk permukiman berpola petak sembilan dengan Bio (klenteng) sebagai pusatnya. *Boen Tek Bio* berasal dari bahasa Hokkian yang memiliki makna khusus, di mana *Boen* berarti intelektual, *tek* berarti kebajikan, dan

bio berarti tempat ibadah. Dengan demikian, secara etimologis, Boen Tek Bio berarti tempat bagi manusia mencapai kebajikan dan kecerdasan.

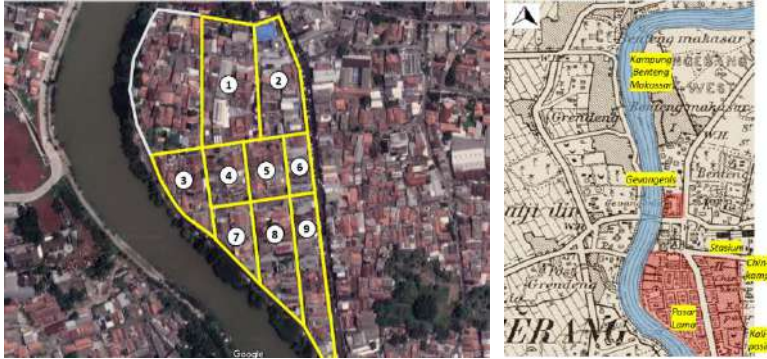


Gambar 9.6. Kelenteng Boen Tek Bio

Terdapat beberapa versi mengenai waktu pembangunan Kelenteng Boen Tek Bio, namun diyakini klenteng ini dibangun sekitar akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Penduduk Tionghoa setempat meyakini bahwa klenteng awalnya berbentuk rumah bambu. Pemugaran dilakukan beberapa kali, dan pada tahun 1844, klenteng ini mengalami renovasi besar-besaran. Bagian tengah klenteng, yang pertama kali dibangun, mengalami renovasi pada tahun tersebut dengan bantuan ahli bangunan dari Tiongkok. Bangunan di sisi kiri-kanan dan belakang kemudian dibangun, dengan sisi kiri-kanan dibangun pada tahun 1875, sedangkan bagian belakang dibangun pada tahun 1904.

Meskipun pernah mengubah nama menjadi Vihara Padumuttara pada masa Orde Baru, Kelenteng Boen Tek Bio tetap ramai dikunjungi. Terakhir kali klenteng menyelenggarakan perayaan Toapekong pada 6 Oktober 2012, dan perayaan selanjutnya dijadwalkan pada tahun 2024. Secara rutin, mereka tetap mengadakan berbagai perayaan setiap tahunnya, seperti Peh Cun dan perlombaan perahu naga di Kali Cisadane.

4. Petak Sembilan



Gambar 9.7. Pola petak sembilan sebagaimana yang diyakini oleh peneliti dan masyarakat umum Kota Lama Tangerang (kiri). Bandingkan dengan peta Tangerang tahun 1901 (kanan).

Konsep “Petak Sembilan” di pulau Jawa pertama kali berasal dari nama tempat/pasar di kota-kota besar di mana pusat aktivitas sosial-ekonomi masyarakat Tionghoa Peranakan, salah satunya yang terkenal di kawasan Glodok, Jakarta. Konsep ini belakangan waktu diduga ikut diadopsi di daerah untuk membaca pola permukiman dan pasar di Pasar Lama Tangerang. Pola *grid* jalan dan bangunan yang saat ini terbentuk di Pasar Lama Tangerang faktanya telah tersusun sejak akhir abad ke-18 melalui kebijakan penataan pasar VOC pada tahun 1794 pascaterjadinya kebakaran yang melanda area pasar Tangerang. Karena hal tersebut, maka pola “petak sembilan” tidak langsung mewujud dalam pola sembilan petak secara jelas, sehingga nama ini hanya mengindikasikan susunan bangunan khas Tionghoa yang terdapat di Pasar Lama Tangerang.

Mengacu peta-peta kuno kawasan di awal abad ke-20, pada mulanya perkampungan orang Cina Benteng atau pecinan (*Chinese kamp*) dan perkampungan Kalipasir (*Kalipasir kamp*) berbaur satu sama lain dan mengelilingi area pasar, yang saat ini menjadi area bermukim sekaligus

berdagang warga Cina Benteng dengan hadirnya kelenteng, ruko-ruko, dan lapak semipermanen. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan komprehensif mengenai asal-usul penyebutan “petak sembilan” di kawasan Pasar Lama Tangerang oleh masyarakat Cina Benteng maupun oleh para peneliti yang berfokus di studi area ini.

5. Kelenteng Boen San Bio



Gambar 9.8. Kelenteng Boen San Bio di Koang

Bangunan kelenteng Boen San Bio, terletak di Jl. KS Tubun 43, Kelurahan Koang Jaya, Karawaci, Tangerang. Kelenteng ini dibangun diatas lahan seluas 4.650 m². Bangunan kelenteng ini merupakan bangunan yang terdiri dalam tiga bagian, yakni bagian depan, tengah dan belakang. Bagian depan bangunan digunakan sebagai ruangan pemujaan. Di ruang pemujaan ini dewa yang diutamakan adalah Dewa Bumi (*Khongco Hok Tek Jeng Sin*). Pada sisi kanan-kiri ruang pemujaan terdapat ruang pemujaan dewa-dewa dan leluhur. Bagian ini kaya hiasan dengan warna dominan merah. Bagian tengah ruangan terdapat beberapa ruang yang difungsikan sebagai aula, ruang pendidikan dan ada beberapa altar pemujaan. Ruang bagian belakang merupakan ruangan yang luas. Di bangunan bagian

belakang difungsikan untuk Ruang Dhammasala, Pendapa Pecun, Patilasan Mbah Raden Suryakencana, dan kantin. Ruang Dhammasala terletak di sebelah timur Pendapa Pecun. Di sisi kiri pintu masuk terdapat patung Dewi Kwan Im Pou Sat dengan tinggi sekitar 3 m.

Di dalam ruangan terdapat Ruang Buddha dengan tinggi $\pm 3,5$ m. sementara Di Pendopo Pecun. yang berada di sebelah barat Ruang Dhammasala, terdapat sepasang perahu naga yang berwarna merah dan kuning. Perahu tersebut merupakan sumbangan dari seorang tuan tanah. Patilasan Mbah Raden Suryakencana berada di sebelah barat Pendapa Pecun. Awalnya petilasan tersebut berada di tepi sungai depan kelenteng, namun lahan kelenteng terkena pelebaran jalan sehingga bangunan petilasan dipindahkan ke dalam kelenteng.

6. Rumah Arsitektur Cina (Benteng Heritage)



Gambar 9.9. Benteng Heritage di Jalan Cilame

Museum Benteng Heritage, terletak di Jl. Cilame No. 20, RT 001/004, Kelurahan Sukasari, Tangerang. Bangunan Museum ini merupakan hasil restorasi sebuah bangunan berarsitektur Tionghoa yang diduga dibangun pada pertengahan abad 18. Bangunan tersebut merupakan salah satu bangunan tertua di Kota Tangerang. Awalnya

bangunan itu adalah sebuah bangunan rumah tinggal yang terdiri atas 3 (tiga) bagian. Oleh si pembeli, bangunan tersebut direstorasi mendekati bentuk aslinya, untuk dijadikan Museum Benteng Heritage.

Koleksi di Museum Benteng Heritage berasal dari koleksi pribadi, sumbangan dari warga sekitar Tangerang, kolektor benda kuno dan pemerhati budaya Tionghoa peranakan di Indonesia. Di museum ini terdapat berbagai artefak yang menjadi saksi bisu kehidupan masa lalu, seperti kedatangan armada Cheng Ho dengan rombongan yang diduga terdiri dari sekitar 300 kapal kayu besar dan kecil yang membawa hampir 30.000 pengikutnya. Rombongan dipimpin oleh Chen Ci Lung, yang ditengarai sebagai vikal bakal (nenek moyang) penduduk Tionghoa Tangerang (Cina Benteng) yang mendarat di Teluk Naga pada 1407.

Di museum ini terdapat galeri yang berisi berbagai macam kamera tua, koleksi timbangan bekas opium yang berasal dari berbagai negara, koleksi botol kecap yang diproduksi di Tangerang seperti Kecap Benteng Teng Giok Seng dan Siong Hin, koleksi susastra Oey Kim Tjing, penyadur cerita silat dari Tangerang, hingga material culture orang Cina Benteng seperti ranjang pengantin dan baju adat pernikahan Cina Benteng.

7. Makam Kapitan Cina Oey Kiat Tjin

Makam yang berbentuk model batu nisan Cina (*bongpai*) dan bercungkup ini menjadi tempat Oey Kiat Tjin, seorang Cina Benteng yang menjabat sebagai Kapiten Cina terakhir di Tangerang dimakamkan. Oey Kiat Tjin adalah putra sulung dari Oey Djie San, yang sebelumnya juga menjabat Kapiten Cina di Tangerang dan posisinya digantikan anaknya karena wafat tahun 1925. Oey Dji San mewariskan perusahaan pertanian milik keluarga *Vereeniging Tangerang* yang tanah partikelirnya terbentang dari Karawaci hingga Cilongok. Keluarga besar Oey Kiat Tjin sempat tinggal di Landhuis Krawatji sepeninggal ayahnya, hingga ia wafat tahun 1936 dan menjadi kapiten Cina terakhir di Tangerang.



Gambar 9.10. Makam Oey Kiat Tjin di Karawaci.

Makam ini sempat terbengkalai dan kurang terurus dalam waktu yang lama hingga mengalami vandalisme dan menjadi tempat pembuangan sampah karena faktor lokasinya yang terpencil di tengah permukiman kampung. Berkat gerakan kepedulian dari komunitas dan pemerintah daerah, makam ini secara rutin mulai dibersihkan dan dikunjungi oleh warga pemerhati sejarah dan pusaka.

Pada bulan September 2023, keluarga besar dari kapiten Oey Kiat Tjin membongkar makam ini hanya untuk mengambil kerangka jenazah leluhur mereka, untuk memindahkannya ke persemayaman lain. Struktur makam tetap dipertahankan sebagaimana aslinya, dan terdapat rencana keluarga besar untuk menghibahkannya kepada Pemerintah Kota Tangerang sebagai media pembelajaran sejarah dan Cagar Budaya untuk masyarakat umum di Kota Tangerang.

8. Pabrik Kecap Tan Giok Seng

Sejak tahun 1882, pabrik kecap yang didirikan oleh Tan Hay Soey dan kemudian diteruskan oleh Tan Giok Seng ini tetap beroperasi hingga saat ini. Kecap yang dihasilkan terkenal dengan sebutan “Kecap Benteng”, mengacu pada istilah daerah Tangerang sebagai “kota benteng” sekaligus digunakan oleh masyarakat Cina Benteng di Tangerang. Dengan merek

Cap Istana dan label burung yang menonjol dengan klaim ‘kecap benteng tulen’, keberadaan pabrik dan produk kecap sebagai warisan budaya menjadi daya tarik potensial wisata di Kota Tangerang.



9.11. Pabrik kecap Tan Giok Seng di Pasar Lama Tangerang

9. Makam Raden Aria Santika (Makam Keramat Tubagus Zakaria)



Gambar 9.12. Bangunan makam Raden Aria Santika di Batuceper

Makam Raden Aria Santika dikenal juga sebagai makam Syekh Tubagus Zakaria. Terletak di Jl. Sempati, Batuceper, Tangerang. Makam ini berbentuk rumah dengan luas sekitar 30 meter, yang dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah ruangan untuk tempat menunggu bagi para

peziarah, sementara bagian kedua adalah tempat makam Rd Aria Santika. Letak dan bangunan makam Raden Aria Santika, awalnya berada di Kramat Asem, Batu Ceper. Pada 1970-an, dilakukan pemindahan makam Rd. Aria Santika yang terkena pembangunan Jalan Daan Mogot.

Raden Aria Santika bersama Aria Wangsakara dan Aria Yuda Negara diyakini sebagai salah satu pendiri Tangerang. Ketiga aria itu disebut dengan nama Tiga Raksa. Dalam Kitab *Paririmbun Kaarian*, disebutkan bahwa ada tiga orang pangeran yang meninggalkan tanah kelahiran dan keluarga besarnya di Sumedang karena ada perbedaan pendapat dengan para saudaranya yang memihak aliansi antara Belanda dan Maaran. Ketiga Aria tersebut ditengarai menuju Kesultanan Banten, untuk mengabdikan diri. Sultan Banten kemudian melantik ketiga “aria” tersebut menjadi pemimpin di wilayah yang baru dibuka di Lengkong Sumedang dan bermukim di Tigaraksa.

10. Makam Raden Aria Yudanegara



Gambar 9.13. Jirat makam Raden Aria Yudanegara di Sangiang

Makam Aria Yudanegara terletak di Jl. Prabu Kian Santang, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk. Makam ini terdapat di TPU Warga, yang terdiri dari satu makam utama, dengan satu makam kecil yang terletak di sebelah barat. Pada makam utama terdapat dua buah nisan tipe

gada. Kondisi kijing makam sudah direnovasi dengan menggunakan keramik berwarna merah, kuning, dan hijau. Raden Aria Yuda Negara merupakan salah satu pendiri Tangerang bersama Aria Wangsakara dan Aria Santika. Ketiga aria itu disebut dengan nama Tiga Raksa.

11. Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna



Gambar 9.14. Komplek makam TMP Taruna dan gedung museumnya

Cagar Budaya Taman Makam Pahlawan Taruna terletak di Jl. TMP Taruna No. 29, RT 001/ 001, Kelurahan Sukaasih. Taman Makam Pahlawan Taruna dibangun untuk mengenang dan mengabadikan peristiwa Pertempuran Lengkong. Di TMP ini terdapat makam 48 pahlawan yang sebagian besar merupakan pejuang pada Peristiwa Lengkong pada masa Revolusi kemerdekaan Indonesia. Salah satu pahlawan yang dimakamkan di TMP ini adalah Daan Mogot.

Di TMP Taruna, terdapat dua relief dan sebuah tugu. Ke dua relief tersebut, masing-masing menceritakan suasana Akademi Militer dan Peristiwa Lengkong. Tugu yang berada di bagian depan makam bertuliskan nama-nama pahlawan yang dimakamkan di TMP Taruna. Di

bagian belakang makam terdapat bangunan Museum Juang Taruna yang sebagian besar berisi barang-barang koleksi dari Peristiwa Lengkong.

12. Rumah Arsitektur Tionghoa Tan Su Ek



Gambar 9.15. Rumah Tan Su Ek, keturunan Tan Oen Long

Rumah ini merupakan bangunan hunian yang diwariskan secara turun temurun dan diperoleh keluarga Tan Soe Ek dari leluhurnya yang bernama Tan Oen Long, yaitu seorang saudagar Cina Benteng di Tangerang yang pertama kali membangun rumah ini. Pada paruh akhir abad ke-19 (1867-1873), Tan Oen Long dikenal sebagai seorang tuan tanah Cina Benteng yang menguasai tanah-tanah partikelir di Tigaraksa (*Land Tigaraksa*), Gerendeng, dan Kelapa Dua yang menghasilkan komoditas padi, kacang, dan kelapa. Rumah ini juga masih mencerminkan rancangan hunian rumah berlanggam khas Tionghoa abad 19-20.

13. Rumah Arsitektur Tionghoa Lim Tian Tiang

Wujud fisik rumah ini mencerminkan bangunan rumah tua bergaya Indis atau kolonial modern pada umumnya yang didirikan sekitar awal dan pertengahan abad ke-20, yaitu pada masa kolonial akhir

pemerintahan Hindia-Belanda di Indonesia. Rumah Indis merupakan produk budaya membangun masyarakat yang menyesuaikan antara rumah permanen dengan iklim tropis di Indonesia, yang diwujudkan dengan hadirnya atap miring dan teritisan atap yang lebar, ruang teras atau langkan, hingga lubang ventilasi untuk sirkulasi udara.



Gambar 9.16. Rumah Lim Tian Tiang di Karawaci

Tiga elemen arsitektur lain yang menonjol dari rumah ini antara lain kusen pintu dan jendela, pagar baluster, dan penggunaan lubang angin roster yang ketiganya menghadirkan ragam ornamentasi dan dekorasi bercorak Tionghoa dan kolonial. Kondisi tampak luar bangunan rumah hari ini sebagian besar telah mengalami perubahan material, misalnya pada konstruksi atap dan cat dinding akibat usia, cuaca, dan pelapukan sehingga sedikit banyak menurunkan kadar keaslian atau otentisitasnya.

Selain warisan budaya benda yang berasal dari kelompok masyarakat multikultural Kota Tangerang, terdapat juga banyak peninggalan warisan budaya benda kolonial yang dibangun sejak masa emas perdagangan kumpeni VOC abad 17-19 hingga masa penjajahan Hindia-Belanda abad 19-20. Berikut ini adalah beberapa objek yang sejauh

ini berhasil ditemukan, didata, didaftarkan, dan/atau ditetapkan sebagai objek Cagar Budaya Kota Tangerang.

Warisan Budaya Kolonial

14. Kanal Mookervaart (1677-1691)



Gambar 9.17. Kanal Mookervaart sepanjang Jakarta-Tangerang

Kanal atau kali Mookervaart dibangun sejak tahun 1678 hingga 1689 oleh *landbeer* atau tuan tanah di Tangerang bernama Vincent van Mook untuk menarik sepertiga aliran air dari Sungai Cisadane dan terhubung ke kanal-kanal kota Batavia, guna mengendalikan banjir dan mengalirkan air bersih dari Tangerang ke ibukota Batavia. Pada tahun 1732 diperintahkan penggalian lebih dalam, tetapi menciptakan genangan air yang membawa penyakit seperti malaria, meningkatkan tingkat kematian. Selain itu, kanal ini juga meluap tinggi dan deras (*vaart*) selama musim hujan, sehingga dibangun pintu air di ujung atas sungai pada tahun 1770.

Pembangunan pintu air Sewan di masa selanjutnya (1936) membantu mengendalikan aliran air dan menurunkan perahu getek untuk transportasi kanal. Saat ini, di sekitar kanal terdapat Kampung

Mookervaart yang menjadi salah satu kampung tematik sosial-budaya di Kota Tangerang, yang memanfaatkan potensi sejarah dan budaya Kanal Mookervaart dengan menyelenggarakan berbagai acara sejarah dan budaya di sekitar kampung dan Hutan Kota Tangerang.

15. Leenhof's Weergade milik Hendrik Zwaardcroon (1710)



Gambar 9.18. Pintu/pilar hek di Kebon Besar

Susunan pilar tua yang dikenal sebagai “pintu hek” ini eksis berdiri di depan sebuah gang kecil kawasan Kebon Besar, Batu Ceper, Kota Tangerang. Struktur pilar hek adalah bagian kecil dari kompleks hunian mewah milik Hendrick Zwaardcroon, seorang anggota Raad van Indië dan Gubernur-Jenderal ke-20 maskapai dagang VOC di Hindia Timur (1718-1725). Zwaardcroon termasuk kalangan pembesar kumpeni yang merintis gaya hidup membangun rumah peristirahatan *landhuis* di pinggiran ibukota selama abad ke-18. Zwaardcroon lahir di Rotterdam, 26 Januari 1667 dan wafat di Kebon Besar, Batu Ceper pada 12 Agustus 1728 di usianya yang ke-61 tahun. Ia menandai pembukaan tanah Kebon Besar untuk pertama kalinya sejak awal abad ke-18, dan menekuni eksperimen budidaya ulat sutera memanfaatkan kebun Leenhof's Weergade. Di

tempat inilah lokasi pengembangan spesimen sutera pintal “Hindia” untuk pertama kalinya di Nusantara.



Gambar 9.19. Gerbang kebun Leenhof's Weergade



Gambar 9.20. Sumur tua Leenhof's Weergade

Bukan tanpa alasan tempat ini disebut Kebon Besar, karena tidak hanya dipenuhi kebun, tetapi juga karena dimiliki oleh “Tuan Besar” (*Estate van den Besar*), yang merujuk Zwaardcroon sendiri sebagai pejabat

tinggi kumpeni. Sayangnya, bekas reruntuhan rumahnya tidak lagi bersisa, kecuali dua buah sumur tua yang digunakan sebagai sumber air bersih yang kini dipadati permukiman penduduk, serta gerbang kebun. Gerbang kebun ini terletak di tengah lahan pabrik PT Fonder Steel, berjarak sekitar 160 m ke arah timur dari Pintu Hek. Selain itu, ditemukan sebuah sumur tua di sekitar lokasi Kondisi gerbang saat ini kurang terawat.

16. Stasiun Kereta Api Tangerang



Gambar 9.21. Stasiun modern Kereta Api Tangerang hari ini

Transportasi kereta populer di kalangan masyarakat kolonial menjadi penghubung antarwilayah. Perencanaan rel kereta api dari Batavia (Weltevreden) menuju Banten melalui Doeri-Tangerang diusulkan pada April 1896, dan dibuka untuk publik pada 2 Januari 1899, diikuti Doeri-Rangkas Betoeng di bawah pengawasan militer oleh perusahaan kereta api negara *Staatspoorwagen* (SS). Pada masa lalu, Stasiun Tangerang dimanfaatkan sebagai tempat naik-turun penumpang serta barang. Tahun 1935, tercatat setiap hari ada 12 kali perjalanan kereta api dari Duri ke Tangerang, dan sebaliknya dengan jumlah perjalanan yang sama dengan waktu tempuh Duri-Tangerang sekitar 50 menit. Kereta api Duri-

Tangerang tersedia dua rangkaian, yakni rangkaian khusus kelas 3 dan rangkaian campuran antara kelas 2 dan 3. Kelas 2 diperuntukan bagi orang Cina atau Timur Asing dan pengusaha pribumi sedangkan kelas 3, atau yang dikenal dengan “kelas kambing”, diperuntukkan bagi orang bumiputera. Barang yang diangkut sebagian besar berupa hasil-hasil pertanian. Stasiun Kereta Api Tangerang hari ini telah mengalami perkembangan fasilitas dan sarana-prasarana modern. Hanya tersisa sebuah bangunan kantor yang diduga masih memiliki tingkat keaslian dari bangunan stasiun lamanya.

17. Bendungan Pasar Baru



Gambar 9.22. Bendungan Pasar Baru kala malam

Bendungan Pasar Baru terletak di Jl. K.S. Tubun, Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Bendungan Pasar Baru dikenal juga dengan nama Bendungan Sangego atau Bendungan Pintu Air Sepuluh. Nama Bendungan Pintu Air Sepuluh disematkan pada Bendungan tersebut karena bendungan ini memiliki 10 (sepuluh) pintu dari besi dengan 11 tiang penopang, dan konstruksinya menggunakan beton bertulang untuk menutup dan membuka aliran air Sungai Cisadane.

Bendungan Pasar Baru dibangun tahun 1927, dan diresmikan penggunaannya tahun 1930. Bendungan difungsikan untuk mengairi areal persawahan sekitar 40.663 hektar. Pada sisi utara dan selatan bangunan terdapat rel lori yang digunakan untuk mendistribusikan pintu air pengganti jika terdapat kerusakan. Bendungan memanjang dari timur ke barat dengan panjang 125 m, memiliki 10 pintu air, dengan lebar 10 m; tiga *intake*, dan dua pintu penguras lumpur. Berat pintu masing-masing 25 ton.

Bangunan bendungan ini terdiri dari dua tingkat. Untuk ke lantai atas digunakan tangga yang terdapat di ujung timur dan barat bangunan. Pintu bawah memiliki ketinggian 5 m, sedangkan pintu atas memiliki ketinggian 3 m. Bangunan yang terletak di ujung barat dan timur menggunakan lantai ukuran 20 x 20 cm, berwarna abu-abu, bercorak kotak-kotak. Pada lantai dua terdapat 5 ruang yang berisi penggerak pintu air. Beberapa kali dilakukan perbaikan terhadap peralatan bendungan. Di sebelah barat bendungan terdapat bangunan berdenah persegi, dengan pintu berupa rolling door dari besi. Bangunan tersebut difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan lori. Lori tersebut digunakan untuk membawa pintu air pengganti. Lori peninggalan jaman Belanda yang ada, saat ini (2023) masih bisa digunakan. Keadaan bangunan cukup terawat.

18-19. Pintu Air Kecil (Pintu Air Sewan) dan Pintu Air Getek

Kompleks pintu air Sewan didirikan tidak lama setelah Bendungan Pasar Baru selesai dibangun di atas Kanal Mookervaart, dan diresmikan pada tahun 1936. Kompleks ini setidaknya memiliki dua bangunan pintu air, yaitu Pintu Air Sewan atau Pintu Air Kecil yang berada di dekat Hutan Kota Tangerang, dan Pintu Air Getek, yang terletak tidak jauh dari Pintu Air Kecil. Pintu Air Sewan digunakan untuk membuka dan menutup aliran air di Kanal Mookervaart yang berasal dari Sungai Cisadane, sedangkan Pintu Air Getek secara khusus difungsikan sebagai tempat di mana pada jaman dahulu masyarakat menurunkan perahu

geteknya di sini, ketika Kanal Mookervaart masih menjadi moda transportasi air apabila hendak menuju ibukota Batavia.



Gambar 9.23. Pintu Air Kecil atau Pintu Air Sewan



Gambar 9.24. Pintu Air Getek yang berada di atas Kanal Mookervaart

Kedua bangunan pintu air ini masih berdiri kokoh dan seringkali dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah., namun secara teknis kurang terawat meskipun telah mengalami renovasi terhadap permukaannya.

20. Lapas Pemuda Kelas IIA



Gambar 9.25. Lapas Pemuda Kelas IIA (*Jeugd-gevangenis* Tangerang)

Bangunan Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dibuat pada tahun 1924 dan diselesaikan tahun 1927. Lapas Pemuda berada di Jl. LP. Pemuda, Buaran, Tangerang. Bangunan Lapas ini didirikan di areal tanah seluas 28.610 m² dan luas bangunan sekitar 10.312 m². Bentuk bangunan bermodel kipas terdiri dari enam blok yaitu blok A-F sebanyak 120 kamar yang sudah direnovasi, dengan kapasitas 1.251 orang sesuai Standar Minimum Rules (SMR). Menurut Ir. Becking selaku insinyur pemerintah kolonial, desain penjara berbentuk kipas memudahkan pengawasan terhadap narapidana. Setiap kipasnya terdiri atas kamar-kamar tahanan yang berjajar dengan selasar yang ikut memanjang. Seluruh kamar narapidana arah hadapnya ke menara intai (tower) di lapangan tengah.

Model ini merupakan satu contoh mekanisme pengawasan dan kontrol mirip desain penjara panoptikon yang dirancang Jeremy Bentham di Inggris tahun 1787. Desain ini cukup efektif memberikan kesan pada seluruh narapidana bahwa mereka seolah-olah senantiasa diawasi, baik ada maupun tak adanya sipir yang berkeliling. Institusi penjara juga menjadi lembaga edukasi yang melatih para narapidana mempelajari berbagai

kemampuan dan keterampilan mereka untuk menata kualitas hidup. seperti tulis menulis, ilmu keteknikan dan transportasi, membuat anyaman topi bambu, olahraga hingga beladiri. Bahkan para napi penghuni Lapas ini mndapat pelajaran standar etiket bagaimana tata cara makan dan minum yang seharusnya. Lapas ini hingga saat ini (2023) masih digunakan dengan kondisi terawat baik.

21. Lapas Anak dan Pria



Gambar 9.26. Tampak depan gedung Lapas Anak dan Pria

Lapas Anak dan Pria dikenal juga dengan nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang. Terletak di Jl. Daan Mogot 29 C. Lapas ini dibangun pada tahun 1925 untuk menampung sekitar 220 anak keturunan Belanda yang melakukan *juvenile delinquency* (kenakalan anak). Sejak tahun 1934, pengelolaannya dipegang oleh Yayasan Pro Juventute. Di era penjajahan Jepang (1942), tempat itu difungsikan sebagai Pusat Pendidikan Pemuda (*Seinendojo*), sementara pada awal revolusi (1945), lahan tersebut dijadikan Markas Resimen IV Tangerang, dan tahun 1950-an, dijadikan Rumah Pendidikan Negara Jawatan Kepenjaraan. Bangunan tersebut baru difungsikan sebagai Lapas Anak Pria pada 1964.

Bangunan Lembaga Perasyarakatan dibangun di atas lahan milik negara seluas 12.150 m², dan luas bangunan 3.350 m². Arah hadap

bangunan ke utara. Pembangunan Lapas dilakukan secara bertahap. Tahap pertama (1925), didirikan bangunan yang bentuknya menyerupai benteng, dengan denah persegi, di keempat sudutnya berbentuk seperti belah ketupat. Tahap kedua (1970) pembangunan dilanjutkan dengan mendirikan bangunan bagian tengah, (sekarang digunakan sebagai ruang tahanan dan kantor administrasi). Tahap ketiga, lebih banyak dilakukan renovasi tempat tahanan.

Pintu dan jendela bangunan Lapas belum banyak berubah kecuali pada pintu masuk utama yang sudah mengalami pergantian bahan dan bentuk. Kusen jendela dan pintu pada bangunan lamanya berukuran besar, dan setiap kusen pintu dan jendela diberi teralis. Perubahan material bangunan banyak dilakukan pada bagian atap, pintu masuk utama, dan beberapa lantai ruangan. Setiap bangunan penjara yang berada di tengah dikelilingi oleh pagar besi. Kondisi bangunan terawat dengan baik. Lapas anak putra tetap difungsikan hingga saat ini (2023).

22. Lapas Anak dan Wanita

Lapas Wanita dikenal juga dengan nama Lapas Kelas IIA Tangerang. Lapas yang terletak di Jl. Daan Mogot No. 28C, ini merupakan bangunan dengan arsitektur Belanda, yang dibangun untuk mengasingkan anak-anak perempuan dan wanita kriminal Hindia-Belanda. Dibangun diatas tanah seluas 66.000 m², dengan luas bangunan 39.650 m². Yayasan *Land Opvoedings-gesticht* (LOG) dipercaya mengelola tempat “pengasingan” anak-anak nakal ini, pada 1928, kemudian pengelolaan dialihkan ke Yayasan *Pro Juventute* pada 1934. Pada masa Jepang, tempat ini digunakan sebagai rumah tahanan atau kamp interniran bagi para wanita dan anak-anak Belanda yang akan dikembalikan ke negeri asalnya. Bangunan tersebut juga pernah difungsikan sebagai Akademi Militer Tangerang.



Gambar 9.27. Lapas Klas IIA Anak Wanita Tangerang

Tahun 1950, bangunan tersebut dikelola Yayasan Pro Yuwana, yang pada 1962 menyerahkannya ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Pemerintah kemudian mengubah namanya menjadi Rumah Pendidikan Negara. Pada 1964, kembali terjadi perubahan nama lembaga ini menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, dan kemudian pada 1977 namanya diubah lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara Tangerang. Berdasarkan SK Kementerian Kehakiman tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LP, pada tahun 1985 nama terakhirnya menjadi Lapas kelas II B Anak Wanita Tangerang.

23. Museum Lapas Anak Wanita

Museum yang menggunakan fasilitas bangunan gedung lapas anak wanita ini diresmikan pada 17 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Museum ini digadang-gadang sebagai museum lembaga pemasyarakatan pertama di Indonesia. Di dalam museum ini, pengunjung bisa melihat koleksi benda yang berhubungan dengan sejarah lembaga pemasyarakatan sejak era pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, serta foto-foto situasi dan kondisi lembaga pemasyarakatan dan penjara tempo dulu. Kondisi bangunan museum masih tampak asli dan terawat.



Gambar 9.28. Museum Lapas Anak Wanita Tangerang

24. Gedung Gede (Gedung Pertemuan Bhayangkara)



Gambar 9.29. Gedung Gede/Pertemuan Bhayangkara di Ciledug

Gedung ini pertama kali dibangun sebagai rumah kebun (*landhuis*) atau rumah tuan tanah di tanah partikelir Sudimara dan sekitarnya pada pertengahan abad ke-19. Saat ini, bangunan yang berada di daerah Ciledug ini telah lama dipugar dan beralih fungsi menjadi asrama Polri, gedung serbaguna, dan gedung pertemuan bhayangkara Polri.

25. Rumah Telepon



Gambar 9.30. Rumah Telepon di Jalan Daan Mogot

Bangunan ini merupakan peninggalan kantor pos, telepon, dan telegraf pertama di Tangerang raya pada masa kolonial, di bawah institusi *Postkantoor, -Telegraaf, en -Telefoondienst* Tangerang atau P.T.T. Tangerang yang diduga dibangun sekitar dekade awal abad ke-20. Sejak pertengahan abad ke-19, tercatat sudah ada pelayanan kantor pos pembantu di Tangerang (*hulppostkantoor*), yang menjadi cikal bakal untuk dikembangkan menjadi P.T.T. Tangerang. Bangunan ini pada awalnya berfungsi sebagai tempat menghubungkan seluruh kabel telepon dan telegraf di wilayah Tangerang dan sekitarnya ke setiap rumah dan kantor yang menggunakan jasa layanan P.T.T. Tangerang. Saat ini, aset rumah telepon berada di bawah kepemilikan PT. Telkom. Kondisi bangunan relatif cukup baik, meskipun tidak terawat dan digunakan penghuni liar.

26. Rumah Dinas Bekas Wakil Direktur Lapas Anak Pria dan Rumah Dinas Pegawai Lapas Anak Pria

Kedua gedung rumah ini terdapat di sebuah kompleks perumahan bekas pegawai lapas sejak pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Di kompleks ini, masih banyak ditemukan rumah-rumah model Indis atau rumah tinggal kolonial modern yang mencirikan karakter arsitektur

kolonial modern pada tahun 1930-1940-an. Sebagian besar bangunan rumah di kompleks ini telah mengalami renovasi modern.



Gambar 9.31. Salah satu bangunan rumah eks-pegawai lapas

27. Makam Kolonial Lapas Anak Wanita



Gambar 9.32. Makam kolonial di Lapas Anak Wanita

Struktur makam kolonial yang berada di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Anak Wanita telah terdaftar dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya, namun sejarah tentang siapa yang pernah dimakamkan di sini, serta kapan dibangunnya makam ini masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

Bentuk atau tipologi makam yang unik ini mungkin dapat berkontribusi terhadap nilai atau arti khususnya, namun kondisi makam telah mengalami perubahan bentuk aslinya akibat penambahan tegel batu keramik/porselen yang menyelimuti permukaan luar jirat atau badan makam.

28. Batu Penggiling Tebu



Gambar 9.33. Temuan batu penggiling tebu di Kota Tangerang

Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat sebanyak total empat batu penggiling tebu berbentuk silinder yang diperkirakan berasal dari abad ke-18-20 ditemukan di Kota Tangerang. Penemuan ini antara lain dilaporkan oleh komunitas sejarah dan budaya yang menjelajahi kali yang menghubungkan Angke dan Cisadane, serta melalui aktivitas penelusuran Pemerintah Kota Tangerang. Sepanjang abad 18-20, memang banyak pabrik gula atau penggilingan tebu (*suyker moolens*) yang didirikan khususnya di sepanjang bantaran Sungai Cisadane dan Kanal Mookervaart. Pabrik-pabrik ini sebagian besar dimiliki oleh saudagar dari kalangan Eropa-Belanda dan komunitas Tionghoa peranakan Cina Benteng. Langkah awal yang dilakukan sejauh ini terhadap objek-objek temuan ini adalah evakuasi dan penyimpanan antara lain di Museum TMP Taruna, dan memerlukan peneliti lebih lanjut untuk mengidentifikasi nilai sejarahnya, serta sebagai potensi koleksi museum Kota Tangerang.

C. Penetapan Warisan Budaya Takbenda

Pada prinsipnya, Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan WBTb memiliki karakteristik dan prosedur legal-formal serta perlakuan hukum yang berbeda dengan Cagar Budaya (CB) dalam hal memajukan kebudayaannya. Di dalam upaya melestarikan OPK, selain dibutuhkan Pelindungan, Pengembangan, dan Peemanfaatan, juga terdapat ruang lingkup “Pembinaan”, yaitu yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan. Hal tersebut disebabkan objek-objek Pemajuan Kebudayaan lebih melekat dan bergantung kepada manusia sebagai subjek pewarisnya yang lebih banyak dilakukan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Maka dari itu, diperlukan pemberdayaan terhadap manusia pelaku pelestari agar meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Sebelum terbentuknya Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kota Tangerang pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan beberapa kajian dan menyusun Formulir Pencatatan Kekayaan Budaya Takbenda untuk diusulkan sebagai Objek Warisan Budaya Takbenda Nasional. Pengajuan tersebut bersifat berjenjang, yang artinya harus diusulkan ke tingkat Provinsi Banten terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat dikaji dan ditetapkan sebagai WBTb Nasional. Secara berurutan, proses ini melibatkan pengisian formulir pencatatan, kajian dan rapat dinas dengan tim ahli (jika ada), serta pengajuan resmi dari pemerintah tingkat kota ke pemerintah tingkat provinsi, hingga kemudian dari tingkat provinsi ke tingkat nasional melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Hasil dari upaya tersebut adalah ditetapkannya sebanyak total 7 (tujuh) objek WBTb Nasional dari Kota Tangerang, antara lain Tari Cokek (2015); Peh Cun (2021); Silat Be’si, Gambang Kromong, dan Bakcang pada tahun 2022; dan Laksa dan Cio Tao pada tahun 2023. Dengan hadirnya Tim Ahli WBTb Kota Tangerang tahun ini, Pemerintah Kota

Tangerang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah menyusun kajian rekomendasi yang akan diusulkan sebagai WBTb Nasional tahun 2024, antara lain Arakan Perahu Kampung Kalipasir, Gotong Toapekong 12 Tahun Sekali, dan Keramas Bareng di Sungai Cisadane.

1. Peh Cun (2021)

Sungai Cisadane sejak dulu menjadi lokasi ternama digelarnya *Peh Cun* dari seluruh kantong permukiman Tionghoa di Nusantara. Surat kabar Hindia-Belanda kerap memberitakan kemeriahan acara ini, di mana perputaran ekonomi terbesar diraih di Pasar Lama Tangerang dibanding *Peh Cun* di daerah lainnya. Banyak versi mengenai nama dan asal-usul *Peh Cun*. Menurut sinolog Belanda J. Moerman dalam *In en om de Chinesesche kamp* (1932), kata *Peh Cun* dalam bahasa Mandarin bermakna ‘mendayung perahu’, sehingga berhubungan dengan wahana perahu dan sungai. *Peh Cun* juga memiliki sinonim istilah *Go Goe Tseh*, yang dalam dialek Hokkian berarti festival ‘lima-lima’ (重五节/双五节) atau festival tengah tahun (*duānmǔ jié*, 端午節 / 端午节), karena digelar setiap tanggal lima bulan kelima kalender Imlek. Nama lain yang berkaitan dengan *Peh Cun* antara lain festival perahu naga (龙船节 / 龙舟节) dan festival bakcang atau *zongzi* (肉粽节 / 肉糉節).

Budaya ritus *Peh Cun* dibawa oleh diaspora Cina Benteng di Tangerang. Kelenteng Boen Tek Bio, kelenteng tertua di Pasar Lama, menjadi pusat koordinasi kegiatan dan komite pelaksanaan perhelatan ini. Setiap tahun, Sungai Cisadane diramaikan ribuan penduduk yang ingin menyaksikan perlombaan mendayung perahu hias, sambil diiringi musik dan seni pertunjukan, pembagian hadiah dan ragam jenis perlombaan lain. Para peserta lomba mendayung perahu yang dihias motif naga. Srtiap perahu diisi ±15 orang pria dewasa yang bersaing mencapai final dengan memanfaatkan kekuatan kayuh serta arus deras sungai. Kompetisi berlangsung sengit, dan demi menambah semangat, tidak jarang mereka berteriak nyaring, memukul tambur atau simbal, yang disahut antusiasme penonton di tepi sungai sambil bersantai. Selain itu, beberapa kebiasaan

unik di hari *Peh Cun* antara lain menyantap kuliner khas kuecang, bakcang, bakmi dan kue keranjang; mendirikan telur ayam supaya tegak di siang hari, menaruh tanaman herbal di depan rumah; serta mandi di dekat mata air dan memandikan perahu papak tua yang diyakini bersejarah.



Gambar 9.34. Ragam objek WBTb Nasional dari Kota Tangerang: Laksa, Bakcang, Peh Cun, Gambang Kromong, Silat Be'si, dan Cio Tao

Selain di Tangerang, festival ini tidak lagi mudah ditemukan di lingkungan diaspora Tionghoa di Indonesia. Beberapa kali ritus ini resmi dilarang penguasa kolonial dan nasional. Pemerintah Tinggi (*Hoge Regering*) VOC abad 17-18 melarang semua perayaan agama Konghucu di lingkungan kota Batavia. Selama 7 tahun jelang kemerdekaan, orang-orang Tionghoa di Hindia-Belanda juga vakum melangsungkan Peh Cun. Pelarangan kembali diterapkan pemerintahan Orde Baru seiring hadirnya sentimen anti-Cina, hingga Peh Cun digelar kembali tahun 2000 dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

Setelah Indonesia merdeka, *Peh Cun* juga menghadirkan pentas tari asli Indonesia dan mengundang penari asal Tiongkok daratan. Lomba berburu bebek turut memeriahkan jalannya acara. Proses asimilasi budaya yang awalnya didominasi nilai-nilai tradisional dan berasosiasi kuat dengan Tiongkok kini semakin lentur dengan masuknya unsur budaya lokal dan kontemporer, seperti musik Gambang Kromong dan Tari Coket di era pascareformasi. *Peh Cun* menjadi media hiburan masyarakat bermacam latar belakang etnis, agama, dan domisili.

2. Silat Be'si atau Beksi (2022)

Berdasarkan konsensus yang hampir diterima seluruh komunitas Silat Be'si atau Beksi, diakui bahwa pendiri utama dari aliran pencak silat ini didirikan oleh Lie Cheng Oek (atau Hok) yang lahir sejak tahun 1854 dan tinggal di Kampung Dadap, Tangerang. Lie Cheng Oek adalah seorang peternak itik keturunan Tionghoa peranakan. Meskipun keluarganya tidak memiliki warisan beladiri, Lie Cheng Oek memperoleh pengetahuan silatnya dari Jidan dan Miah, penduduk Melayu-Betawi lokal Kampung Dadap. Lie Cheng Oek mengajarkan ilmu silat itu pada keluarga dan murid-muridnya dari kalangan orang Betawi dan Cina Benteng, antara lain yang terkenal adalah Ki Muharli/Marhali, yang bermurid Haji Godjalih, yang menyebarkanluaskannya ke Petungkang dan Batu Ceper.

Beberapa pelaku silat Be'si masa selanjutnya antara lain Haji Hasbullah, M. Nur, Kong Simin, dan Mandor Minggu, serta Lie Djie Tong.

Aliran ini diberi nama *Bie Sie* dalam Bahasa Hokkien, artinya 'empat penjurur', sedangkan menurut G.J. Nawi (2016), asal katanya adalah *Bhe Si* yang berarti 'kuda-kuda'. Keunikan Silat Beksi terletak pada teknik pukulan yang tidak lazim, termasuk penggunaan telapak tangan mengepal yang menghadap ke atas (telentang), serta kekuatan hentakan kaki, sikut, dan cengkeraman. Silat ini memiliki 12 jurus dasar dan pengembangannya bisa bervariasi di setiap tempat, namun tetap memiliki gerakan-gerakan dasarnya. Nama *Bie Sie* atau *Bhe Si* perlahan dilafalkan menjadi *Beksi*, yang dipengaruhi oleh logat orang-orang Melayu-Betawi. Saat ini, ada pula yang mengartikan Beksi sebagai akronim dari "Berbaktilah Kepada Sesama Insan". Silat Be'si juga berkembang luas dan menyebar ke daerah Petukangan dan Batuceper sebagai salah satu kekayaan budaya Betawi dalam hal olahraga tradisional pencak silat. Saat ini terdapat lebih dari 120 sanggar silat Be'si di Jabodetabek.

3. Bakcang (2022)

Makanan ini sangat berkaitan dengan legenda perahu naga Peh Cun, sehingga di Indonesia disebut sebagai Hari Bakcang. Bakcang, atau bacang dalam bahasa Hokkien, secara harfiah berarti berisi daging. Namun, dalam praktiknya, ada variasi yang berisi sayuran atau tanpa berisi apa-apa. Bakcang, kuliner tradisional Cina yang telah dikenal di Indonesia sejak era perdagangan, memiliki kemiripan dengan lontong isi dalam tradisi jajanan pasar lokal. Perbedaannya terletak pada bentuknya yang mencolok, dengan empat sudut yang menggembung dan dibungkus menggunakan daun bambu. Perbedaan utama antara bakcang Cina dan versi Indonesia terletak pada isinya.

Bakcang Cina umumnya berisi daging babi dengan pelengkap ketan tanpa campuran apapun. Sementara itu, bakcang di Indonesia

mengalami modifikasi dengan variasi isian seperti daging ayam. Bakcang berisi daging ayam dibungkus dengan adonan beras, memberikan tampilan mirip lontong. Perpaduan rasa dan bentuk unik membuat bakcang menjadi hidangan yang kaya akan tradisi dan keberagaman di Indonesia.

4. Gambang Kromong (2022)

Gambang Kromong adalah seni musik orkes tradisional Betawi dengan pengaruh kuat dari budaya Cina Benteng. Awalnya hanya disebut gambang, namun pada awal abad ke-20, namanya berubah menjadi gambang kromong dengan penambahan instrumen kromong oleh Nie Hoe Kong. Alat musiknya mencakup berbagai instrumen dari berbagai budaya, seperti Cina, Sunda, dan Jawa. Awalnya digunakan untuk lagu-lagu Cina, gambang kromong kemudian berkembang menjadi jenis tempo dulu dan modern, digunakan dalam teater Lenong dengan pengaruh budaya Arab dan Barat. Masyarakat Betawi mengadopsi gambang kromong dalam upacara adat dan hiburan khas Betawi. Benyamin Sueb membawa gambang kromong ke popularitas baru dengan memadukan musik luar seperti Rock dan Blues, serta memasukkan alat musik modern. Lagu-lagu gambang kromong cenderung gembira dan humoris dengan pantun. Ada tiga jenis lagu: pobin (klasik), dalem (dengan syair dan pantun), dan sayur (lagu modern). Lagu-lagu tersebut memiliki karakteristik yang unik dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Betawi.

5. Laksa (2023)

Laksa merupakan hidangan mie berkuah bumbu rempah, santan atau kari yang mencerminkan hasil perpaduan pengetahuan kuliner tradisional antara budaya Tionghoa, Melayu, dan beragam etnis lainnya. Laksa sangat populer dalam keseharian masyarakat Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Laksa memiliki berbagai jenis, termasuk laksa Penang yang terkenal dengan mie putih dan tebal. Di Indonesia, terdapat variasi Laksa seperti Laksa Tangerang, Laksa Bogor,

Laksa Betawi, Laksa Banjar, dan Laksa Bangsa. Nama Laksa berasal dari bahasa Sanskerta *laksha*, yang berarti banyak, mencerminkan penggunaan beragam bumbu dalam pembuatan mie laksa.

Laksa Tangerang memiliki karakteristik uniknya sendiri. Berbeda dengan laksa lainnya, Laksa Tangerang terbuat dari mie yang dibentuk dari tepung beras putih yang direbus. Tekstur mie laksa menjadi agak kasar dibandingkan laksa Bangka atau yang lainnya. Mie laksa ditaburi dengan daun seledri dan disajikan dengan kuah kuning yang kental. Keunikan lain pada Laksa Tangerang ialah terdapat parutan kelapa yang disangrai dan kacang hijau rebus, memberikan cita rasa manis dan gurih yang khas. Laksa Tangerang biasanya dinikmati dengan lauk pelengkap seperti opor ayam, telur rebus, atau tahu, menambah kelembutan dan keberagaman cita rasa.

6. Cio Tao (2023)

Cio Tao merupakan tradisi pernikahan khas keturunan Cina Benteng di Kota Tangerang. Tata cara perkawinan ini mencerminkan adanya akulturasi antara budaya komunitas Cina Benteng dan budaya penduduk lokal. Prosesi pernikahan ini melibatkan sejumlah langkah, termasuk menyisir rambut, saling menyuapi makanan, berdandan dengan pakaian pernikahan khas, dan mencicipi 12 jenis makanan dengan rasa yang berbeda. Faktor sosial-budaya dari komunitas Cina Benteng dan keberlanjutan adat yang masih dijalankan menjadi wujud usaha untuk menjaga kelestarian tradisi ini. Diyakini juga bahwa setiap orang Tionghoa hanya diperbolehkan melakukan Cio Tao sekali seumur hidupnya.

Upacara dimulai dengan doa restu kepada para leluhur, memohon kemudahan dan keberkahan untuk prosesi yang berlangsung. Makanan seperti buah, manisan, teh, arak, kopi, dan dupa dipersembahkan di meja sembahyang. Pasangan pengantin kemudian diarahkan untuk mencicipi 12 jenis makanan dengan rasa dan bentuk yang berbeda, sebagai simbol dari 12 bulan dalam satu tahun dan banyaknya cobaan dalam kehidupan.

Keunikan lain dari tradisi ini adalah keterlibatan pemandu prosesi dari warga di luar komunitas Cina Benteng, terutama seorang wanita Sunda beragama Islam. Apabila peserta adat Cio Tao beragama muslim, maka tata cara perkawinan berupa akad nikah, prosesi, hingga ritus yang berlangsung disesuaikan dan sebagian ada yang dihilangkan. Hal ini menunjukkan kerukunan dan toleransi lintas budaya dan agama.

D. Festival, Kirab, Parade, dan Arak-arakan

Arakan Perahu Kampung Kalipisir



Gambar 9.35. Arakan Perahu. Sumber: Warta Tangerang

Tradisi Arakan Perahu di Kota Tangerang, khususnya di Kampung Kalipisir, memiliki akar historis dan arkeologis yang kuat. Tradisi ini bermula di kampung kuno Kalipisir, yang didukung oleh bukti sejarah dan foto-foto dari tahun-tahun sebelumnya. Kampung Kalipisir dikenal sebagai tempat tinggal kaum priyayi Aria dan warga Sunda muslim di Tangerang. Arakan perahu, yang juga terkait dengan tradisi Panjang Mulud, menjadi ekspresi kegembiraan warga Kalipisir menyambut Maulid

Nabi Muhammad ﷺ dan merayakan syiar Islam di Kota Tangerang. Tradisi ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kalipasir, bukan hanya sebagai upacara keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk syukur atas nikmat dan kemakmuran yang diberikan oleh Allah.

Perahu yang diarak berisi berbagai berkah, termasuk buah-buahan, sandang-pangan, perlengkapan ibadah, dan perabotan sehari-hari. Uniknya, isi perahu tersebut dijadikan sedekah yang dibagikan kepada warga yang ikut mengarak, menciptakan suasana kebersamaan tanpa adanya persaingan. Perbedaan utama Arakan Perahu di Kota Tangerang dibandingkan tradisi serupa di tempat lain di Provinsi Banten adalah lokusnya yang merupakan teritori sosial-kebudayaan terjauh dari kesultanan Banten. Tradisi ini menjadi unik karena di Kota Tangerang, satu-satunya kota di Tangerang raya yang melaksanakannya.

Sungai Cisadane menjadi lanskap budaya yang diasosiasikan dengan tradisi Arakan Perahu, menjadi wujud penghubung antar komunitas di Pasar Lama Tangerang. Masyarakat Cina Benteng juga menyelenggarakan festival Peh Cun Amal dan Gotong Toapekong setiap 12 tahun sebagai bentuk interaksi antar kelompok. Tradisi Arakan Perahu membantu membangun ingatan kolektif warga Kampung Kalipasir terhadap Masjid Jami Kalipasir sebagai Masjid Cagar Budaya yang bersejarah dan bernilai tinggi secara keagamaan, sosial, dan budaya. Melalui praktik keagamaan dan festival seperti Arakan Perahu, masyarakat terlibat aktif dalam merawat dan meresapi nilai-nilai budaya yang terkait dengan masjid tersebut.

Gotong Toapekong 12 Tahun Sekali Boen Tek Bio

Gotong Toapekong adalah perarakan 12 tahunan yang diselenggarakan oleh Kelenteng Boen Tek Bio di Kota Tangerang. Rute perarakan melibatkan berbagai jalan utama di kota, dan acara ini menjadi kesempatan untuk memperkuat tali silaturahmi antarwarga dan

mempromosikan pariwisata serta keberagaman budaya di Kota Tangerang. Pemerintah kota, di bawah kepemimpinan Arief R Wismansyah, memberikan dukungan penuh terhadap perayaan ini.



Gambar 9.36. Gotong Toapekong tahun 2012. Sumber: Boen Tek Bio

Gotong Toapekong menampilkan berbagai kesenian daerah, seperti Reog Ponorogo, Angklung, Barong Bali, dan baju adat dari berbagai suku. Acara ini juga melibatkan atraksi seperti barongsay, kilinsay, angklung gubrak, perahu pecun, barisan berkuda, dan rombongan pembawa petaka. Pada tahun 2012, acara ini dihadiri oleh perwakilan kelenteng dari seluruh Indonesia, para tamu undangan, serta masyarakat dari dalam dan luar Kota Tangerang. Rangkaian perhelatan Gotong Toapekong melibatkan sterilisasi beberapa jalan utama dan persiapan dari berbagai pihak terkait. Selain menjadi sarana perayaan dan hiburan, acara ini juga menjadi wadah untuk memperlihatkan kekayaan budaya dan kerukunan umat beragama di Kota Tangerang.

Festival-festival Kota Tangerang

Terdapat beragam festival seni dan budaya yang rutin diselenggarakan di Kota Tangerang dan termasuk dalam *event calender*, antara lain:

1. Festival Mookervaart
2. Festival Budaya Kota Tangerang
3. Festival Cisadane
4. Festival Kuliner (Culinary Day & Night)
5. Festival Al-Azhom
6. Pesta Rakyat
7. Festival Budaya Nusantara
8. Kirab Perahu Maulid
9. dan lain sebagainya.



Gambar 9.37. Ragam publikasi festival Kota Tangerang di media sosial

E. Fasilitas, Penelitian, Sosialisasi, dan Pelatihan

Pemerintah Kota Tangerang aktif dalam fasilitasi pelatihan untuk para pelaku seni-budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Gedung Seni Budaya. Program ini difokuskan pada pengembangan kesenian tradisional di daerah kabupaten/kota. Selain itu, terdapat berbagai program fasilitasi lainnya, seperti dukungan pendanaan kegiatan kebudayaan, yang termasuk mendukung Kampung Sejarah dan Budaya Kalipasir dalam merayakan peristiwa Maulid Nabi Muhammad ﷺ dan haul Nyai Guru Hj. Murtafiah di Masjid Jami Kalipasir.

Selama beberapa tahun terakhir, Kota Tangerang juga telah mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka pelestarian Cagar Budaya. Kegiatan melibatkan aspek Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Beberapa kegiatan tersebut mencakup sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya pada tahun 2021, penataan situs makam kuno Kalipasir tahun 2021 dengan membangun cungkup di atas makam kuno, pelatihan penulisan sejarah dan Cagar Budaya Kota Tangerang pada tahun 2022, pendataan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di akhir tahun 2022 bersama dengan kajian Makam Mbah Buyut Jenggot, sosialisasi Cagar Budaya dan kajian inventarisasi Cagar Budaya di Pasar Lama pada tahun 2023 ini, dan banyak kegiatan lainnya.

Program-program lainnya juga melibatkan penelitian, sosialisasi, dan fasilitasi, seperti pelatikan baju adat Kota Tangerang, hingga pelatihan bagi para pelaku seni-budaya yang aktif di wilayah Kota Tangerang. Sarasehan rutin juga diadakan untuk mendiskusikan draf Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Tangerang bersama lebih dari 50 pelaku budaya dari berbagai bidang OPK dan Cagar Budaya.



Gambar 9.38. Seminar Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya Kota Tangerang yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.



Gambar 9.39. Pelatihan menulis sejarah bagi pelajar dan mahasiswa se-Kota Tangerang pada bulan Juli 2022.



Gambar 9.40. Sosialisasi Cagar Budaya pada bulan Agustus 2023

BAB 10

MELINTASI PINTU WAKTU: EKSPLORASI MUSEUM KOTA

M. Alfian Nugraha Fauzi

*“Kami Bukan Pembangun Candi
Kami hanya Pengangkut Batu
Kamilah Angkatan Yang Mesti Musnah
Agar Menjelama Angkatan Baru
Di Atas Pusara Kami Agar Lebih Sempurna”*

Berikut adalah tulisan yang terpatri di sebuah tugu yang berada di Taman Makam Pahlawan Taruna sebagai salah satu pengingat bagi masyarakat terhadap perjuangan para Taruna pada masa itu hingga harus gugur mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk tegaknya sebuah kemerdekaan, tugu pengingat ini berada di sekitar area Museum Juang Taruna. Museum sendiri sejatinya memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi masyarakat sebagai sebuah pengingat akan berbagai macam peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau seperti kisah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bagi sebagian masyarakat keberadaan museum seringkali luput dari pandangan sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang museum yang berada di wilayahnya sendiri. Kota Tangerang sebagai sebuah wilayah yang dikenal dengan industri dan juga Bandaranya ternyata memiliki beberapa museum yang penting sebagai sarana edukasi dan informasi bagi masyarakat terkait sejarah perjalanan panjang wilayah ini pada masa lalu. Beberapa museum yang berada di Kota Tangerang memiliki keunikan masing-masing diantaranya Museum Benteng Heritage yang memiliki keunikan sebagai museum yang berisi terkait sejarah panjang Etnis Tionghoa khususnya di wilayah Tangerang, Museum Pemasarakatan atau Moeseoem Pemasjarakatan memiliki keunikan

sebagai museum yang berisi tentang sejarah lembaga pemasyarakatan dari masa ke masa dan Museum Juang Taruna yang memiliki keunikan sebagai museum yang berisi tentang kiprah para Taruna Akademi Militer Tangerang pada masa lalu. Kedua museum yang berada di wilayah Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Tangerang, khusus untuk Museum Juang Taruna penetapan sebagai cagar budaya ditetapkan kepada Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna yang berusia lebih tua dan juga berada di sekitar area museum.

A. Museum Benteng Heritage

Museum Benteng Heritage merupakan salah satu museum bersejarah yang berada di wilayah Kota Tangerang yang diresmikan pada tahun 2011 oleh pemilik museum tersebut yaitu Udaya Halim.⁶⁵ Bangunan yang digunakan sebagai Museum Benteng Heritage merupakan bangunan lawas khas Tionghoa yang diperkirakan dibangun pada pertengahan abad 17 M dan termasuk salah satu bangunan tertua yang berada di Kota Tangerang. Museum Benteng Heritage terletak di Jalan Cilame yang berada di kawasan Pasar Lama Tangerang yang juga merupakan kawasan bersejarah dengan berbagai macam bangunan khas Tionghoa yang tersebar di kawasan tersebut salah satunya Klenteng Boen Tek Bio. Lokasi Museum Benteng Heritage terletak tidak jauh dari Pendopo Bupati Tangerang yang juga menjadi salah satu bangunan bersejarah yang berada di kawasan tersebut.

Museum Benteng Heritage merupakan salah satu museum yang unik karena memiliki berbagai macam koleksi yang berkaitan dengan sejarah keberadaan masyarakat etnis Tionghoa di wilayah Tangerang. Etnis Tionghoa tentunya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kota Tangerang bahkan kehadirannya yang sudah lama ada telah membaaur dengan

⁶⁵ Selain memiliki Museum Benteng Heritage, Udaya Halim juga memiliki satu bangunan lawas yang berada di sekitar Pasar Lama yaitu Roemboer (Rumah Burung)

masyarakat setempat sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Keberadaan museum ini sangat penting bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Tangerang sebagai sarana edukasi dan informasi masyarakat etnis Tionghoa di Tangerang dari sejak kedatangannya hingga saat ini.



Gambar 10.1. Museum Benteng Heritage yang berada di Kawasan Pasar Lama Tangerang (Sumber: Museum Benteng Heritage)

Jika dilihat dari sejarahnya, sebagian dari rombongan yang datang pada masa itu dipimpin oleh Chen Ci Lung yang diyakini sebagai nenek moyang penduduk Tionghoa Tangerang (Cina Benteng) yang mendarat di Teluk Naga pada tahun 1407.⁶⁶ Penyebaran masyarakat Etnis Tionghoa yang datang ke wilayah Tangerang selanjutnya tidak hanya berada di wilayah Pasar Lama saja namun juga menyebar ke wilayah Tangerang yang lain. Ada satu keunikan dari penyebaran Etnis Tionghoa yang dilakukan pada masa lalu salah satunya adalah adanya persebaran masyarakat Etnis Tionghoa yang terdapat di sepanjang Sungai Cisadane dari muara hingga

⁶⁶ <https://bentengheritage.com/>, diakses pada tanggal 5 November 2023, 06.54 WIB.

ke hulu yang hingga kini masih tetap ada dan membentuk beberapa kawasan masyarakat Etnis Tionghoa.

Museum Benteng Heritage terdiri dari dua lantai dimana pada setiap lantai terdapat berbagai macam koleksi yang bersejarah. Koleksi yang terdapat di Museum Benteng Heritage diantaranya adalah berbagai macam artefak yang berkaitan dengan budaya tionghoa, beberapa lukisan yang menggambarkan suasana Tangerang pada masa lalu serta koleksi alat pemutar lagu yang terbilang lawas. Dengan berbagai macam koleksi tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung yang datang ke Museum Benteng Heritage.



Gambar 10.2. Salah satu bagian dalam Museum Benteng Heritage
(Sumber: Museum Benteng Heritage)

Museum Benteng Heritage telah menjadi sarana edukasi dan informasi bagi masyarakat Kota Tangerang untuk mengetahui lebih dalam terkait keberadaan dan kehidupan masyarakat etnis Tionghoa yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat khususnya di wilayah Kota Tangerang. Mengingat bersejarahnya bangunan Museum Benteng Heritage, maka Pemerintah Kota Tangerang menetapkan bangunan ini

sebagai salah satu cagar budaya yang berada di Kota Tangerang.⁶⁷ Dengan adanya penetapan bangunan museum oleh pemerintah sebagai cagar budaya, diharapkan bangunan bersejarah ini tetap terjaga keberadaannya serta keasliannya sehingga dapat disaksikan oleh generasi berikutnya kelak.

B. Museum Pemasyarakatan

Museum Pemasyarakatan (Moeseoem Pemasjarakatan) atau dikenal pula dengan sebutan Museum Lapas merupakan salah satu museum bersejarah yang berada di wilayah Kota Tangerang. Museum Pemasyarakatan berada di Jalan Daan Mogot tepatnya berada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA (Sebelumnya dikenal dengan Lapas Anak Wanita). Begitu mendengar nama Museum Lapas tentu yang berada dalam pikiran adalah museum ini berkaitan erat dengan Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan yang selama ini identik sebagai tempat penahanan bagi seseorang yang melakukan kesalahan. Namun inilah salah satu keunikan dari museum ini dimana tempat yang dianggap oleh masyarakat demikian ternyata terdapat sebuah museum yang tentunya menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan museum ini.

Museum Pemasyarakatan atau Moeseoem Pemasjarakatan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masa itu yaitu Yasonna Laoly. Museum Pemasyarakatan merupakan sebuah museum yang khusus berisi tentang sejarah panjang lembaga pemasyarakatan di Indonesia sejak masa kolonial Hindia Belanda hingga pada saat Indonesia. Dengan kehadiran Museum Pemasyarakatan tentunya dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang menghadirkan berbagai macam informasi dan juga edukasi bagi

⁶⁷ Surat Keputusan Walikota Tangerang No 430/kep.337-Disporbudpar/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 tentang Penetapan Objek Cagar Budaya Kota Tangerang.

masyarakat di Kota Tangerang yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan sejarah lembaga pemasyarakatan di Indonesia.



Gambar 10.3. Bagian depan Museum Pemasyarakatan
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Museum Pemasyarakatan sendiri menempati sebuah bangunan lawas yang telah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda. Bangunan museum ini dibangun bersamaan dengan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan berada di bagian kanan Lapas. Bangunan Museum Pemasyarakatan dahulu merupakan Rumah Dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian difungsikan sebagai sebuah museum. Sejarah juga mencatat bahwa Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA beserta bangunan Museum Pemasyarakatan pernah digunakan sebagai Akademi Militer Tangerang pada tahun 1945 hingga tahun 1946. Hal ini tentunya semakin menambah nilai sejarah terhadap Bangunan Museum Pemasyarakatan beserta bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA.

Museum Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai sebuah museum yang unik karena museum yang mengusung tema tentang

“Penjara” termasuk tidak banyak ditemukan di Indonesia. Museum Pemasyarakatan merupakan museum pertama di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah hadirnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia sehingga keberadaannya patut dipertahankan dan dilestarikan.

Layaknya sebuah museum, di dalam Museum Pemasyarakatan terdapat berbagai macam koleksi yang berkaitan dengan sejarah keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia diantaranya adalah koleksi berbagai jenis senjata baik senjata tajam maupun senjata api yang digunakan oleh para petugas lapas atau sipir pada masa itu. Selain itu terdapat pula berbagai macam koleksi foto lawas yang berkaitan dengan sejarah hadirnya lembaga pemasyarakatan di Indonesia dari masa ke masa dan juga berbagai macam koleksi lainnya di Museum Pemasyarakatan.



Gambar 10.4. Koleksi Senjata di Museum Pemasyarakatan
(Sumber: Johanes Paulus, Google Maps)

Mengingat Museum Pemasyarakatan berada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan area terbatas maka para

pengunjung yang berkunjung harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA untuk dapat masuk ke dalam Museum Pemasyarakatan. Pada dasarnya ketika berkunjung ke Museum Pemasyarakatan, para pengunjung dapat juga menikmati keindahan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang juga merupakan bangunan lawas peninggalan masa kolonial Hindia Belanda. Ketika mengunjungi Museum Pemasyarakatan terdapat sebuah tugu yang berangka tahun 1877. Tugu ini diperkirakan lebih tua dari pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Bangunan Museum Pemasyarakatan, mengingat keduanya dibangun pada masa yang bersamaan sekitar tahun 1920-an oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.



Gambar 10.5. Tugu yang berada di dekat Museum Pemasyarakatan yang berangka tahun 1877. (Sumber: Dokumen Pribadi)

Berdasarkan peta pada tahun 1911, diperkirakan sebelum berdirinya Bangunan Museum Pemasyarakatan dan Lembaga

Pemasyrakatan Kelas IIA di tempat tersebut pernah berdiri sebuah bangunan yang disebut *Landhuis Tanah Tinggi* berikut terdapat *Suiker Fabriek* atau pabrik gula yang terdapat di sekitar di lokasi tersebut.⁶⁸ Salah satu bukti bahwa di sekitar lokasi tersebut terdapat pabrik gula adalah ditemukannya batu gilingan tebu yang berada di tepi kanal Mookervaart yang berada di seberang bangunan Museum Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA.



Gambar 10.6. Dua buah makam kuno yang berada di sekitar area Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. (Sumber: Dokumen Pribadi)

Selain itu terdapat pula dua buah makam kuno yang berada di area Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA. Saat ini telah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap dua buah makam tersebut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang beserta pihak yang terkait untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang dua buah makam tersebut. Hal ini tentunya semakin menambah pengetahuan serta informasi bagi para pengunjung terkait dengan Museum Pemasyarakatan beserta area di sekitarnya yang juga penuh dengan sejarah.

⁶⁸ Reyhan Biadillah (2023), *Landhuis di Jabodetabek*, Yogyakarta: Terakata, hlm. 172.

Sebagai bangunan yang sarat akan sejarah maka Museum Pemasarakatan kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2018 oleh Pemerintah Kota Tangerang.⁶⁹ Dengan ditetapkannya Museum Pemasarakatan sebagai cagar budaya maka museum ini mengikuti bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai objek Cagar Budaya pada tahun 2011. Penetapan ini menjadi bukti perhatian pemerintah khususnya Pemerintah Kota Tangerang terhadap bangunan bersejarah yang berada di wilayahnya untuk selanjutnya dilakukan penetapan sebagai cagar budaya. Diharapkan dengan adanya penetapan ini Museum Pemasarakatan dapat tetap terjaga keasliannya dan terawat serta tetap lestari hingga dapat disaksikan oleh generasi berikutnya.

3. MUSEUM JUANG TARUNA

Museum Juang Taruna merupakan salah satu museum yang berada di wilayah Kota Tangerang yang terletak di Jalan TMP Taruna dimana museum ini berdampingan pula dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang yang dahulu pernah berfungsi sebagai Markas Resimen IV TKR Tangerang. Museum ini diresmikan oleh Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah pada tahun 2016 dan sesuai dengan namanya, museum ini sangat berkaitan erat dengan perjuangan serta peranan para Taruna Akademi Militer Tangerang yang pernah berjuang untuk bangsa dan Negara dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan para Taruna pada masa itu merupakan salah satu upaya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih pada tahun 1945 dimana pada saat itu sebagai pasukan dengan pengalaman tempur yang masih terbilang minim, para taruna harus bertempur menghadapi Pasukan Jepang yang secara pengalaman lebih mampu dan siap untuk bertempur. Peristiwa yang selanjutnya lebih dikenal dengan

⁶⁹ Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya.

Palagan Lengkong tersebut terjadi di daerah Lengkong yang kini termasuk ke dalam wilayah Serpong, Kota Tangerang Selatan.



Gambar 10.7. Museum Juang Taruna dan TMP Taruna pada tahun 1996
(Sumber: Museum Juang Taruna)

Sebagai salah satu wujud penghormatan dan juga mengenang jasa para Taruna yang gugur dalam Palagan Lengkong tersebut maka didirikanlah Museum Juang Taruna yang didedikasikan untuk para Taruna yang gugur dalam peristiwa tersebut yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1946. Salah satu pahlawan yang gugur dalam Palagan Lengkong adalah Mayor Daan Mogot yang pada saat itu bertugas sebagai Direktur Akademi Militer Tangerang. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama jalan yang terbentang dari Tangerang hingga Jakarta yang kini dikenal dengan nama Jalan Daan Mogot. Selain itu untuk mengenang peristiwa yang heroik tersebut, setiap tanggal 25 Januari selalu diperingati sebagai Hari Bhakti Taruna Akademi Militer.



Gambar 10.8. Lukisan Diorama terjadinya Palagan Lengkong yang berada di dalam salah satu bagian Museum Juang Taruna
(Sumber: Dokumen Pribadi)

Museum Juang Taruna memiliki koleksi yang terbagi ke dalam tiga bagian atau ruangan dimana sebagian besar koleksi yang berada di dalam Museum Juang Taruna ini adalah berupa foto-foto yang berkaitan dengan kiprah para Taruna Akademi Militer Tangerang dan juga perjuangan para Taruna dalam Palagan Lengkong. Pada ruangan utama museum yang berada di bagian tengah terdapat informasi mengenai terjadinya Palagan Lengkong dan juga koleksi foto-foto dari Mayor Daan Mogot beserta para Taruna yang gugur serta koleksi foto aktifitas yang dilakukan oleh para taruna Akademi Militer Tangerang pada masa itu.

Pada bagian kanan dan kiri museum terdapat koleksi foto berupa foto para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan kedaulatan Negara dan juga koleksi foto berbagai macam kegiatan yang pernah dilakukan di area Taman Makam Pahlawan Taruna dalam rangka mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam Palagan Lengkong

tersebut serta satu lukisan diorama yang menceritakan bagaimana kronologis para Taruna melakukan persiapan untuk melucuti senjata milik Pasukan Jepang hingga kemudian terjadi pertempuran tidak seimbang, peristiwa tersebut selanjutnya lebih dikenal sebagai Palagan Lengkong.⁷⁰



Gambar 10.9. Diorama terjadinya Palagan Lengkong yang berada di bagian luar Museum Juang Taruna. (Sumber: Dokumen Pribadi)

Museum Juang Taruna memiliki keunikan dimana di sekitar area museum terdapat pusara makam para Taruna beserta Makam Mayor Daan Mogot yang gugur dalam Palagan Lengkong, tercatat sekitar 48 makam yang terdapat di area museum ini. Taman Makam Pahlawan Taruna yang menjadi tempat bersemayamnya para Taruna yang gugur tersebut telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Tangerang.⁷¹ Hal ini mengingat betapa pentingnya keberadaan makam tersebut terhadap sejarah berdirinya Akademi Militer yang pernah berada di Tangerang hingga terjadinya Palagan Lengkong.

⁷⁰ Tempat terjadinya Pertempuran antara para Taruna Akademi Militer Tangerang dengan pasukan Jepang kini berdiri Monumen Daan Mogot

⁷¹ Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya.



Gambar 10.10. Pusara Makam Para Taruna yang gugur dalam Palagan Lengkong di TMP Taruna. (Sumber: Dokumen Pribadi)

Taman Makam Pahlawan Taruna telah ada sejak tahun 1946 tepatnya sejak pemakaman kembali para Taruna yang gugur di Palagan Lengkong. Pada saat terjadinya peristiwa tersebut, mereka yang gugur tidak langsung dimakamkan di lokasi yang sekarang yaitu Taman Makam Pahlawan Taruna. Saat itu para taruna yang gugur hanya dimakamkan seadanya saja di lokasi terjadinya Palagan Lengkong di Serpong termasuk Mayor Daan Mogot. Pemakaman kembali di Taman Makam Pahlawan Taruna dilakukan pada tanggal 29 Januari 1946 yang dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Soetan Sjahrir.⁷²

Sebagai salah satu cagar budaya yang berada di Kota Tangerang, berbagai macam upaya dilakukan agar Taman Makam Pahlawan Taruna tetap terjaga dan terawat. Upaya ini sebenarnya sudah dilakukan pula jauh

⁷² R.H.A. Saleh (1995), *Akademi Militer Tangerang dan peristiwa Lengkong*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan Sebelas Maret University Press, hlm. 110.

sebelum ditetapkannya Taman Makam Pahlawan Taruna sebagai cagar budaya. Bahkan upaya ini telah dilakukan pada saat Kota Tangerang masih berbentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Mengingat pentingnya Taman Makam Pahlawan Taruna sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di Kota Tangerang maka dibangun pula Museum Juang Taruna untuk melengkapinya.



Gambar 10.11. Pemasangan paving block di area Taman Makam Pahlawan Taruna tahun 1995. (Sumber: Khastara Perpunas)

Bagi para pengunjung yang datang ke lokasi ini tentu dapat langsung berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Taruna yang berada dalam satu lingkungan dengan Museum Juang Taruna sehingga membuat para pengunjung yang datang dapat memperoleh banyak informasi yang penting terkait dengan kedua destinasi wisata sejarah tersebut. Kehadiran Museum Juang Taruna yang berada dalam satu lingkungan dengan Taman makam Pahlawan Taruna menjadi sebuah kenikman tersendiri yang dapat melengkapi pengetahuan para pengunjung tentang kiprah para Taruna Akademi Militer Tangerang dan Palagan Lengkong.

EPILOG

Mushab Abdu Asy Syahid & M. Alfian Nugraha Fauzi

Dalam buku “Tiga Dekade Sejarah dan Pembangunan Kota Tangerang” ini, kita menyaksikan perjalanan panjang kota ini sejak pendiriannya pada tahun 1993 hingga memasuki usianya yang ke-30. Melalui kepemimpinan Wali Kota dari Djakaria Machmud hingga Arief Rachadiono Wismansyah, terwujud berbagai kebijakan inovatif dan program pembangunan. Masyarakat kota, sebagai kontributor aktif, menjadi pilar utama kesuksesan pembangunan, menjadikan Tangerang tempat yang aman dan nyaman. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, Tangerang tidak luput dari tragedi kelam, yang mengingatkan masyarakat pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Nilai-nilai Akhlakul Karimah dapat menjadi panduan relevan menghadapi keragaman masyarakat yang heterogen. Sebuah panggilan menjaga hubungan baik antarwarga, melintasi perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.

Masyarakat Tangerang juga telah diajak untuk mengenali sejarah panjang kota ini melalui kunjungan ke berbagai kisah menarik yang menyimpan makna berharga atas tumbuhnya suatu kota. Meskipun dikenal sebagai kota industri pada masa pascareformasi ini, Kota Tangerang memiliki kekayaan warisan budaya, sejarah, dan pusaka yang menjadi sumber edukasi, informasi, dan inspirasi bagi warganya. Keberlanjutan objek-objek ini bergantung pada partisipasi masyarakat yang dapat menjaganya melalui kunjungan rutin, sehingga mereka tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, sebagai epilog dari perjalanan tiga dekade ini, kita diberikan pandangan mengenai kesuksesan, tragedi, dan nilai-nilai yang membentuk karakter Kota Tangerang. Sebuah panggilan untuk mempertahankan persatuan, memahami sejarah, dan menjaga warisan demi masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Penetapan Kota Tangerang sebagai Ibukota Kabupaten.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan.

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 135.04/154-Bapeda.

Surat Keputusan Walikota Tangerang No 430/kep.337-Disporbudpar/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 tentang Penetapan Objek Cagar Budaya Kota Tangerang.

Buku, Jurnal, Artikel Ilmiah, Arsip

_____. "Indonesiërs staken voor uitbetaling van minimumloon,"
De Volkskrant, 19 Januari 1994.

Aga Khan Award for Architecture, ed., 1995, *Architect's record of Soekarno-Hatta international airport landscaping*, Courtesy of Architect (submitted to the Aga Khan Award for Architecture).

- Aga Khan Award for Architecture, ed., 1995, *Soekarno-Hatta International Airport landscaping on-site review report*.
- Al-Radi, S., “Landscaping Integration of Soekarno-Hatta Airport,” hlm. 147-153.
- Akmal, I., 2016, *Wiratman Architecture: Airport Design*, Imelda Akmal Writer Studio, IMAJI Media Pustaka.
- Ali, M., Permana, R., dan Supiyatna, 2018, *Sejarah Kota Tangerang: Dari Zaman Nirleka sampai Orde Baru*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, Tangerang.
- Andreu, P., 1990, *The Metamorphosis of the Circle*, Paris, monograf.
- Asmadi, 2001, *Tingkat Kebutuhan dan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan Perumahan di Kabupaten Tangerang tahun 1993-1999*, Tesis Magister (S2) Ilmu Geografi FMIPA Universitas Indonesia (UI), Depok.
- Asoit, C. S., 2003, *Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Kota Tangerang dan Jakarta Barat 1990-2000*, Tesis S2 Magister Ilmu Geografi Pascasarjana UI, Depok.
- Augé, M., 1992, “From Places to Non-Places”, *Non-Lieux: Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, terjemahan oleh John Howe, Verso, London, hlm. 75-121.
- Bappeda Kota Tangerang, 2014, *Laporan Akhir Rencana Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka*. Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang.
- Biadillah, R., 2023. *Landbuis di Jabodetabek*, Terakata, Yogyakarta.
- Čepaitienė, R., 2015, “Center and periphery: borderline cities and borderlines of cities,” *Journal of Architecture and Urbanism*, 39:1.
- Cortêsão, A., 1944, *The Suma Oriental of Tomé Pires and The Book of Francisco Rodrigues, an Account of The East, from The Red Sea to Japan*, Vol. 1, Council of Hakluyt Society, London.

- Davidson, C. C. & Serageldin, I., eds., 1995, 'Landscaping Integration of the Soekarno-Hatta Airport', *Architecture beyond architecture, creativity and social transformations in Islamic cultures, The 1995 Aga Khan Award for Architecture*, Academy Editions, London.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, 2023, *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Tangerang*. Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang.
- Fakih, F., 2020, *Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950-1965)*. Brill, Leiden.
- Frampton, K., 1987, "Ten Points on an Architecture of Regionalism: A Provisional Polemic", *Center 3: New Regionalism*, Austin: The University of Texas, hlm. 20-27.
- Friedmann, J., 1966, *Regional development policy: A case study of Venezuela*. Cambridge: MIT Press.
- Gottschalk, L.R., 1950;1969, *Understanding History; A primer of historical method*. Knopf, New York.
- Gren, J., 2003, "Reaching the peripheral regional growth centres," *European Journal of Spatial Development*, 3, 1-20, ISSN 1650-9544.
- Halim, W., 2005, *Ziarah budaya kota Tangerang, menuju masyarakat berperadaban akhlakul karimah*, Penerbit Pendulum, Salemba.
- Hall, S., ed., 1997, *Representation: Cultural representation and signifying practices*, SAGE Publications & The Open University, London.
- Husain, M., 1995, *Technical Review Summary Jakarta Airport Terminal II*. Aga Khan Award for Architecture.
- Irsyam, T.W.M., 2017, *Berkembang dalam Bayang-bayang Jakarta: Sejarah Depok 1950-1990-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- James-Chakraborty, K., 2014, 'Beyond postcolonialism: New directions for the history of nonwestern architecture,' *Frontiers of Architectural Research*, 3, hlm. 1-9. Higher Education Press.
- Jasin, R.A., 1830;1970, *Paririmbon Ka-ari-an Parabijang*. Dicitak terbatas.
- Jongeling, P., et.al., *Nederlands dagblad: gereformeed*, 5 Mei 1994.
- Khan, H., ed., 1991, 'Indonesia: Jakarta International Airport,' *Mimar 40: Architecture in development*, Concept Media Ltd., London.
- Kusno, A., 2020, "Middling urbanism: the megacity and the kampung," *Urban Geography*, 41:7, hlm. 954-970.
- Kusno, A., 2000, *Behind the postcolonialism: Architecture, urban space and political cultures in Indonesia*. Routledge, London.
- Kusno, A., 2009, *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca-Subarto*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Kusno, A., 2010, *The Appearance of Memory: Mnemonic Practices of Architecture and Urban Form in Indonesia*, Duke University Press.
- Kusumawijaya, M., 2023, *Kota-Kota Indonesia: Pengantar untuk Orang Banyak*, Komunitas Bambu, Depok.
- Khosla, R., 1989;1995, *Jakarta Soekarno-Hatta International Airport Tangerang, Indonesia (Technical Review Summary)*, The Aga Khan Award for Architecture.
- Lloyd, J., 2003, 'Airport Technology, Travel and Consumption', *Space & Culture* Vol. 6 No. 2, hlm. 93-109, SAGE Publication.
- Lubis, B. U., 2017, "Mendesain Airport di Indonesia", Seminar IAI & Imelda Akmal Writing Studio, Rabu, 15 Maret 2017, Jakarta Design Center (JDC), Jakarta.
- Lynch, K., 1960, *The image of the city*. MIT Press, Massachussets.

- Marihandono, D., 2010, “Menjadi Sejarawan Profesional: Kajian tentang Sumber Sejarah dan Metodologinya”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UI, 3 November 2010.
- Mignolo, W., 1993, *Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges and the Border Thinking*, Princeton Univevrstiy Press, New Jersey.
- Mrázek, R., 2002, *Engineers of happy land: Technology and nationalism in a colony*, Princeton University Press, Oxford.
- Mrázek, R., 2004, “Bypasses and flyovers: Approaching the metropolitan history of Indonesia,” *Social History*, 29:4, hlm425-443.
- Murtono, 1998, ‘Proses transformasi masyarakat pertanian menuju masyarakat industri (studi kasus Tangerang, Bekasi, Bogor)’, Tesis Pascasarjana Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nas, P.J.M., 1986, “Jabodetabek: an Indonesian-Dutch concept on metropolitan planning of the Jakarta region,” *The Indonesian City*, hlm. 101-115, Foris, Dordrecht.
- Nas, P.J.M., 2011, *Cities full of symbols: a theory of urban space and culture*, Leiden University Press, Leiden.
- Pemda Kotamadya Dati II Tangerang, 1995, *Sejarah terbentuknya Kotamadya Dati II Tangerang*, Pemda Kotamadya Dati II Tangerang, Tangerang.
- Pullan, W., 2011, “Frontier urbanism: the periphery at the centre of contested cities,” *The Journal of Architecture*, 16: 1, hlm. 15-35.
- Saragih, S., 1997, *Unjuk Rasa Buruh Industri Tangerang*, Tesis Pascasarjana Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Salah, R.H.A. 1995. *Akademi Militer Tangerang dan Peristiwa Lengkong*, Yayasan Pustaka Nusatama dan Sebelas Maret University Press, Yogyakarta.

- Shiraishi, S., 1990, 'Pengantar, or Introduction to New Order Indonesia', *Indonesia*, No. 50, hlm. 121-157, Southeast Asia Program Publication Cornell University, Amerika Serikat.
- Smith, J. 1993, 'Air Transport and Airport Planning towards The Twenty First Century,' *Area* Vol. 25, No. 2, hlm. 173-174, Wiley, The Royal Geographical Society with IBG.
- Soeharto, 1985, *Sambutan Pada Upacara Peresmian Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, pada Tanggal 5 Juli 1985*.
- Soeharto, 1992, *Sambutan Pada Peresmian Terminal II Bandar Udara Internasional Jakarta, Soekarno-Hatta pada tanggal 11 Mei, 1992*.
- Subandri, A., 1989, 'Sejarah berdirinya pemerintah daerah Tangerang: Sebuah tinjauan ketatanegaraan', skripsi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.
- Sumarda, H., 1985, *Tangerang 1945-46: Pemerintahan dan rakyat*, Skripsi S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.
- Syahid, M.A.A., 2021, "Membangun pinggiran, menyangga ibukota: Arsitektur dan infrastruktur kolonial di Tangerang abad 18-20," dalam *Masyarakat Indonesia Menulis Sejarah dalam Pantulan Sejarah Lokal dan Sosial*. Jakarta: Kemendikbudristek, hlm. 55-95.
- Syahid, M.A.A., 2018, "No fort in fort city: Lost heritage and the shift of urban conservation in Tangerang, Indonesia," *IOP Proceedings: Earth and Environmental Series*.
- Taqim, M., 1997, *Analisis Dinamika Penduduk terhadap Perubahan Fungsi Laban di Kotamadya Tangerang*, Tesis Pascasarjana Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (UI), Jakarta.
- Trubina, E., 2015, "Configuring center-periphery relations: relational legacy in the over-centralized state," *Journal of Architecture and Urbanism*, 39:1, hlm. 28-36.
- Uffelen, C.V., 2012, *Airport architecture*, Braun Publishing, Switzerland.

Wirasonjaya, S., 1995, *Local Report: Jakarta Airport Terminal II*, April 1995.

Zein, H.M. dan Djamal, C., 1998, *Kota Tangerang, Benteng yang Berbias*, Pemdada Kotamadya Dati II Tangerang, Tangerang.

Zukowsky, J., ed., 1996, *Building for air travel, architecture and design for commercial aviation*, The Art Institute of Chicago & Prestel-Verlag, Munich & New York.

Situs Internet dan Wawancara

<http://metro.sindonews.com/read/1081058/171/jangan-salah-sebut-bandara-Soetta-berada-di-tangerang-banten-1453997778>

<http://bandarasoekarnohatta.com/jakarta-atau-tangerang-bandara-Soetta-sebenarnya-termasuk-daerah-yang-mana.info>

<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/34197/warga-tangerang-tahu-ini-nggak-arti-dan-makna-lambang-kota-tangerang>

<http://soeharto.co/jejak-presiden-soeharto-dalam-peresmian-proyek-pembangunan>.

<https://www.republika.id/posts/20834/masjid-raya-al-azhom-unik-dan-megah-di-kota-benteng>, diakses 5 November 2023, 14.19 WIB.

<https://rsud.tangerangkota.go.id/a/sejarah>, diakses 2 Desember 2023, 14.34 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/539567/rano-karno-lantik-wali-kota-tangerang-besok>, diakses pada 28 November 2023, 05.24 WIB.

<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/tangerang/pr-59612714/walikota-tangerang-raih-penghargaan-kepala-daerah-inovatif>, diakses tanggal 2 Desember 2023, 15.44 WIB.

<https://tangerangkota.go.id/berita/detail/38861/bupati-poso-acungi-jempol-super-apps-tangerang-live>, diakses pada tanggal 28 November 2023, 11.11 WIB.

<https://tangerangkota.go.id/berita/detail/30637/wujudkan-kota-layak-huni-7-032-rumah-di-kota-tangerang-telah-dibedah>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/wujudkan-kota-layak-investasi-tangerang-integrasikan-123-layanan>, diakses pada tanggal 29 November, 05.44 WIB.

<https://www.tangerangkota.go.id/berita>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/16338/taman-terbuka-buat-kegiatan-masyarakat>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023, 16.20 WIB.

<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/16586/manfaat-kampung-tematik-bidang-ekonomi-kesejahteraan-warga-meningkat-banyak-usaha-baru-muncul>, diakses pada tanggal 3 Desember 2023, 16.30 WIB.

<https://banten.antaranews.com/berita/32545/pemkab-serahkan-stadion-benteng-ke-pemkot-tangerang>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023, 10.40 WIB.

<https://sport.republika.co.id/berita/r6s552456/stadion-benteng-tangerang-resmi-berganti-nama-renovasi-besarsbesaran-juga-dilakukan>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023, 11.00 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2023/06/08/19344181/pemkot-tangerang-gratiskan-biaya-sekolah-di-146-sd-smp-swasta-pengamat>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023, 12.01 WIB.

<https://tangerangkota.go.id/pemerintah>, diakses pada 22 November 2023, 08.44 WIB.

<https://harapanrakyatonline.com/walikota-percantik-kota-dengan-budaya/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023, 14.29 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-4811737/festival-budaya-nusantara-hadir-lagi-di-kota-tangerang>, diakses pada tanggal 5 Desember, 01.04 WIB.

<https://banten.antaranews.com/berita/32056/festival-budaya-nusantara-wujud-persatuan-keragaman-di-kota-tangerang>, diakses pada 5 Desember 2023, 01.17 WIB.

<https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/7924/kali-pasir-roh-dari-kota-tangerang-yang-menyimpan-sejarah-nasional>, diakses pada 1 Desember 2023, 10.42 WIB.

<https://bentengheritage.com/>, diakses pada tanggal 5 November 2023, 06.54 WIB.

Paul Andreu, Aeroports De Paris (ADP): <https://www.parisaeroport.fr>.

<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah/>

<http://www.paul-andreu.com/>

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>

<http://www.tangerangkota.go.id/>

<https://www.bitungkota.go.id/sejarah>

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7063/UU0021993.html>

Wawancara Budi Adelar Sukada tanggal 10 Desember 2016.

Wawancara Pensiun Pegawai Angkasa Pura II tanggal 22 April 2017.

Wawancara Saptono Istiawan, tanggal 23 April s/d 4 Juni 2017.

PROFIL PENULIS

Mush'ab 'Abdu Asy Syahid, S.Ars., M.Ars.



Mushab menghabiskan lama masa kecilnya di Kota Tangerang, tepatnya di Kunciran, Ciledug dan Cipondoh saat bersekolah di MI Plus Asy-Syukriyyah hingga ke sekolah menengah di SMP Negeri 2 Kota Tangerang, dan melanjutkan studi SMAN Cahaya Madani Banten di Pandeglang. Ia meraih gelar Sarjana Arsitektur (S-1) pada tahun 2015 dan Magister Arsitektur (S-2) pada tahun 2017 dengan peminatan khusus Sejarah dan Teori Arsitektur di Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) Depok, serta memperoleh sertifikat kompetensi Ahli Cagar Budaya Madya (2023-2026) dan Penulis Sejarah (2021-2024) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P2) Kemendikbudristek. Ia juga memiliki pengalaman mengajar di Departemen Arsitektur FTUI dan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) sepanjang tahun 2018-2021. Sejak tahun 2022, ia berprofesi sebagai Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), dan aktif terlibat sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2019 dan anggota Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kota Tangerang, Provinsi Banten sejak tahun 2023. Minat studi dan pengalamannya di penelitian, publikasi, dan pekerjaan profesional meliputi bidang ilmu sejarah arsitektur dan kota kolonial-pascakolonial, pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda, hingga seni dan arsitektur Islam, terutama di Banten dan Jabodetabek.

M. Alfian Nugraha Fauzi, S.Pd., M.Pd.



Alfian lahir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Juni 1990 dan saat ini aktif mengajar sebagai Guru Sejarah di SMAN 20 Kabupaten Tangerang, dan juga sebagai Dosen/Tutor di Universitas Terbuka. Kegiatan lain yang Alfian lakukan adalah aktif mengisi acara sebagai Narasumber atau Pemateri dalam berbagai kegiatan seminar, pelatihan, dan sarasehan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan aspek kesejarahan yang berada di wilayah Tangerang. Ia juga merupakan pendiri (*founder*) dari media sosial *Tangerang Heritage* serta aktif mempublikasikan berbagai macam informasi terkait dengan kesejarahan yang berada di wilayah Tangerang melalui media sosial. Alfian menyelesaikan studi S-1 di Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Sejarah pada tahun 2013 dan menyelesaikan studi S-2 di Universitas Indraprasta PGRI jurusan Pendidikan IPS pada tahun 2020. Saat ini penulis juga aktif dalam kegiatan penulisan ilmiah dan artikel bertemakan kesejarahan dan cagar budaya di antaranya *Buletin Cagar Budaya*, *Majalah Museografia* dan *Jalur Rempah* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI).

TIGA DEKADE SEJARAH DAN PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG

Buku ini berupaya menggali sejarah dan perkembangan pembangunan Kota Tangerang, dalam perjalanannya sebagai kota peri-urban yang terbentang di antara Banten dan Jakarta selama tiga puluh tahun lamanya (1993-2023). Pembaca diajak menjelajahi transformasi Kota Tangerang sebagai kota otonom dari awal pendiriannya hingga menjadi pusat yang pesat hari ini. Beberapa aspek kunci yang mendorong pertumbuhan kota ini, seperti fenomena pascaindustrialisme daerah penyangga, peran penting infrastruktur bandara Soekarno-Hatta, hingga pencarian potensi lokalitas dan identitas kota melalui pelestarian warisan budaya turut dibahas. Buku ini juga menyoroti sekian inovasi dan kebijakan progresif yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, dari masa kepemimpinan Walikota Djakarta Machmud hingga Walikota Arief Wismansyah sebagai pendorong perubahan bagi masyarakat dan ruang kota. Konsep dan slogan "LIVE" misalnya, mencerminkan sebuah visi untuk menjadi kota berkelanjutan, dengan penyediaan fasilitas terkini yang menjawab kebutuhan sekaligus mendukung keseharian warga. Selain membahas perkembangan infrastruktur fisik, buku ini juga mengeksplorasi perkembangan perbaikan lingkungan hidup yang nyaman dan layak untuk dikunjungi di kota modern. Destinasi wisata, warisan budaya, dan cagar budaya menjadi sorotan sebagai daya tarik bagi masyarakat yang ingin merasakan keberagaman dan keindahan Kota Tangerang. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun menarik, buku ini bukan hanya menjadi catatan sejarah yang deskriptif, tetapi juga menjadi pemantik diskusi dan rujukan awal untuk mendalami transformasi kota yang berkelanjutan di Kota Tangerang.



Mushab Abdu Asy Syahid, S.Ars., M.Ars.

Berlatar belakang pendidikan S-1 Sarjana Arsitektur dan S-2 Magister Arsitektur dengan peminatan Sejarah dan Teori Arsitektur dari Universitas Indonesia (UI) Depok. Memperoleh sertifikat kompetensi Ahli Cagar Budaya Madya (2023-2026) dan Penulis Sejarah (2021-2024) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Berprofesi sebagai Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), dan terlibat sebagai anggota Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.



Muhammad Alfian Nugraha Fauzi, S.Pd., M.Pd.

Lulus sebagai Sarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Universitas Indraprasta PGRI, dan Pendidikan Profesi Guru di Universitas Lampung (Uhlis). Saat ini berprofesi sebagai Guru Sejarah dan "Guru Penggerak" di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 20 Kabupaten Tangerang, serta menjadi Tutor Universitas Terbuka (UT). Di samping itu, ia juga aktif mengelola akun media sosial *Tangerang Heritage* yang produktif mengulas berbagai informasi menarik seputar sejarah dan warisan budaya di wilayah Tangerang Raya.



Disbudpar

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang

ISBN 978-623-09-7386-4



9

786230

973864